



Kerjasama

Balitbang Kabupaten Lahat

Dengan

FISIP Universitas Airlangga Surabaya

LAPORAN ANTARA

**KAJIAN PENGUATAN
INDEKS KESALEHAN SOSIAL
DI KABUPATEN LAHAT**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk dapat mengabdikan kepada bangsa dan negara serta menjadikannya sebagai ladang ibadah menuai pahala dan Ridho Allah SWT. Karena rahmat dan karunia-Nya pula “Kajian Penguatan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Lahat” dapat terlaksana dengan baik.

Buku laporan ini menyampaikan hasil survey terkait indeks kesalehan sosial masyarakat Kabupaten Lahat. Kajian ini kami anggap penting setidaknya karena beberapa pertimbangan. Pertama, penelitian ini mencoba menggali kembali sejauhmana tingkat esalehan sosial masyarakat. Selama ini belum ada kajian berkesinambungan yang secara spesifik mengukur bagaimana tingkat kesalehan sosial masyarakat Lahat. Kedua, penelitian ini juga menelusuri aspek-aspek yang berkaitan dengan dimensi-dimensi yang ada dalam kesalehan sosial sehingga bisa mengukur realitas kesalehan sosial masyarakat Kabupaten Lahat. Ketiga, penelitian ini berhasil memotret dimensi-dimensi mana dari kesalehan sosial yang memiliki nilai indeks masih kurang dan yang sudah cukup, atau yang dianggap sudah baik.

Buku ini juga memberikan informasi yang memadai tentang bagaimana relasi antara tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesalehan sosial dengan bagaimana sikap kesalehan sosial mereka, serta mengukur bagaimana relasi antara kesalehan individu (ritual) dengan kesalehan sosial. Tidak dapat dipungkiri, informasi tentang hal tersebut penting diketahui sehingga ditemukan formulasi alternatif yang sesuai dengan realitas di tengah-tengah masyarakat Lahat. Dari hasil penelitian ini semoga dapat menjadi masukan bagi rancangan kebijakan dan peraturan pemerintah Kabupaten Lahat dalam membangun pengetahuan dan pengamalan keagamaan masyarakat.

Semoga informasi dari kajian ini kemudian benar-benar dapat dipakai dalam merumuskan solusi alternatif bagi perencanaan



pembangunan di bidang keagamaan, sehingga agama dapat memberikan sumbangan yang konstruktif bagi pembangunan Kabupaten Lahat.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Kegiatan	6
1.3. Tujuan	6
1.4. Sasaran.....	6
1.5. Manfaat	6
1.6. Luaran.....	6
BAB II KERANGKA HUKUM DAN TEORI	7
1.1. Dasar Hukum.....	7
1.2. Kerangka Teori.....	7
1.2.1. Teori Wacana Kritis.....	7
1.2.2. Perilaku Sosial	19
1.2.3. Kesalahan Sosial.....	35
1.2.4. Penelitian Terdahulu.....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
3.1. Jenis Penelitian dan Metode.....	47
3.1.1. Metode dan Teknik.....	47
3.1.2. Alat Pengumpul dan Pengolah Data	47
3.2. Populasi dan Sampel	47
3.2.1. Metode Pengambilan Sampel	49
3.3. Waktu dan Tempat Penelitian.....	51
3.4. Variabel.....	51
3.1. Teknik Pengumpulan Data	53
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	53
3.6. Pengolahan Data dan Analisis Survey	54
BAB VI GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAHAT	56
4.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	56
4.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	56
4.2 Demografi	79
4.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	81



4.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	100
4.4 ASPEK PELAYANAN UMUM.....	103
4.5 FOKUS URUSAN DASAR.....	111
4.6 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN	128
5.1 Sebaran Responden	138
5.1.1 Sebaran Responden Menurut Kecamatan..	138
5.1.2 Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur	139
5.1.3 Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin 140	140
5.1.4 Sebaran Responden Menurut Suku	141
5.1.5 Sebaran Responden Menurut Pendidikan Terakhir.....	142
5.1.6 Sebaran Responden Menurut Agama	143
5.1.7 Sebaran Responden Menurut Pekerjaan	144
5.1.8 Sebaran Responden Menurut Penghasilan Perbulan	145
DAFTAR PUSTAKA.....	146
LAMPIRAN	148



DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Sebaran Responden Menurut Kecamatan	138
Gambar 5. 2 Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur.....	139
Gambar 5. 3 Sebaran responden berdasarkan jenis kelamin.....	140
Gambar 5. 4 Sebaran Responden Menurut Suku	141
Gambar 5. 5 Sebaran Responden Menurut Pendidikan Terakhir.....	142
Gambar 5. 6 Sebaran Responden Menurut Agama	143
Gambar 5. 7 Responden Berdasarkan Pekerjaan	144
Gambar 5. 8 Sebaran Responden Menurut Penghasilan Perbulan	145



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Relasi agama sangat erat hubungannya dengan kehidupan sosial. Agama sebagai suatu sistem yang mencakup individu dan masyarakat, seperti adanya emosi keagamaan, ritus dan upacara menjadi satu kesatuan yang terikat dalam agama. Banyak pandangan yang mengatakan bahwa agama-agama besar di dunia, termasuk Islam selalu mengalami proses akulturasi dengan budaya lokal para penganutnya. Kondisi itu disebabkan karena secara sosiologis, para pemeluk agama akan mengekspresikan keyakinannya sesuai dengan situasi sosial budayanya. Warna-warna lokal itulah yang membuat agama selalu mengalami variasi, perbedaan, dan kontras. Antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya selalu tidak sama dalam mempraktikkan keyakinannya.

Sama halnya ketika agama yang datang dalam suatu negara, misalnya Indonesia, dimana mayoritas penduduk di negara ini adalah beragama Islam. Perilaku agama yang ada di Indonesia berbeda dengan pemeluk agama Islam yang berada di Amerika, Australia dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa agama yang berkembang dalam masyarakat itu saling berpengaruh dalam budaya setempat.

Asumsi semacam inilah yang melatarbelakangi munculnya berbagai penelitian tentang hubungan antara agama dan kebudayaan di berbagai kawasan, termasuk penelitian tentang pemeluk Islam. Melalui fakta tersebut bisa disimpulkan, ketika agama dilihat sebagai fakta sosial akan tampak bahwa kehidupan suatu agama selalu bersifat plural. Di samping itu, selalu terjadi proses dialog antara agama yang bersifat normatif dengan realitas sosial yang bersifat dinamis. Jadi, Islam yang turun dalam konteks budaya Arab setelah melebar ke berbagai penjuru termasuk dan bertemu dengan berbagai budaya, suku bangsa termasuk ke dalam melayu, maka sudah semestinya mengalami perubahan yang bersifat lokal, termasuk Islam yang berkembang di Indonesia.



Dalam perspektif antropologi, khususnya antropologi linguistik, warna-warna lokal tersebut dapat dijelaskan dan diidentifikasi melalui wacana yang berkembang dalam kehidupan masyarakat muslim setempat. Menurut Savile Troike organisasi sosial keyakinan, nilai-nilai dan bahkan perilaku masyarakat tidak terlepas dari faktor-faktor bahwa (wacana) dalam proses sosialisasi.

Dalam buku karya Clifford Geertz yang berjudul *The Religion Of Java* yang mana dalam temuannya dan sering menjadi referensi dalam menjelaskan Islam di Indonesia dalam konteks pengelompokan sosial budaya, terdapat tiga varian yaitu santri, priyayi dan abangan. Pengelompokan Islam di Jawa tersebut tidak bisa dilepaskan dari faktor politik dan ekonomi polarisasi masyarakat dalam aliran politik seperti santri yang menjadi pendukung Masyumi atau NU, priyayi yang menjadi pendukung Partai Nasional Indonesia dan abangan yang menjadi pendukung Partai Komunis Indonesia berkaitan erat dengan perbedaan kelas ekonomi yang terjadi pada masyarakat Islam waktu itu. Sekalipun tiga variasi tersebut mulai mencair dan tidak jelas ciri-cirinya, bukan berarti warna lokal dalam Islam menjadi hilang, bahkan karena Islam di Indonesia mengalami perjumpaan yang sangat intens dengan budaya lokal, maka warna-warna lokal tersebut sangat mudah dikenal.

Setiap agama, memiliki sistem kepercayaan, keyakinan atau keimanan dan ibadah. Keyakinan terhadap Tuhan saja tidaklah cukup, tetapi perlu dimanifestasikan dalam serangkaian peribadatan, baik ritual maupun sosial. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan apapun agamanya, harus melaksanakan perintah-Nya dan menjauhkan larangan-Nya. Aturan mengenai "perintah" dan "larangan" yang mendasari hubungan manusia dengan Tuhan, disebut ibadah, yaitu upaya seseorang untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ibadah ini ada dua macam yaitu: pertama, ibadah individual, yaitu ibadah yang manfaatnya kembali pada diri sendiri. Kedua, ibadah sosial, yaitu ibadah yang manfaatnya untuk masyarakat (kepentingan umum).



Dalam Islam, kedudukan ibadah sosial memiliki keistimewaan tersendiri yang dalam penelitian ini disebut dengan kesalehan sosial. Dalam Islam (kaidah fiqh) disebutkan: “ibadah yang bermanfaat kepada orang lain lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya hanya kepada diri sendiri”. Helmiyati misalnya, menafsirkan lebih jauh bahwa “kesalehan sosial” adalah perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai sosial yang bersifat sosial. Bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat concern terhadap masalah ummat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan seterusnya.

Jadi kesalehan sosial merupakan suatu bentuk kesalehan yang tidak hanya ditandai oleh rukuk dan sujud, puasa dan haji melainkan juga ditandai seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebajikan untuk orang-orang di sekitarnya. Sehingga orang merasa nyaman, damai, dan tentram berinteraksi dan bekerjasama dan bergaul dengannya. Dalam ajaran Kristen dan Katolik, kesalehan sosial merupakan peribadatan tertinggi yang disebut dengan bonum commune (kebaikan bersama yang dikenal dengan prinsip subsidiaritas, yang kuat menolong yang lemah, mengasihi sesama). Hal ini dapat kita lihat dalam implementasinya di seluruh gerak keagamaannya adalah untuk kemaslahatan umum. Mereka mendirikan rumah sakit, sekolah, panti jompo dan seterusnya.

Sementara itu dalam agama Hindu ada tiga hal yang mendorong munculnya kebahagiaan dalam kehidupan sosial yaitu, parahyangan (hubungan yang harmonis dengan sang pencipta), pawongan (hubungan yang harmonis antar sesama manusia) dan palemahan (hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya). Dalam agama Buddha kesalehan sosial disebut dana paramita, yaitu perbuatan luhur tentang beramal, baik material maupun non material. Singkatnya adalah dana, atidana dan mahatidana.



Indonesia adalah bangsa yang pluralistic dalam berbagai hal yang religiusitas yang tinggi. Untuk meningkatkan religiusitas masyarakat, maka sarana, prasarana dan kelembagaan terus bertambah di setiap komunitas, sehingga pendidikan dan pembinaan keagamaan semakin pesat. Kehidupan keagamaan semakin semarak pada moment peringatan hari-hari besar dan perayaan keagamaan. Majelis-majelis agama, organisasi sosial keagamaan dan bahkan partai politik keagamaan juga berlomba-lomba mewarnai diskursus publik dengan beragam model dan aksi.

Namun demikian, pada sisi lain ada fenomena berbagai penyakit sosial, seperti tingginya angka kriminalitas, maraknya pornografi dan pornoaksi, peredaran narkoba dan miras, pelanggaran hak asasi manusia, serta kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di hampir semua tingkatan dan aspek kehidupan. Mulai dari pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan berbagai persyaratan administratif yang mengada-ada, proyek pengadaan di instansi pemerintahan, operasi jalan raya, sampai proses penegakan hukum. Pada tahun 2005, menurut data Political Economic and Risk Consultancy (PERC), Indonesia menempati urutan pertama sebagai Negara terkorup di Asia.

Hingga saat ini perilaku koruptif itu masih belum bisa dihilangkan meski Indonesia sudah memiliki lembaga khusus dalam penanganan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Media massa hingga kini masih banyak memberitakan kasus-kasus korupsi yang tidak hanya melibatkan para pejabat eksekutif, tapi juga dari Lembaga legislatif dan yudikatif, baik di pemerintahan pusat maupun daerah.

Sementara itu, pemberdayaan umat oleh lembaga sosial keagamaan belum maksimal, akibat adanya sejumlah factor seperti: belum maksimalnya pengelolaan dana dan aset umat tersebut, baik dalam hal pengumpulan, pengelolaan, pemanfaat, dan pengawasannya. Padahal, dana sosial keagamaan seperti zakat, wakaf dan sedekah (Islam), kolekte (Katolik dan Kristen), punia (Buddha), dan paramita (Hindu) memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,



mengurangi angka kemiskinan, dan membuka lapangan kerja baru. Umat Islam misalnya, wajib menunaikan ibadah sosial seperti zakat, infak, dan sodaqoh, namun demikian umat Islam saat ini masih banyak yang masuk kategori miskin,⁴ terbelakang, dan berpendidikan rendah, meski pengelolaan zakat sudah lebih terorganisir dan mendapat support dari pemerintah. Sejak jaman Presiden Soeharto zakat sebenarnya sudah dikelola secara terorganisir dengan dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) pada tahun 1968. BAZ kemudian berkembang pada 1991 menjadi Badan Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 24 dan N0.47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS, meskipun kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS masih rendah. Realitas tersebut di atas mengusik kita, bahwa nampak masih adanya kesenjangan dalam keberagamaan masyarakat yaitu, pertama, ada kesenjangan antara nilai-nilai ajaran agama dan sikap keagamaan para pemeluknya. Kedua, agama sebagai daya tangkal terhadap kecenderungan manusia berperilaku menyimpang dan bersikap antisosial belum cukup optimal. Ketiga, pelaksanaan ibadah agama yang bersifat sosial nampaknya belum maksimal sehingga agama belum sepenuhnya berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka penting dilakukan kegiatan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana solidaritas sosial, relasi sosial antarras, menjaga etika dan budi pekerti, menjaga kelestarian alam lingkungan dan menjaga stabilitas. Melalui kajian ini diharapkan dapat diciptakan suatu iklim yang dapat menumbuh suburkan lahirnya berbagai bentuk ibadah dan kesalehan sosial oleh masyarakat yang dapat memberikan implikasi sosio-kultural bagi pembangunan masyarakat dan bangsa di masa yang akan datang. Berangkat dari latar belakang tersebut, Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Balitbang Kabupaten Lahat bekerjasama dengan FISIP Universitas Airlangga Surabaya melalui Unair untuk Menyusun kajian ini.



1.2. Maksud Kegiatan

Adanya kegiatan survei Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Lahat.tahun 2023.

1.3. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini, yaitu:

- a. Melakukan Survey pada Indikator Kesalehan Sosial
- b. Melakukan analisis data survey
- c. Melakukan kajian optimalisasi dan penguatan Program-program pembangunan yang berpotensi pada peningkatan kesalehan sosial
- d. Menyusun Saran dan rekomendasi

1.4. Sasaran

Masyarakat Kabupaten Lahat di tahun 2023

1.5. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini yakni:

- a. Bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lahat dalam merumuskan kebijakan pembangunan terkait keagamaan dan mendorong secara lebih maksimal pengamalan nilai-nilai agama di masing-masing agama serta instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat yang terkait dengan kesalehan sosial;
- b. Referensi bagi akademisi, para pakar, dan pemerhati perilaku sosial keagamaan sebagai bahan kajian lebih lanjut

1.6. Luaran

Luaran yang dihasilkan, yakni Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Lahat 2023



BAB II KERANGKA HUKUM DAN TEORI

1.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Selatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
9. Peraturan Menteri Agama 65 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama 65 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama.

1.2. Kerangka Teori

1.2.1. Teori Wacana Kritis

Teori wacana kritis yang diusung oleh Norman Fairclough, yang menyatakan bahwa dalam perubahan sosialnya (*social*



change). Menandakan bahwa terdapat tiga dimensi atau tahapan dalam proses analisis terhadap realitas, yaitu teks, praktik kewacanaan (*discourse practice*), dan praktik sosial (*sociocultural practice*).

Pertama, dimensi teks. Teks yang ada dianalisis secara linguistik dengan melihat kosa kata, semantik, sintaksis, kohesi dan koherensi. Kedua, praktik kewacanaan (*discourse practice*). Dimensi ini berhubungan dengan proses produksi teks dan konsumsi teks. Dalam hal ini untuk menggali informasi mengenai produsen teks, yang dibagi menjadi tiga aspek: individu produsen teks, latar belakang kehidupan, dan rutinitas kerja. Marianne dan Louis menyebutkan bahwa praktik kewacanaan juga dapat dilacak melalui rantai intertekstualitas. Bahwa teks dibentuk oleh teks yang datang sebelumnya, saling melengkapi dan menanggapi. Dan dari sanalah kita bisa mengetahui perbedaan antar teks yang disebabkan oleh interpretasi yang berbeda.

Ketiga, praktik sosial (*sociocultural practice*). Dimensi ini berhubungan dengan konteks di luar teks. Di dalam praktik sosial perlu adanya eksplorasi secara intens untuk mengetahui hubungan antara wacana dengan praktik sosial. Sebab, konteks sosial yang berada di luar teks sangatlah menentukan munculnya warna wacana dalam proses produksi teks. Pun sebaliknya, wacana yang dihasilkan juga sangat berpengaruh terhadap praktik sosial. Terdapat tiga macam bentuk praktik sosial yang dapat mempengaruhi wacana: situasional (waktu, suasana, kondisi), institusional, dan sosial (sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya).

a. Pendekatan dalam Analisis Wacana

Sesungguhnya ada banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan analisis wacana. Slembrouck membukukan sekitar 8 pendekatan analisis wacana termasuk



diantaranya filsafat analitis, linguistik, post- strukturalis, semiotik, *cultural studies*, teori-teori sosial. Dalam penelitian ini akan dibentangkan 3 analisis wacana menurut pendekatan atau episteme empirime positivistik, fenomenologi dan post- strukturalisme, khususnya teori wacana Foucault, sebagai berikut:

1. Pendekatan epistemologi empirime positivisme

Pendekatan ini melahirkan pengertian bahwa bahasa adalah medium komunikasi belaka. Bahasa dalam episteme ini dimaknai secara polos. Bahasa dipandang semata sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan, untuk mengekspresikan rasa cinta dan seni, untuk melakukan persuasi-persuasi, serta wahana untuk menyampaikan dan melestarikan kearifan-kearifan serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu komunitas. Sejauh mampu menggunakan pernyataan-pernyataan yang akurat, menurut kaidah sintaksis, semantik, logis dan menggunakan data- data empiris sebagai pendukung, pengguna bahasa dalam pandangan ini dianggap memiliki kemampuan mental kognitif yang bebas dari distorsi- distorsi.

Pola dan hubungan makna bahasa dapat dipelajari secara diskrit atau otonom tanpa acuan-acuan informasi lainnya. Dalam menganalisis suatu pidato, misalnya, referensi mengenai seluk-beluk pembicara tidak begitu diperlukan. Pengkaji hanya perlu mengkonsentrasikan kajiannya pada naskah atau teks pidato yang dimaksud, dan melihat makna pidato berdasarkan pada kaidah-kaidah semantik/sintaksis teks tersebut.

Wacana dalam perspektif ini dimaknai sebagai:



Pengucapan-pengucapan yang kompleks dan beraturan, yang mengikuti norma atau standar yang telah pasti dan pada gilirannya mengorganisasikan kenyataan yang tak beraturan. Norma atau standar itu, lebih jauh lagi dianggap ikut menyusun perilaku- perilaku manusia yakni dengan cara memasukkan episode-episode penampilan tertentu dalam kategori-kategori politik, sosial, atau hubungan sosial lainnya.³⁶

Pandangan Saphiro ini menyiratkan bahwa kaidah, norma atau standar (dalam hal ini sintaksis dan semantik) sangat menentukan nilai suatu wacana. Secara lebih sederhana, Crystal dan Cook dalam Nunan mendefinisikan *discourse* atau wacana sebagai unit bahasa lebih besar daripada kalimat, sering berupa satuan yang runtut/koheren dan memiliki tujuan dan konteks tertentu, seperti ceramah agama, argumen, lelucon atau cerita. Walaupun tidak setegas Saphiro, Nunan melihat pentingnya unsur-unsur keruntutan dan koherensi sebagai hal yang penting untuk menilai sebuah wacana.

Sementara Lubis secara lebih netral mendefinisikan wacana/diskursus sebagai 'kumpulan pernyataan-pernyataan yang ditulis atau diucapkan atau dikomunikasikan dengan menggunakan tanda-tanda'. Whitemengartikannya sebagai 'dasar untuk memutuskan apa yang akan ditetapkan sebagai suatu fakta dalam masalah-masalah yang dibahas, dan

untuk menentukan apa yang sesuai untuk memahami fakta-fakta yang kemudian ditetapkan'. Tidak seperti yang lain White melihat wacana lebih sebagai sebab daripada sebagai akibat atau produk.

Dengan pemahaman wacana seperti tersebut di atas, Nunan menyatakan bahwa analisis wacana adalah studi mengenai penggunaan bahasa yang memiliki tujuan



untuk menunjukkan dan menginterpretasikan adanya hubungan antara tatanan atau pola-pola dengan tujuan yang diekspresikan melalui unit kebahasaan tersebut.

Analisis wacana model Nunan ini dilakukan melalui pembedahan dan pencermatan secara mendetil elemen-elemen linguistik seperti kohesi, elipsis, konjungsi, struktur informasi, thema dsb untuk menunjukkan makna yang tidak tertampak pada permukaan sebuah wacana. Misalnya sebuah percakapan yang secara fisik tidak memiliki *cohesive link* sama sekali dapat menjadi wacana yang runtut dalam konteks tertentu, sementara suatu kelompok kalimat yang memiliki *cohesive links* justru tidak atau belum tentu menjadi wacana yang runtut, hingga dapat disimpulkan bahwa eksistensi *cohesive link* tidak menjamin keruntutan suatu wacana. Oleh karenanya dibutuhkan pengetahuan mengenai fungsi setiap ujaran yang ada untuk memahami sebuah diskursus.

2. Fenomenologi

Pandangan fenomenologi melangkah lebih jauh dari pandangan empirisme positivisme dengan melihat bahasa tidak secara steril atau terpilah dari subjek atau penuturnya. Tidak seperti pandangan empirisme positivistik yang memotong objek dari subjeknya, dalam persektif ini subjek dianggap memiliki intensi-intensi yang mempengaruhi bahasa atau wacana yang diproduksinya. Dalam pandangan ini subjek memiliki peran yang penting karena ia dapat melakukan kendali-kendali atas apa yang

diungkapkannya, atas apa yang ia maksud, atas bagaimana maksud itu dikemukakan, apakah secara terselubung atau eksplisit. Seperti yang dikemukakan



Dallmayr bahasa dan wacana menurut pemahaman fenomenologi justru diatur dan dihidupkan oleh pengucapan-pengucapan yang bertujuan.

Setiap pernyataan adalah tindakan penciptaan makna, yakni tindakan pembentukan diri serta pengungkapan jati diri sang pembicara. Analisis wacana dalam perspektif ini berusaha membongkar dan mengungkap maksud-maksud tersembunyi yang ada di balik ujaran-ujaran yang diproduksi. Dengan cara meneliti ujaran-ujaran yang ada dalam wacana, lalu menarik garis merah dengan jati diri si penulis atau pembicaranya. Analisis ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pembaca- pembaca yang berpotensi tidak atau kurang menyadari adanya maksud tersembunyi si pencipta wacana tersebut.

3. Post-Strukturalisme

Post-strukturalisme memandang bahasa bukan semata sebagai medium ekspresi, tetapi sebagai medium untuk melakukan dominasi dan menyebarkan kekuasaan. Bahasa adalah alat bagi lembaga-lembaga untuk menyebarkan kekuasaannya. Pandangan ini melihat adanya konstelasi kekuatan dalam proses pembentukan dan reproduksi makna.

Discourse is the means by which institution wield their power through a process of definition and exclusion, intelligibility and legitimacy. What he means by this is the way particular discourse or discursive formation define what it is possible to say on any given topic. A discursive formation consists of a body of unwritten rules, and shared assumptions which attempt to regulate what can be written, thought and acted upon a particular field.



Jika dalam beberapa pengertian sebelumnya kata wacana terbatas pada pengertian unit kebahasaan, pernyataan, pemikiran atau landasan penentuan dan pemahaman akan fakta-fakta, dalam konsep Foucault, wacana mengandung pengertian akan adanya *power* dan kekuasaan dibalik pernyataan-pernyataan tersebut. Paham ini mempercayai bahwa relasi kekuasaan dalam masyarakat mempengaruhi dan membentuk cara-cara bagaimana kita saling berkomunikasi dan bagaimana pengetahuan diciptakan. Diskursus dipercayai sebagai piranti-piranti yang digunakan lembaga-lembaga untuk mempraktekkan kuasa-kuasa mereka melalui proses-proses pendefinisian, pengisolasian, membenaran. Ia menentukan mana yang bisa dikatakan, mana yang tidak terhadap suatu bidang tertentu, pada kurun waktu tertentu pula.

Tata wacana terdiri dari sekumpulan peraturan-peraturan tak tertulis serta asumsi-asumsi yang dipahami bersama sebagai upaya untuk mengatur apa yang pantas ditulis, dipikirkan dan dilakukan dalam suatu bidang. Analisis wacana mempelajari bagaimana peraturan-peraturan, konvensi-konvensi dan prosedur-prosedur yang membenarkan dan menentukan tata wacana (*discursive practice*). Ia menelusuri secara mendalam segala sesuatu yang dikatakan atau ditulis dalam masyarakat, sistem umum, repertoar dari topik-topik pembicaraan aturan-aturan yang dinyatakan yang mengatur apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh, apa yang bisa diperdebatkan dalam suatu bidang kajian.

Aliran ini juga menentukan objek penelusuran secara berbeda, yakni memfokuskan meskipun tidak secara



eksklusif, terhadap materi-materi tertulis dalam konteks lembaga, sosial dan politis. Analisis wacana dalam pengertian ini tidak lebih mementingkan disiplin-disiplin budaya tinggi seperti sastra, filsafat dan sejarah, ia menggunakan metode-metode analisis isi, naratologi, semiotik dan *ideologiekritik* untuk mengungkap diskursus/wacana dalam kehidupan sehari-hari.

Karena kekuasaan senantiasa menjejawantah (*inherent*) dalam wacana, maka studi wacana adalah pula studi politik atau lebih tepatnya studi politik kritis, karena studi ini bersifat pembongkaran atas apa-apa yang tersembunyi. Di sisi lain studi ini dapat pula disebut sebagai studi emansipatoris mengingat adanya kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan studi terhadap wacana tandingan yang muncul atas wacana tertentu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Foucault bahwa kekuasaan itu menyebar, dan di mana ada kekuasaan pada umumnya ada perlawanan atau resistensi.

Salah satu yang dirasakan mengganggu dari pendekatan ini adalah krisis 'kebenaran' dan 'rasionalitas'. Dalam pandangan post-strukturalisme, misalnya fakta sejarah dan 'fakta legal' pun dipandang sebagai konstruksi diskursif yang maknanya amat tergantung pada siapa yang bicara, dimana, bagaimana, kapan dsb, sehingga tulisan-tulisan sejarah yang pada mulanya dianggap ilmiah dapat dibongkar kembali menggunakan analisis wacana model ini, misalnya melalui pendekatan naratif, atau analisis naratif untuk melihat alur pikir tulisan, dan dengan demikian dapat dilihat pula maksud yang mungkin tersembunyi di balik penggunaan alur pikir tersebut.



"Fakta-fakta" sejarah menjadi kabur dan sehingga tidak bisa dijadikan patokan.

Dari tiga model analisis wacana, model terakhir yang menggunakan perspektif Foucault dirasakan paling memberi peluang untuk melakukan pembongkaran kritis terhadap "kebenaran-kebenaran" yang selama ini dianggap mapan. Masih banyak model-model analisis wacana yang lain yang dapat digunakan, yang memberi pilihan-pilihan seluas-luasnya bagi peneliti atau pengkaji. Pembelajaran disertai praktik-praktik uji coba berbagai model sesuai kebutuhan akan menghasilkan ketrampilan meneliti yang handal.

a. Karakteristik Analisis Wacana Keagamaan

Istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna "ucapan atau tuturan". Wacana dipadankan dengan istilah *discourse* dalam bahasa Inggris dan *le discours* dalam bahasa Prancis. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani *discursus* yang bermakna "berlari ke sana ke mari"⁴⁰. Di dalam *Dictionnaire de Linguistique*, *le discours* diartikan sebagai "*une unité égale ou supérieure à la phrase ; il est constitué par une suite formant un message ayant un commencement et une clôture*"⁴¹. Wacana adalah kesatuan yang tatarannya lebih tinggi atau sama dengan kalimat, terdiri atas rangkaian yang membentuk pesan, memiliki awal dan akhir. Hal tersebut hampir sama seperti yang diungkapkan oleh Carlson bahwa wacana merupakan rentangan ujaran yang berkesinambungan.

Dalam pengertian khusus menurut ilmu tata bahasa moderen, wacana diartikan sebagai *tout énoncé supérieure à la phrase, considéré du point de vue règles d'enchaînement des suites de phrases*. Yang dimaksud dengan wacana adalah



semua ujaran yang tatarannya lebih tinggi dari pada kalimat, berdasarkan sudut pandang aturan rangkaian kalimat yang saling berkaitan.⁴³Jadi, wacana adalah rentetan kalimat yang saling berkaitan dan menghubungkanproposisi yang satu dengan proposisi lainnya di dalam kesatuan makna (semantis) antarbagian di dalam suatu bangun bahasa.

Adapun karakteristik dari analisis wacana adalah sebagai berikut:

Tindakan Prinsip pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (*action*). Pemahaman ini berkonsekuensi bahwa pewacana orang yang berbicara, menulis, dan menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain dipandang memiliki tujuan: apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyangga, bereaksi, dan sebagainya.



1. Konteks Analisis wacana mempertimbangkan konteks, seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi saat pemroduksian teks. Artinya, sebagai landasan teori, konteks di sini bertugas mengamati segala hal di luar teks yang berpengaruh terhadap pemakaian bahasa. Ia mempertimbangkan proses komunikasi: dari siapa, kepada siapa, kapan, dan dalam momen apa. Titik perhatiannya adalah bagaimana antara teks dan konteks bisa dimaknai secara bersama. Namun, yang tak kalah ditekankan adalah bahwa tidak semua konteks dimasukan dalam analisis, hanya yang relevan dan memiliki pengaruh terhadap produksi wacana saja.
2. Historis. Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. Sebab, pemahaman mengenai wacana teks hanya akan diperoleh jika kita bisa menyajikan konteks historis di mana teks tersebut diciptakan. Bagaimana kondisi sosial politik, budaya, tradisi, agama, dan lainnya.
3. Kekuasaan. Dalam tataran ini, wacana (*teks*) bukan hanya bisa dipengaruhi oleh konteks, sebagaimana dalam paradigma konstruktivisme. Namun, bahkan konteks pun bisa dipengaruhi oleh kekuasaan. Hal tersebut menjadi semacam jaringan yang saling terhubung, bahwa analisis wacana berupaya untuk membongkar praktik kontrol kekuasaan yang dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok yang lain.
4. Ideologi. Beberapa teori menyebutkan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka.



Maka, wacana mencoba menganalisis bagaimana proses pengaruh dan pembangunan kesadaran terhadap khalayak objek mayoritas bahwa kenyataan yang dihadapi merupakan realitas yang nampak wajar, absah, benar, yang mana sesungguhnya itu adalah kesadaran palsu, yang dihasilkan dari kenyataan yang dimanipulasi. Pendeknya, melalui pendekatan ini, kita dituntut mengetahui ideologi pembentuk wacana.

Menurut Uyun, agama sangat mendorong pemeluknya untuk berperilaku baik dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta giat berusaha untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Konotasi agama biasanya mengacu pada kelembagaan yang bergerak dalam aspek-aspek yuridis, aturan dan hukuman. Mangunwijaya berpendapat bahwa agama menunjuk aspek formal yang berkaitan dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban.

Agama Islam bersumber dari wahyu Allah SWT, oleh sebab itu keagamaan merupakan perilaku yang bersumber langsung maupun tidak langsung dari wahyu Allah SWT. Keagamaan memiliki dimensi kognitif, yakni pemahaman terhadap agama atau ajaran agama, dimensi afektif keberagamaan yaitu sikap atau tindakan atau perilaku beragama, dan behavioral keagamaan yakni kebiasaan dan pembiasaan tindakan beragama. Teks keagamaan di sini ditempatkan sebagai sumber pengetahuan masyarakat yang melahirkan berbagai wacana di masyarakat, jadi antara wacana keagamaan dengan teks keagamaan sengaja dibedakan untuk menempatkan posisi teks sebagai referensi masyarakat, dan wacana sebagai cerminan dari pengetahuan dan sekaligus yang mendorong lahirnya perilaku masyarakat.



2.2.2. Perilaku Sosial

a. Pengertian Perilaku Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi kebersamaan dengan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Teori Psikoanalisa, menyatakan bahwa manusia memiliki pertimbangan moral sosial (*super ego*) ketika dihadapkan pada pilihan-pilihanberperilaku. Sedangkan ilmu humaniora menjelaskan realitas sosial sebagai sebuah organisme hidup dalam bentuk teori-teori sosial tentang kehidupan manusia dalam bentuk masyarakat.

Perilaku sosial adalah aktifitas fisik dan psikis seseorang terhadap orang lain atau sebaliknya dalam rangka memenuhi diri atau orang lain yang sesuai dengan tuntutan sosial.⁵¹Teori Tindakan, yaitu individu melakukan suatu tindakan berdasarkan berdasarkan pengalaman, persepsi, pemahaman dan penafsiran atas suatu objek stimulus atau situasi tertentu. Tindakan individu itu merupakan tindakan sosial yang rasional, yaitu mencapai tujuan atas sasaran dengan sarana-sarana yang paling tepat. Teori Max Weber ini dikembangkan oleh Talcott Parsons yang menyatakan bahwa aksi/*action* itu bukan perilaku/behaviour.

Aksi merupakan tindakan mekanis terhadap suatu stimulus sedangkan perilaku adalah suatu proses mental yang aktif dan kreatif. Talcott Parsons beranggapan bahwa yang utama bukanlah tindakan individu melainkan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang menuntut dan mengatur perilaku itu. Kondisi objektif disatukan dengan komitmen kolektif terhadap suatu nilai akan mengembangkan suatu bentuk tindakan sosial tertentu. Talcott Parsons juga



beranggapan bahwa tindakan individu dan kelompok itu dipengaruhi oleh system sosial, system budaya dan system kepribadian dari masing- masing individu tersebut. Talcott Parsons juga melakukan klasifikasi tentang tipe peranan dalam suatu system sosial yang disebutnya Pattern Variables, yang didalamnya berisi tentang interaksi yang avektif, berorientasi pada diri sendiri dan orientasi kelompok.

Menurut teori psikososial maupun teori perkembangan kognitif menyatakan bahwa perilaku yang ada pada diri seseorang berlandasan pada pertimbangan-pertimbangan moral kognitif. Selanjutnya, masalah aturan, norma, nilai, etika, akhlak dan estetika adalah hal-hal yang sering didengar dan selalu dihubungkan dengan konsep moral ketika seseorang akan menetapkan suatu keputusan perilakunya.

Dalam diri setiap insan terdapat dua faktor utama yang sangat menentukan kehidupannya, yaitu fisik dan ruh. Pemahaman terhadap kedua faktor ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap bagaimana seseorang berperilaku dalam realitas kehidupannya. Kedua faktor ini memiliki ruang dan dimensi yang berbeda. Jika yang pertama adalah sesuatu yang sangat mudah untuk diindra, tampak dalam bentuk perilaku, namun pada faktor yang

Seringkali orang menganggap sikap dan perilaku
itusama, padahal

dalam berbagai literatur disebutkan bahwa sikap dan perilaku itu berbeda. Para peneliti klasik memang mengutarakan bahwa sikap itu sama dengan perilaku, sebelumnya penelitian terkini yang membedakan antara sikap dan perilaku.⁵³ Pada umumnya, sikap cenderung memprediksi perilaku jika kuat dan konsisten, berdasarkan pengalaman langsung seseorang dan



secara spesifik berhubungan dengan perilaku yang diprediksikan.⁵⁴

Menurut Arthur S. Rober, “Perilaku atau tingkah laku adalah sebuah istilah yang sangat umum mencakup tindakan, aktivitas, respon, reaksi, gerakan, proses, operasi-operasi dan sebagainya. Singkatnya, respon apapun dari organisme yang bisa diukur”.⁵⁵

Menurut Zimmerman dan Schank, mengatakan bahwa:

Perilaku merupakan upaya individu untuk mengatur diri, menyeleksi dan memanfaatkan maupun menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitasnya. Individu memilih, menyusun dan menciptakan lingkungan sosial dan fisik seimbang untuk mengoptimalkan pencapaian atas aktivitas yang dilakukan.⁵⁶

Perilaku menurut Lawrence Erlbaum,

Behavior as the publicly observable activity of muscle or glands of external secretion, as manifested, for example, in movement of part of the body or the appearance of tears, sweat, saliva and so fort. Behavior is the factual basis of psychology, and we do not include in the definition anything that is not at least potentially observable.

Perilaku sebagai aktivitas otot yang dapat diamati secara umum, atau kelenjar-kelenjar pengeluaran eksternal yang diwujudkan, misalnya, di pergerakan-pergerakan bagian-bagian tubuh atau munculnya air mata, keringat, ludah dan sebagainya. Perilaku adalah dasar nyata dari psikologi dan kita tidak memasukkannya dalam pengertian apapun yang kemungkinan besar kurang dapat diamati.

Perilaku seseorang didorong oleh motivasi. Pada titik ini motivasi menjadi daya penggerak perilaku (*the energizer*) sekaligus menjadi penentu perilaku. Motivasi juga



dapat dikatakan sebagai suatu konstruk teoritis mengenai terjadinya perilaku. Perilaku juga merupakan hasil interaksi antar karakteristik kepribadian dan kondisi sosial serta kondisi fisik lingkungan.

Istilah sosial memiliki arti yang berbeda-beda sesuai pemakaiannya. Istilah sosial pada ilmu sosial merujuk pada objeknya, yaitu masyarakat. Selain itu, sosial itu berkenaan dengan perilaku interpersonal individu, atau yang berkaitan dengan proses-proses sosial. Perilaku sosial termaktub dalam hadits Rasulullah SAW yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang artinya sebagai berikut:

“Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata; Rasulullah SAW bersabda: “Setiap ruas sendi dari seluruh manusia itu wajib atasnya sedekah pada setiap hari saat matahari terbit. Engkau mendamaikan orang yang bersengketa dengan cara yang adil adalah sedekah. Menolong seseorang pada kendaraannya lalu mengangkatnya diatas kendaraannya itu atau mengangkat barang-barangnya disana, itu pun sedekah, ucapan yang baik juga sedekah, dan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergisholat juga merupakan sedekah, menyingkirkan benda-benda yang berbahaya dari jalan termasuk sedekah pula” (*Muttafaq ‘alaih*).

Hadits diatas mengisyaratkan kepada kita bahwa perbuatan sosial yang kita perbuat dihitung sebagai sedekah didalam agama. Banyak hal sepele menurut manusia, tapi pada hakikatnya mampu menjadikan manusia itu lebih dipandang sebagai manusia karena perilaku sosialnya. Perilaku sosial adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang (individu) untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat.⁶² Atau filsafat tentang pemikiran kritis rasional



tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia.

Dapat disimpulkan bahwa perilaku sosial adalah aktivitas seseorang yang dapat diamati oleh orang lain atau instrumen penelitian terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Atau dapat dikatakan bahwa perilaku sosial merupakan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan segala perbuatan yang secara langsung berhubungan atau dihubungkan dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat.

a. Bentuk-Bentuk Perilaku Sosial

Islam mengimbangi hak-hak pribadi, hak orang lain dan hak masyarakat, sehingga tidak timbul pertentangan. Semuanya harus bekerja sama dalam mengembangkan hukum-hukum Allah. Bentuk perilaku sosial yang harus dikembangkan sebagai berikut:

1) Menghormati orang lain

Tentunya dalam menjalani roda kehidupan ini banyak sekali perbedaan baik dari cara pandang seseorang, kepribadian dan lain-lain. Untuk itu diperlukan sikap menghormati orang lain agar tercipta suatu keharmonisan dalam pergaulan maupun dalam bermasyarakat. Menghormati merupakan perilaku dimana seseorang dapat menempatkan dirinya dalam suasana maupun lingkungannya ketika ia dihadapkan dengan berbagai perbedaan.

Sikap saling menghormati banyak sekali manfaatnya dalam pergaulan. Tidak hanya menjamin kenyamanan dalam bergaul, sikap menghormati ini nantinya juga akan kembali kepada kita sendiri. Barangsiapa menghormati



orang lain, sesungguhnya ia sedang menghormati dirinya sendiri.

2) Tolong-menolong

Dalam menjalani hidup ini, setiap manusia pasti pernah mengalami kemudahan sekaligus kesulitan. Kadang ada saat-saat bahagia mengisi hidup. Namun di waktu lain kesengsaraan menyapa tak terduga. Dalam keadaan sulittersebut, seseorang memerlukan uluran tangan untuk meringankan beban yang menimpa.

Mengulurkan tangan untuk membantu orang lain dalam segala jenis masalah adalah salah satu elemen sifat yang baik. Kadang suatu masalah tampak tidak terlalu besar jika dipandang dari luar sehingga tidak diperlukan bantuan material khusus selain advis bersahabat dan ucapan simpati. Orang yang baik tidak akan menahan diri untuk memberikan bantuan atau memberikan nasihat baik pada orang yang membutuhkan. Ia punya telinga yang sabar dan simpatik untuk mendengar keluhan orang lain yang punya masalah. Bahkan, saat bantuan lebih besar perlu diberikan padakasus khusus, bisa saja ada bantuan-bantuan kecil dalam kehidupan sehari-hari yang bisa ia berikan pada orang-orang sekitarnya.

Dalam hadits Nabi saw. dipaparkan:

Dari Abu Salim ra.katanya: Rasulullah saw. bersabda: Muslim dengan muslim bersaudara, tidak boleh menganiaya dan membiarkannya; siapa yang menolong hajat saudaranya, Allah akan menolongnya pula, siapa yang memberi kelapangan bagi seorang muslim satu kesusahan, Allah akan melapangkan pula satu kesusahan dari kesusahan- kesusahan hari kiamat, siapa yang melindungi seorang muslim, Allah akan melindunginya pada hari kiamat.



Tolong-menolong merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Agama Islam menyuruh umatnya untuk saling tolong-menolong dan membantu sesamanya tanpa membeda-bedakan golongan, karena dengan saling tolong-menolong dapat meringankan beban orang lain. Apabila sejak dini seseorang dibiasakan untuk hidup saling tolong-menolong, maka pada masa dewasanya akan terbiasa untuk saling tolong-menolong kepada orang lain.

B. Sopan Santun

Kesopanan disini merujuk pada kesediaan kemampuan raga atau tendensi pikiran untuk memelihara sikap, cara dan hal-hal yang dianggap layak dan baik dimata masyarakat. Melalui cara berpakaian, berperilaku, bersikap, berpenampilan, dan lain-lain. Orang yang sopan mencoba bertindak sebaik mungkin seperti yang bisa diterima dan dihargai masyarakat.

Kesopanan adalah seni. Sebagian muncul dalam bentuk opini dari hasil pendidikan. Alasannya adalah pendidikan yang menyeluruh akan secara natural merembeskan kesopanan pada orang terkait. Masalahnya, tidak semua pendidikan bersifat memadai dan menyeluruh sehingga tidak memberikan cukup ketahanan diri pada penerimanya. Selain itu, kesopanan juga tidak bisa diharapkan muncul begitu saja dari semua bentuk pendidikan.⁷⁰ Meski demikian, kesopanan adalah perilaku khas yang sebenarnya bisa kita dapatkan, kuasai dan kendalikan.



Kesopanan tidak berarti orang itu selalu harus berkata "ya" pada orang lain. Kesopanan juga tidak harus berarti seseorang harus menyenangkan pihak lain sepanjang waktu. Sebaliknya, kesopanan juga dibutuhkan sebagai alat untuk menunjukkan penolakan tanpa harus menunjukkan sikap tidak bisa menyetujui. Bumbu utama dari kesopanan adalah ketulusan dan keikhlasan dari tujuannya. Untuk benar-benar sopan, seseorang harus memiliki ketertarikan pada pihak lain serta harus siap membantu pihak lain diluar keterlibatannya dalam hal tertentu.

Sopan santun adalah suatu kebiasaan seseorang dalam berbicara, bergaul, dan berperilaku. Sopan santun hendaknya dimiliki oleh setiap anak dan peserta didik agar terhindar dari hal-hal yang negatif, seperti kerenggangan hubungan anak dengan orang tua karena anak tidak punya sopan santun. Aspek ini sangat penting karena mempengaruhi baik buruknya akhlak dan perilaku sosial seseorang. Diantara perilaku yang berkaitan erat dengan sopan santun adalah:

3) Etika Berbicara

Diantara tata krama berbicara adalah memperhatikan apa yang bicarakan oleh orang lain dan bersikap ramah. Tata krama dalam berbicara adalah bersikap ramah kepada orang yang diajak bicara pada saat dan sesudahnya termasuk etika yang baik agar mereka tidak jenuh di tengah-tengah pembicaraan.

4) Etika Bergurau

Salah satu tata krama bergurau adalah tidak berlebih-lebihan dalam bergurau dan bermain, karena



hal itu dapat melupakan orang Islam dari kewajiban yaitu beribadah kepada Allah. Banyak bergurau juga dapat mematikan hati, mewariskan sikap bermusuhan, dan membuat anak kecil bersikap berani kepada orang dewasa.

5) Peka dan peduli

Kepedulian tentunya harus bersumber dari hati yang tulus tanpa sebuah noda kepentingan. Disaat seseorang bersedia membantu, menolong dan peduli pada orang lain namun berdiri dibalik sebuah kepentingan, maka sesungguhnya dia sedang terjebak dalam kepedulian tanpa hati nurani, sebuah kepedulian tanpa keikhlasan.

Demikianlah, kepedulian seseorang kepada orang lain bahkan kehidupannya sendiri akan mengantarkannya pada derajat tertinggi dari sisi kemanusiaan dan pengakuan keberadaan. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan mengatakan bahwa wilayah berpikir seseorang akan sangat menentukan wilayah pengakuannya.⁷³ Karena segala bermula dari pikiran kita. Disaat kita berpikir hanya untuk diri sendiri, tentu hanya kita sendiri pulalah yang akan mengakui diri kita. Sebaliknya, jika yang kita pikirkan adalah orang lain dan kemaslahatan umat, maka itulah yang akan kita dapatkan.

6) Berterima kasih

Gratitude atau perasaan yang berterima kasih adalah salah satu kualitas tertinggi manusia. Suatu masyarakat yang tidak mengenal rasa terima kasih adalah masyarakat yang tidak rasional. Dalam tindakan-tindakan manusiawi yang sangat natural, seseorang harus berterima kasih pada orang lain yang memberikan sesuatu dengan



tulus dan jujur. Diharapkan, ia membalas tindak kebaikan ini dengan aksi setimpal saat orang yang memberikan sesuatu itu sedang bermasalah.

Gratitude adalah salah satu bumbu utama dalam integritas seorang manusia. Untuk mengembangkan kepribadian, ia harus belajar bagaimana mengembangkan rasa berterima kasih ini dalam dirinya sendiri, sehingga ia tidak canggung saat tiba waktunya ia harus menunjukkan rasa terima kasihnya. *Gratitude* adalah salah satu kualitas termurni manusia dan salah satu yang paling bisa diapresiasi.⁷⁴ Namun, ungkapan terima kasih itu harus tetap dalam batas-batas yang wajar dan normal inilah yang menjadi esensi perilaku social.

b. Bagaimana Perilaku Sosial Terbentuk atau Berubah-ubah

Para psikolog memandang perilaku sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana dan bisa bersifat kompleks. Hubungan antara sikap dan perilaku sangat ditentukan oleh faktor-faktor situasional. Faktor norma, keanggotaan kelompok, kebudayaan dan sejenisnya merupakan kondisi ketergantungan yang dapat mengubah hubungan sikap dan perilaku.⁷⁵

Realitas kehidupan sosial di lingkungan masyarakat melalui sistem sosial tertentu melalui proses interaksi diantara para pelaku sosial. Dengan pemahaman ini, perilaku sosial akan terbentuk secara integral. Terbentuknya sosio-kultural menurut Parsons ditentukan oleh;



- 1) Adanya budaya yang dibagi bersama
- 2) yang dilembagakan menjadi norma-norma sosial dibatinkan oleh individu-individu menjadi motivasi-motivasi

Perilaku manusia selalu berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi. Hal itu dikarenakan dinamika sosial yang tak dapat dihindari dalam kehidupan ini. Interaksi sosial juga sangat mempengaruhi perubahan perilaku sosial seseorang, orientasi motivasional dan orientasi nilai-nilai merupakan penggerak perubahan perilaku sosial.

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Sosial

Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Karena manusia memiliki akal sebagai pembeda dan merupakan kemampuan yang lebih dibanding makhluk yang lainnya. Akibat adanya kemampuan inilah manusia mengalami perkembangan dan perubahan baik dalam psikologis maupun fisiologis. Perubahan yang terjadi pada manusia akan menimbulkan perubahan pada perkembangan pada pribadi manusia atau tingkah lakunya. Pembentukan perilaku tidak dapat terjadi dengan sendirinya atau tanpa adanya proses tetapi Pembentukannya senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia, dan berkenan dengan objek tertentu.

Ada dua faktor utama yang dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang, diantaranya:



1) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri atau segala sesuatu yang telah dibawa oleh anak sejak lahir yaitu fitrah suci yang merupakan bakat bawaan. Faktor yang termasuk faktor internal, antara lain:⁷⁷

a) Kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual.

Kecerdasan emosional sangat berperan penting dalam mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Karena kecerdasan emosional sering kali disebut sebagai kecerdasan sosial yang mana dalam praktiknya selalu mempertimbangkan dengan matang segala aspek sosial yang menyertainya.

Dalam berperilaku sosial, kecerdasan emosional memerankan peran yang begitu penting. Adanya empati, memotivasi orang lain dan membina hubungan dengan orang lain merupakan aspek terpenting dalam kecerdasan emosional dan menjadi bagian yang tak dapat

dipisahkan dengan faktor yang mempengaruhi perilaku sosial seseorang.

Kecerdasan intelektual juga berperan penting dalam mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan dan pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku sosialnya.

Ilmu pengetahuan merupakan faktor esensial dalam pendidikan. Keterlibatan ilmu pengetahuan manusia dalam memecahkan berbagai permasalahan sosial sangat mempengaruhi kualitas moral dan budi



pekerjanya. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas manusia. Disisi lain bila tidak terkendali, nilai-nilai yang luhur tersebut dapat menimbulkan kerugian diri sendiri.

Human being like to believe that their behavior is based not upon emotional vagaries but upon the operation of intellectual factor that induce self-controlled activity superior in its functioning to emotionally stimulated responses. It is true that many human responses are directed by objective reasoning and judgment; but there are times in the lives of most of us when emotional urges and drives almost completely influence thinking and behavior. Too often, our behavior is so closely linked with given to more basic and far-reaching goalful activity. The emotional should influence behavior but should not become its sole determination.

Manusia percaya bahwa perilaku mereka tidak didasarkan

Pada keanehan emosional tapi setelah operasi faktor intelektual yang menginduksi aktivitas mengendalikan diri unggul dalam fungsinya untuk respons dari rangsangan emosional. Memang benar bahwa banyak tanggapan manusia diarahkan oleh penalaran dan penilaian yang obyektif, tetapi ada saat-saat dalam kehidupan sebagian besar dari kita ketika dorongan emosional dan hampir sepenuhnya mempengaruhi pemikiran dan perilaku. Terlalu sering, perilaku kita sangat terkait erat dengan yang diberikan kepada lebih mendasar dan luas aktivitas. Emosional harus mempengaruhi perilaku tetapi tidak harus menjadi tekad sendiri.



b) Motivasi

Motivasi merupakan kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup dan menimbulkan tingkah laku serta mengarahkannya menuju tujuan tertentu.⁷⁹ Dalam hal ini motivasi memerankan peranannya sebagai alasan seseorang melakukan sesuatu. Motivasi merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu. Dalam perilaku, motivasi ini penting, karena perilaku sosial seseorang merupakan perilaku termotivasi.⁸⁰

c) Agama

Agama memegang peranan penting dalam mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Seorang yang memiliki pemahaman agama yang luas, pasti juga memiliki perilaku sosial yang baik. Karena pada hakikatnya, setiap agama mengajarkan kebaikan, khususnya agama Islam, sangat mendorong umatnya untuk memiliki perilaku sosial.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang ada diluar manusia yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian dan keagamaan seseorang. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

1) Lingkungan keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama. Dalam keluarga itulah manusia menemukan kodratnya sebagai makhluk sosial. Karena dalam lingkungan itulah ia untuk pertama kali berinteraksi dengan orang lain.



Kehidupan rumah tangga penuh dengan dinamika peristiwa. Darisana anak-anak mendapatkan kecenderungan-kecenderungannya dan emosi-emosinya. Kalau iklim rumah penuh cinta, kasih sayang, ketenangandan keteguhan, maka anak akan merasa aman dan percaya diri, sehingga tampaklah pada dirinya kestabilan dan keteguhan.

Tetapi kalau suasana rumah penuh dengan pertikaian dan hubungan-hubungan yang kacau diantara anggota-anggotanya, hal itu tercermin pada perilaku anak, sehingga kekacauan dan ketidakteguhan tampak pada perilakunya. Adaptasinya dengan dirinya dan dengan anggota masyarakat menjadi buruk.

2) Lingkungan masyarakat

Masyarakat adalah wadah hidup bersama dari individu-individu yang terjalin dan terikat dalam hubungan interaksi serta interelasi sosial. Dalam hidup manusia yang bermasyarakat senantiasa terjadi persesuaian antar individu melalui proses sosialisasi ke arah hubungan yang saling mempengaruhi.

Lingkungan masyarakat juga tidak kalah penting dalam membentuk pribadi anak, karena dalam masyarakat berkembang berbagai organisasi sosial, kebudayaan, ekonomi, agama dan lain-lain. Perkembangan masyarakat itu juga mempengaruhi arah perkembangan hidup anak khususnya yang menyangkut sikap dan perilaku sosial. Corak perilaku anak atau remaja merupakan cerminan dari perilaku lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas perkembangan perilaku dan



kesadaran bersosialisasi anak sangat bergantung pada kualitas perilaku sosial warga masyarakatnya.

Perilaku sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu. Dengan demikian ada baiknya jika kita lebih cermat dalam memilih lingkungan hidup. Orang tua, guru, maupun pemimpin masyarakat hendaknya juga cermat dalam menciptakan lingkungan sosial yang baik bagi perkembangan setiap individu.

Untuk menilai orang dan perilakunya secara etis, tidak cukup bila hanya mempertimbangkan faktor-faktor rangsangan dari luar atau faktor-faktor batin saja. Untuk menilai orang dan perilakunya secara lengkap, memadai dan seimbang, tak cukuplah hanya berdasarkan faktor-faktor dalam yang mendorong hidup dan perilaku orang itu.

Secara sosiologis ataupun antropologis, perilaku seseorang tidak semuanya murni dari perilakunya sendiri, tetapi melalui silaturahmi sosial, silaturahmi primordial, atau silaturahmi intelektual. Dalam bahasa Ibnu Khaldun, ada sikap *ta'assub* di antara umat Islam yang ia sebut dengan *ashabiyah* karena adanya upaya pelestarian perilaku dari berbagai generasi atau karena generasi dahulu mewariskannya secara struktural ataupun kultural pada generasi berikutnya.

Pewarisan perilaku ini lebih sempurna karena dilengkapi oleh sistem nilai dan sistem sosial yang sesuai. Kesesuaian ini terjadi karena saling membutuhkan atau sama kepentingannya dalam orientasi nilai ataupun motivasionalnya. Ibnu Khaldun



menyebutnya sebagai jasad yang satu yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

2.2.3. Kesalehan Sosial

Kata “saleh” sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti baik. Beramal saleh berarti bekerja dengan pekerjaan yang baik. “Sosial” berarti masyarakat. Kata sosial berasal dari kata “*society*”, jadi sosial berarti bermasyarakat. Dengan demikian, kesalehan sosial berarti kebaikan dalam kerangka hidup bermasyarakat.

Di dalam KBBI, kesalehan diartikan sebagai “suatu (kepatuhan) dalam menjalankan ibadah yang tercermin pada sikap hidupnya”. Sedangkan sosial diartikan sebagai “suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dan sebagainya). Dari definisi demikian, maka dapat dikatakan bahwa kesalehan sosial adalah suatu kepatuhan atau ketaatan seseorang di dalam menjalankan ibadah di dalam agamanya masing-masing yang dicerminkan atau diaplikasikan dalam sikap hidupnya sehari-hari.

Sahal Mahfudh (1994) dalam bukunya “Nuansa Fiqh Sosial” menjelaskan bahwa ibadah itu ada dua macam, *pertama*, ibadah yang bersifat *qoshiroh*, yaitu ibadah yang manfaatnya kembali kepada pribadinya sendiri. *Kedua*, ibadah *muta’adiyah* yang bersifat sosial. Ibadah sosial ini manfaatnya menitikberatkan pada kepentingan umum (Mahfudh. 1994: 359). Sahal Mahfudh juga menjelaskan bahwa di dalam Islam dikenal ada *huquq Allah* (hak-hak Allah) dan *hukuk al-Adami* (hak-hak manusia). Hak- Hak manusia pada hakikatnya adalah kewajiban-kewajiban atas yang lain. Bila hak dan kewajiban masing-masing bisa dipenuhi, maka tentu akan timbul sikap-sikap sebagai berikut: solidaritas sosial (*al-takaful al-ijtima’i*), toleransi (*al-tasamuh*), mutualitas/ kerjasama (*al-ta’awun*), tengah-tengah (*al-l’tidal*), dan stabilitas (*al-tsabat*) (Mahfudh. 1994: 260). Tulisan Sahal Mahfudh yang menyebut lima hal tentang hak-hak manusia yang wajib dipenuhi oleh manusia



lainnya tersebut, selanjutnya menjadi landasan bagi pembatasan pengertian tentang bentuk-bentuk kesalehan sosial dalam kajian ini.

Adanya kewajiban manusia dalam memenuhi hak manusia lain, nampaknya tidak hanya dalam Islam, tapi ada dalam semua agama, sehingga dapat dikatakan sebagai nilai yang universal. Kesalehan (*godliness*) dalam ajaran Kristen adalah keadaan di mana seorang beriman dapat bersikap, berbuat, berkata-kata dan berpikir dengan penuh ketulusan, penuh pengertian, penuh pengorbanan, penuh hikmat. Kesalehan sering dikaitkan dengan perilaku seseorang yang taat menjalani imannya. Oleh karena itu seorang yang hidupnya sangat duniawi tidak akan disebut sebagai seorang yang saleh. Adalah sebuah ironi bila seorang Kristen kaya tetapi tidak dapat menunjukkan kesalehan dalam hidupnya. Selain itu seorang Kristen juga harus memiliki kesalehan di dalam hatinya melalui perilaku yang baik di masyarakat. Kedua hal itu merupakan dua muka dari sekeping uang logam atau satukata dan perbuatan.

Kesalehan (*godliness*) dalam Kristen merujuk pada istilah “Pieta” dari bahasa Latin. Pahamnya disebut “Pietisme”, yang menekankan pada kesalehan hidup. Penganut paham ini beranggapan bahwa seorang Kristen tidak cukup hanya menjalankan ajaran dan normatika yang memuaskan otak saja tetapi mengabaikan kerohanian seseorang. Tokoh-tokoh yang menganut paham ini di antaranya Philip Jacob Spener, 1615-1705 (Pendeta berkebangsaan Jerman) dan August Herman Francke, 1663-1727 (Pendeta berkebangsaan Jerman), Ludwig Graf Von Jingendrof, 1700-1750. (diunduh tanggal 26 April 2018).

Dalam ajaran Katolik, setidaknya ada dua rujukan utama terkait kesalehan sosial, yaitu (1) *Iman tanpa perbuatan pada hakekatnya adalah mati (Yakobus, 2:14-26)*; dan (2). Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. (Matius, 7: 21). Kesalehan dalam Katolik berarti bentuk tindakan



rohani yang dilakukan baik personal maupun bersama. Contoh menggunakan Salib dan Rosario. Indikasi kesalehan, adalah taat dan rajin beribadah, toleran, bersikap adil, peduli, mencintai sesama, keberpihakan kepada kaum lemah /option for the poor. Secara umum dikenal dengan prinsip subsidiaritas, yang kuat menolong yang lemah. Ini semua dalam rangka membangun “bonum commune” (kebaikan bersama).

Dalam ajaran Hindu dikenal istilah Tri Hita Karana. Istilah ini berasal dari kata “Tri” yang artinya tiga, “Hita” yang artinya kebahagiaan, dan “Karana” yang berarti penyebab. Dengan demikian Tri Hita Karana tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Konsep kosmologi *Tri Hita Karana* merupakan falsafah tangguh. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat keunikan ragam budaya dan lingkungan, di tengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Pada dasarnya hakekat ajaran Tri Hita Karana adalah menekankan tiga hubungan kehidupan antar manusia di dunia ini.

Tri Hita Karana yang mengandung 3 (tiga) hakekat penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam sekitarnya, manusia dengan sesamanya. Dengan menerapkan falsafah tersebut, diharapkan dapat menggantikan pandangan hidup modern yang lebih mengedepankan Individualisme dan materialism. Membudayakan Tri Hita Karana akan dapat mengapus pandangan yang mendorong konsumsiresme, pertikaian, dan gejolak. Contohnya dalam ajaran Hindu, kebaikan tidak hanya semata vertikal kepada Tuhan tetapi juga seimbang kepada sesama manusia dan alam lingkungan. Hal ini merupakan pengejawantahan dari konsep *Tri Hita Karana*, yang artinya tiga hal yang menyebabkan kebahagiaan, yakni Parahyangan (hubungan yang harmonis manusia dengan Sang Pencipta), Pawongan (hubungan yang harmonis manusia dengan manusia), dan Palemahan (hubungan yang harmonis manusia dengan alam lingkungannya) (Dalu. 2011: 79).



Dalam Buddhisme Mahayana, dikenal “Enam Paramita [Sad Paramita]” atau Enam Perbuatan Luhur, yang merupakan ajaran pertama yang dilakukan oleh para Bodhisattva untuk mencapai pandangan Buddha yang tidak terbatas, yaitu Cinta Kasih [maitri/metta], Kasih Sayang [karuna], Simpati [mudita] dan Keseimbangan Batin [upeksa/upekkha]. *Dana Paramita* merupakan perbuatan luhur tentang beramal, berkorban baik materi maupun non-materi. Dana paramita ini dapat digolongkan lagi atas: *Dana*, *Atidana* (yang lebih tinggi) dan *Mahatidana* (yang tertinggi).

Para penerima Dana dapat dibagi atas tiga kategori, yaitu

- (1) dana kepada teman dan keluarga;
- (2) dana kepada yang membutuhkan, yang miskin, yang menderita dan yang tidak berdaya;
- (3) dana kepada para bhikshu/bhikkhu dan para brahmana (orang suci Hindu). Dana yang diberikan adalah merupakan milik kekayaan.

Atidana adalah merupakan suatu pemberian dana di mana merupakan miliknya yang terakhir dengan tujuan pemupukan kebajikan untuk mengatasi kemelekatan terhadap rasa cinta yang dapat dianggap sebagai penghambat menuju jalan Kebuddhaan, sehingga menimbulkan kepribadian yang luhur.

Kesalehan sosial dalam perspektif Islam tidak bisa dilepaskan dari konsep dasar tujuan penciptaan manusia oleh Tuhan, dimana setiap agama dan juga ideologi non-agama(skuler), memiliki anggapan dasar tentang manusia, baik secara implisit maupun eksplisit. Anggapan dasar tentang manusia itu akan sangat mempengaruhi sistem sosial yang diciptakannya. Konsepsi tentang manusia telah banyak dikemukakan oleh para pemikir Muslim sejak masa klasik hingga modern saat ini, mulai dari yang tergolong filosof, seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Iqbal, yang sufi seperti Al-Jilli dan Ar-Raniry, yang ilmunan seperti Ibnu Khaldun, dan Sayed Husen Nasr, serta yang intelektual seperti Ali Syari'ati, Muthahari dan Fazlur Rahman.

Dalam perspektif para pemikir Muslim tersebut di atas, manusia tidak semata-mata sebagai makhluk yang harus melakukan



pengabdian (ibadah) pada Tuhan secara individual semata, namun juga memiliki tugas dan peran sosial untuk menciptakan tata sosial moral yang egalitarian dan adil, menghilangkan *fasad* atau berbagai bentuk kejahatan yang dapat membinasakan masyarakat. Manusia memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjadi wakil Tuhan di bumi dalam mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, dan kemakmuran bagisemesta alam. Di sinilah kesalehan sosial menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tujuan utama penciptaan manusia. Hal ini merupakan tugas pokok kehadiran manusia sebagai “khalifah Allah” di bumi.

Dalam perspektif ilmu pengetahuan (*science*), hingga saat ini belum ada teori yang secara khusus mendefinisikan kesalehan sosial maupun *variable–variabel* yang mempengaruhinya. Salah satu teori yang mungkin bisa menggambarkan tentang kesalehan sosial adalah teori tentang kesadaran dalam diri individu yang dalam psikologi kognitif dikenal teori tentang konsep diri. Sebagai sebuah konstruk psikologi, konsep diri didefinisikan secara berbeda oleh para ahli. Seifert dan Hoffnung (1994), misalnya, mendefinisikan konsep diri sebagai “suatu pemahaman mengenai diri atau ide tentang konsep diri”. Santrock (1996) menggunakan istilah konsep diri mengacu pada evaluasi bidang tertentu dari konsep diri. Sementara itu, Atwater (1987) menyebutkan bahwa konsep diri adalah keseluruhan gambaran diri, yang meliputi persepsi seseorang tentang tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya. Selanjutnya, Atwater mengidentifikasi konsep diri atas tiga bentuk. Pertama, *body image*, kesadaran tentang tubuhnya, yaitu bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri. Kedua, *ideal self*, yaitu bagaimana cita-cita dan harapan-harapan seseorang mengenai dirinya. Ketiga, *sosial self*, yaitu bagaimana orang lain melihat dirinya.

Seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, sebenarnya tidak hanya berbuat begitu saja, tetapi juga menyadari perbuatan yang dilakukan dan menyadari pula situasi yang ada sangkut pautnya dengan perbuatan itu. Kesadaran ini tidak hanya mengenai tingkah



laku yang sudah terjadi, tetapi juga tingkah laku yang mungkin akan terjadi. Kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata dan perbuatan-perbuatan yang mungkin akan terjadi inilah yang dinamakan sikap. Sikap adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata dalam kegiatan-kegiatan sosial. Maka sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata, yang berulang-ulang terhadap objek sosial. John H. Harvey dan William P. Smith mendefinisikan sikap sebagai kesiapan merespons secara konsisten dalam bentuk positif atau negatif terhadap objek atau situasi.

Tiap-tiap sikap mempunyai 3 aspek, yaitu: 1) Aspek Kognitif, yaitu yang berhubungan dengan gejala mengenal pikiran. Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman, dan keyakinan serta harapan-harapan individu tentang objek atau kelompok objek tertentu. 2) Aspek Afektif, yaitu berwujud proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, dan sebagainya yang ditujukan kepada objek-objek tertentu. 3) Aspek Konatif, yaitu berwujud proses tendensi/kecenderungan untuk berbuat sesuatu objek, misalnya kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri dan sebagainya.

Dalam hal ini kita akan mengambil aspek afektif saja sebagai dasar acuan dalam penelitian indeks kesalehan sosial ini, yaitu proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, dan sebagainya yang ditujukan kepada objek-objek tertentu (orang lain). Teori lain dalam psikologi yang bisa dekat dengan konsep kesalah sosial adalah konsep hasrat untuk hidup bermakna (*the will to meaning*) yang dikemukakan Viktor Frankl. Konsep "hidup bermakna" adalah motivasi sosial utama setiap manusia, konsep ini diperkuat dengan konsep "hati nurani" Frankl. Menurut Frankl hati nurani adalah semacam spiritualitas alam bawah sadar, yang sangat berbeda dengan insting-insting alam bawah sadar seperti yang dikemukakan Freud. Hati nurani bukan hanya sekedar salah satu faktor di antara bermacam-macam faktor. Dia adalah inti dari



keberadaan manusia dan merupakan sumber integritas personal kita. Dengan tegas Frankl menyatakan, “Menjadi manusia adalah menjadi bertanggung jawab secara eksistensial dan bertanggung jawab atas keberadaannya sendiri di atas bumi.” Frankl juga berpendapat bahwa binatang memiliki insting-insting yang membimbing mereka, namun manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menentukan sendiri pilihan hidup, untuk menemukan sendiri makna hidup. Masalahnya adalah “... Makna harus ditemukan dan bukan diberikan pihak lain”, menurut Frankl “Makna bagaikan tertawa”, Anda tidak bisa memaksa orang tertawa, Anda harus memberikan mereka lawakan! Hal yang sama juga berlaku pada keimanan, harapan, dan cinta, semua itu tidak bisa ditawarkan oleh status kehendak, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu ia menegaskan bahwa “... Makna kehidupan seharusnya ditemukan bukan diciptakan”. Dia memiliki realitas sendiri, tidak terikat dengan pikiran kita (Frankl dalam Boeree. 2006: 388-389). Penjelasan konsep diri dan makna hidup di atas kiranya dapat memberikan pemahaman tambahan tentang sistem kerja kesalahan sosial dalam perspektif psikologi.

Beda halnya dengan perspektif psikologi sosial, yaitu cabang ilmu psikologi yang meneliti dampak atau pengaruh sosial terhadap perilaku manusia. Ilmu tersebut menguraikan tentang kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi-situasi sosial. Eksistensi manusia dalam perspektif psikologi sosial dapat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat adanya perkembangan pada diri manusia itu. Sebagai makhluk individual, manusia mempunyai hubungan dengan dirinya sendiri, adanya dorongan untuk mengabdikan kepada dirinya sendiri. Sementara manusia sebagai makhluk sosial, maka akan berhubungan dengan sekitarnya, sehingga memungkinkan adanya dorongan pada manusia untuk mengabdikan kepada masyarakat. Dengan kata lain, manusia mempunyai dorongan untuk mengabdikan kepada dirinya sendiri (*Ichhaftigkeit*) dan dorongan untuk mengabdikan



kepada masyarakat (*Sachlichkeit*) secara bersama-sama, karena manusia merupakan kesatuan darikeduanya.

Lingkungan dalam perspektif psikologi sosial, juga dinilai sangat besar pengaruhnya terhadap keadaan individu sebagai anggota masyarakat. Manusia mempunyai motif atau dorongan sosial sehingga mengadakan hubungan atau interaksi antara manusia yang satu dengan yang lain. Di dalam interaksi sosial ada kemungkinan individu dapat menyesuaikan dengan yang lain, atau sebaliknya. Pengertian penyesuaian di sini dalam arti yang luas, yaitu bahwa individu dapat melebur diri dengan keadaan di sekitarnya, atau sebaliknya individu dapat mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan dalam diri individu, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh individu yang bersangkutan. Dalam kajian psikologi sosial, terdapat beberapa faktor psikologis sebagai pendorong terjadinya interaksi sosial, yaitu: a) Faktor Imitasi, b) Faktor Sugesti, c) Faktor Identifikasi, dan d) Faktor Simpati. Dari beberapa faktor tersebut, nampak bahwa perilaku seseorang adalah lebih berasal dari adanya stimulus dari luar individu. Sampai di sini, teori-teori psikologi sosial tersebut umumnya lebih melihat adanya pengaruh *social structure* terhadap *personality*.

Dengan demikian, minimal terdapat dua pandangan (teori) psikologi tentang variabel apa yang mempengaruhi sikap dan perilaku individu, yaitu teori psikologi sosial dan teori psikologi kognitif, khususnya tentang konsep diri. Pengertian yang dipakai dalam kajian kesalihan sosial kali ini tidak menggunakan teori-teori psikologi sosial yang umumnya lebih melihat adanya pengaruh terhadap *personality* yang dipengaruhi *social structure*. Kajian ini menggunakan teori sebagaimana dalam teori konsep diri karena adanya kesesuaian dengan pandangan para pemikir Islam bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kesadaran sebagai 'khalifah' Tuhan. Sehingga kesadaran dan konsep diri inilah yang dianggap menentukan perbuatan seseorang yang berulang-ulang terhadap objek sosial bukan karena adanya pengaruh *social structure*.



Dari uraian panjang di atas, dapat diidentifikasi beberapa hal yang bisa dimasukkan dalam pengertian tentang perspektif kesalehan sosial, yaitu: **Pertama**, kesalehan sosial adalah sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (*salih*) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat. Sikap kesalehan sosial bisa meliputi: (a) solidaritas sosial (*al-takaful al-ijtima'i*), (b) toleransi (*al-tasamuh*), (c) mutualitas/kerjasama (*al-ta'awun*), (d) tengah-tengah (*al-l'tidal*), dan (e) stabilitas (*al-tsabat*). **Kedua**, kesalehan sosial dalam perspektif agama-agama adalah berangkat dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan di bumi dan sekaligus menjalankan tugas sebagai 'wakil Tuhan' (khalifah) di bumi, **Ketiga**, dalam psikologi kognitif dikenal adanya bentuk kesadaran dalam diri individu yaitu teori tentang konsep diri yang berasal dari dimensi pengetahuan, dimensi pengharapan, dan dimensi penilaian. Konsep diri inilah yang menentukan perbuatan seseorang, yang berulang-ulang terhadap objek sosial. **Keempat**, kesalehan sosial sebagai *attitude* atau sikap mempunyai tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Sikap bisa berubah dalam hal intensitasnya, namun biasanya konsisten sepanjang waktu dalam situasi yang sama, dan komposisinya hampir selalu kompleks. **Kelima**, kesalehan sosial merupakan salah satu bagian dari capaian seseorang dalam memberikan "pemaknaan" terhadap hidupnya di bumi (*will to meaning*).

2.2.4. Penelitian Terdahulu

Meski hingga saat ini belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji kesalehan sosial sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian di atas, namun dari beberapa literatur terdapat beberapa kajian terdahulu tentang pengaruh agama bagi kehidupan sosial. Penelitian tentang kesalehan sebelumnya telah dilakukan oleh Cornell University dengan judul *Measuring Piety in Indonesia 2016*, kemudian penelitian Saiful Mujani, Thomas B. Pepinsky, William Liddle tentang *Piety and Public Opinion: Understanding Indonesia Islam*, Oxford 2018. Kedua tulisan tersebut menempatkan kesalehan keagamaan terkoneksi



dengan gerakan politik bernuansa keagamaan. Penelitian tentang kesalehan sosial di lingkungan Kementerian Agama sejatinya juga telah dilakukan pada tahun 2014 dengan judul Indeks Kesalehan Sosial, paradigma, epistemologi sampai dengan teknik pengukuran dirancang untuk kalangan penganut agama Islam. Pada tahun 2018 dikembangkan untuk mengukur pemeluk enam agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu dengan perbaikan konsep dan metode penelitian dengan memperoleh skor indeks 76

Beberapa peneliti berhasil mengungkapkan adanya pengaruh agama dalam menumbuhkan etos kerja dan perkembangan ekonomi, antara lain dilakukan oleh Weber, Geertz, dan Bellah. Max Weber dalam bukunya "*Protestan Ethic and The Spirit of Capitalism*" menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi Belanda yang berjalan dengan cepat sekali pada setengah bagian pertama abad ke-17 merupakan hasil perkembangan aliran Calvinis Belanda (Weber. 1956: 43). Weber mengatakan bahwa Calvinisme, terutama "sekte" puritanisme, melihat kerja sebagai *Beruf* atau panggilan, kerja bukanlah sebagai pemenuhan keperluan, tetapi suatu tugas suci (Weber. 1956: 20).

Geertz dalam penelitiannya di Indonesia yaitu di Jawa (Modjokuto) dan di Bali (Tabanan) menunjukkan bahwa perubahan sosial ekonomi kelompok usaha pribumi sesungguhnya sudah berkembang di masa kolonial, tetapi karena kekuatan modal kaum penjajah dan hak monopoli yang diberikan kepada sekutu (mitra usaha) kolonial, maka masyarakat pribumi dengan modal kecil dan akses yang terbatas dengan sendirinya terhenti. Namun demikian golongan *entrepreneurs* pribumi sekalipun dengan pola yang sporadis, berkembang tahap demi tahap (secara gradual) yang pada akhirnya dapat mendorong perubahan drastis dalam masyarakat. Mereka mampu membuat pranata-pranata perekonomian tradisional dipadukan dengan ciri-ciri khas ekonomi perusahaan modern yang matang (Geertz dalam Abdullah. 1982: 186).

Sementara itu Robert N. Bellah dalam studinya di Jepang menemukan bahwa *spirit Religi Tokugawa* merupakan kekuatan bagi



orang Jepang untuk mencapai modernisasi yang telah memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi Jepang yang mengagumkan. Menurut Bellah, spirit Religi Tokugawa menjadi kekuatan tersendiri bagi orang Jepang sejak awal dan dilanjutkan sampai dengan Jepang modern untuk mencapai modernisasi. "Agama Tokugawa" mengandung beberapa elemen yang mendorong munculnya sebuah ideologi yang sanggup menimbulkan perubahan ekonomi yang besar yang disponsori pemerintahannya (Wertheim dalam Abdullah. 1982: 97-100).

Selain penelitian tentang hubungan agama dan etos kerja atau ekonomi, penelitian lainnya adalah tentang adanya pengaruh agama dalam pergerakan politik. Penelitian ini dilakukan antara lain oleh Ismuha yang meneliti peran ulama Aceh yang memainkan peran penting dalam politik. Kekosongan pemimpin formal Aceh sebagai akibat dikalahkannya Sultan dan direbutnya kraton oleh Belanda dalam agresinya, para ulama yang sesungguhnya berada di luar struktur kekuasaan, tampil ke depan sebagai pemimpin rakyat. Para ulama berjasa dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, mereka sangat berpengaruh di masyarakat. Yang membuat mereka berpengaruh adalah ketaatannya pada hukum agama, bukan hanya karena pengetahuannya (Ismuha dalam Abdullah, 1996).

Penelitian Kesalihan Sosial secara khusus juga pernah dilakukan oleh Mohammad Sobary dengan judul Kesalehan Sosial (*Influence of Islamic piety on the rural economic behavior in Suralaya, Jawa Barat Province*. 2007, Yogyakarta: LKiS) Penelitian ini merupakan tesis Sobary di Universitas Monash, Australia. Sobary dalam tesisnya ini, mengungkap peranan Agama dalam mewujudkan hubungan yang positif antara "Kesalehan" dan "Tingkah Laku Ekonomi" di Desa Suralaya. Oleh karena itu, penelitian etnografis yang dilakukannya berupaya untuk menemukan beberapa konsep kunci yang sangat penting dalam menemukan peranan agama dalam masyarakat



Suralaya. Sobary tertarik memilih Desa Suralaya sebagai lokasi penelitian karena desa tersebut dapat menjadi potret efek modernisasi yang digenjot sejak era Orde Baru. Desa ini terhimpit di antara dua kota besar, yaitu Jakarta dan Tangerang. Akibatnya, banyak lahan di desa tersebut dibeli oleh orang kota untuk dijadikan perumahan, lahan pertanian semakin menyempit dan bergesernya sumber penghasilan penduduk dari bidang pertanian ke sektor perdagangan dan jasa. Dalam penelitiannya, Sobary menemukan Guntur, seorang informan yang berpendapat bahwa dalam Islam kesalehan itu ada dua: kesalehan individu dan kesalehan sosial. Kesalehan individu terlihat dari keseriusannya dalam menjalankan ibadah keagamaan yang bersifat individual, seperti; shalat, dzikir, wiridan, puasa dan haji. Sementara kesalehan sosial adalah semua jenis kebajikan yang ditujukan kepada manusia lainya. Misalnya bekerja untuk memperoleh nafkah bagi keluarga. Informanlainnya, Haji Saptir menegaskan bahwa kesalehan adalah orang yang menyeimbangkan *ushalli* (shalat) dengan usaha. Sobary juga mengaitkan Suralaya sebagai komunitas Betawi yang patuh terhadap ajaran Islam, demikian pula keterkaitan antara sektor perdagangan dengan ajaran Islam yang dianut oleh warga Suralaya. Ada satu cacatan yang dikemukakan Sobary ihwal perbedaan warga Suralaya dengan penelitian Weber di Barat. Letak perbedaan yang signifikan adalah kegagalan warga Suralaya membentuk korporasi besar, mereka hanya puas menjadi pengusaha kecil. Sementara spirit Protestan di Barat menjadi ideologi besar yang melahirkan pengusaha kelas elite yang, bahkan, menguasai struktur ekonomi dunia.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian dan Metode

Penelitian tentang kesalahan sosial yang disusun dalam angka indeks adalah penelitian deterministik kuantitatif, yaitu mengukur sebuah konsep sampai dengan indikator pada satuan angka yang bisa memberikan informasi. Angka yang diperoleh merupakan informasi tentang tingkat kesalahan pada sejumlah responden sebagai representasi dari kelompok besarnya sebagai pemeluk agama.

3.1.1. Metode dan Teknik

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survei, dengan teknik kluster (clustered random sampling) disebarkan secara acak pada seluruh kecamatan di Kabupaten Lahat. Metode survei sendiri adalah cara memperoleh informasi dan data yang dirancang untuk memahami status atau gejala tertentu, tujuannya adalah untuk menggambarkan variabel atau kondisi dan situasi apa tindakan kesalahan sosial dari pemeluk itu terjadi.

3.1.2. Alat Pengumpul dan Pengolah Data

Data penelitian kuantitatif probabilistik adalah jenis data nomotetik, angka diperoleh dari jawaban responden yang dikumpulkan menggunakan angket langsung dibacakan pada pemeluk agama terpilih. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan excel dan SPSS 20, disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan narasi.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah masyarakat pemeluk agama yang merupakan jemaah yang aktif mengikuti kegiatan rumah ibadat pada setiap agama, baik aktif dalam mengikuti pembinaan rohani maupun



pelaksanaan kegiatan ibadah yang bersifat ritual rutin atau berkala. Pemilihan kriteria ini dilakukan sebagai gambaran pendahuluan atas kesalehan sosial di Indonesia, artinya jika jemaah rumah ibadat menghasilkan nilai indeks kesalehan sosial yang tinggi dapat diasosiasikan bahwa ibadah ritual dan pemahaman keagamaan memang berkontribusi dalam membentuk kesalehan sosial yang baik di Indonesia. Di samping itu, pemilihan jemaah rumah ibadat adalah untuk memastikan bahwa kesalehan sosial yang dilakukan adalah bersumber dari nilai-nilai ajaran agama sehingga dapat membedakannya dengan kesalehan sosial yang dipengaruhi oleh ideologi atau ajaran (isme) lainnya.

Oleh karena riset Kesalehan sosial ini diketahui memiliki total populasi atau memiliki *sampling frame* di seluruh Indonesia, terkonsentrasi di berbagai kota dan kabupaten, sehingga diperlukan fungsi peluang. Istilah fungsi peluang sebagai upaya menarik sejumlah representasi pemeluk. Pengambilan sampel sendiri dengan teknik "*Clustered Random Sampling*" yaitu teknik pengambilan sampel peluang secara acak, yang dilakukan pada kondisi populasi yg homogen, dimana kondisi populasi membentuk provinsi-provinsi yg kondisinya homogen di dalam provinsi, tetapi heterogen antar provinsi. Maka, penghitungan sampel parameter, karena riset Kesalehan sosial ini menghasilkan skor Kesalehan Sosial yang kemudian akan menjadi landasan pengkategorian KS di Indonesia, maka parameter yang diteliti dalam penelitian ini adalah parameter proporsi

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat Kabupaten Lahat yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah berdasarkan dokumen kependudukan. Jumlah sampel responden untuk survey ini ditetapkan 382 responden. Hal ini mengacu pada sampel *crije* dan Morgan yang juga dipakai dalam penetapan jumlah sampel untuk Survey Layanan Kepuasan Masyarakat sesuai Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017, dengan tabel berikut:



Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

3.2.1. Metode Pengambilan Sampel

Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah *Multistage Random Sampling*, yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahap 1: Menentukan Jumlah Sampel per Kecamatan

Jumlah sampel per Kecamatan proporsional berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Lahat .

TAHAP 2: Menentukan jumlah kelurahan/desa terpilih.



Kelurahan/desa terpilih diambil secara acak dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat .

Prinsip penentuan kelurahan/desa: setiap Kelurahan mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel.

Jumlah Kelurahan terpilih pada masing-masing Kecamatan bergantung pada jumlah sampel pada masing-masing Kecamatan

TAHAP 3: Menentukan SSU (*Secondary Sampling Unit*) yaitu RT (Rukun Tetangga) terpilih. Dalam 1 Kelurahan/Desa diambil maksimal 2 RT (Rukun Tetangga). RT terpilih diambil secara acak dari seluruh RT pada masing-masing desa atau kelurahan.

TAHAP 4: Menentukan PSU (*Primary Sampling Unit*) yaitu Rumah Tangga Terpilih diambil secara acak dari rumah tangga yang ada pada masing- (RT) terpilih. Interval antar rumah tangga minimal 3 (tiga) rumah

TAHAP 5: Menentukan PSU berdasarkan beberapa kriteria tambahan seperti:

- Berdasarkan gender responden
- Berdasarkan usia responden
- Berdasarkan pekerjaan responden
- Berdasarkan strata pendidikan responden
- Berdasarkan pemanfaatan responden terhadap layanan publik yang diterima



3.3. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Maret 2023 dengan lokasi penelitian di Kabupaten Lahat.

3.4. Variabel

Pada kegiatan survey ini menggunakan variabel yang disesuaikan dengan program unggulan pemerintah kabupaten yang telah ditetapkan. Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan kegiatan:

DIMENSI	VARIABEL	N O	ASPEK
Nilai Solidaritas	Kepedulian Sosial	1	Menjalin silaturahmi (saling mengunjungi, berkomunikasi)
		2	Memberi bantuan saat ada yang mengalami musibah
		3	Menyapa saat berjumpa
		4	Mengikuti bakti sosial
		5	Bersedekah/berderma
		6	Memberi hadiah
		7	Menghibahkan/ memberikan harta untuk kepentingan umum
Nilai Toleransi	Relasi Antar Manusia	1	Memerlakukan sama, orang lain yang berbeda (suku dan ras)
		2	Tidak Mencela fisik karena perbedaan suku dan ras
		3	Menghargai kebudayaan suku lain
		4	Memelihara tradisi yang baik (tradisi yang bermanfaat bagi orang banyak)
		5	Memanfaatkan tradisi dan/atau kearifan lokal untuk kemajuan bersama
	Etika dan Budi Pekerti	1	Berlaku sopan menghormati sesama pengguna jalan
		2	Bertutur kata yang baik
		3	Tidak Meludah sembarangan
		4	Menghargai pendapat orang lain dalam pertemuan sosial dan/atau keagamaan
		5	Menjadi penengah jika terjadi pertentangan



DIMENSI	VARIABEL	N O	ASPEK	
		6	Memberikan ketenangan dalam lingkungan tinggal	
		7	Dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman untuk mengatasi masalah di lingkungan	
		8	Berhati-hati dalam bertindak (tidak sembarangan)	
		9	Bersikap Jujur	
		10	Bersikap Terbuka (berterus terang)	
		11	Menjaga rahasia	
		12	Memiliki kesetiaan (setia kawan, setia terhadap kesepakatan)	
		13	Menghargai waktu	
		14	Memiliki komitmen (bertanggung jawab)	
		15	Bersikap adil, sesuai porsinya dalam menyelesaikan masalah di lingkungan tinggal	
Nilai Stabilitas	Melestarikan	1	Menjaga kebersihan lingkungan	
	Lingkungan	2	Menggunakan listrik dan/atau air sesuai kebutuhan	
		3	Membuang sampah pada tempatnya	
		4	Menanam kembali (penghijauan) pohon dan/atau tumbuhan	
		5	Menggunakan kembali barang dari plastik (reuse)	
		6	Mengurangi penggunaan plastik (reduce)	
		7	Terlibat dalam kegiatan daur ulang sampah plastik (recycle)	
	Patuh pada Peraturan Negara		1	Patuh Peraturan lalu lintas
			2	Membayar pajak
			3	Tidak menyogok pada urusan layanan publik (denda lalu lintas, pembuatan KTP/Paspor, layanan nikah)
			4	Patuh Peraturan Desa/kelurahan
			5	Patuh Peraturan Daerah (kabupaten dan Provinsi)
			6	Patuh Peraturan perundangan yang berlaku
			7	Patuh Pancasila dan UUD



DIMENSI	VARIABEL	N O	ASPEK
		8	Setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia

**Ke
t**

- 0** Tidak Tahu/ Tidak Menjawab
- 1** Sangat Jelek/Sangat Tidak Setuju
- 2** Jelek/Tidak Setuju
- 3** Cukup baik / cukup setujua
- 4** Baik/ Setuju
- 5** Sangat Baik/ Sangat Setuju

3.1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode:

- a. Studi Pustaka, dilakukan untuk mendapatkan data terpercaya dari jurnal maupun penerbitan resmi maupun dari dinas-dinas terkait.
- b. Observasi, dilakukan untuk mendapatkan informasi dan fakta primer/langsung tentang kondisi fisik wilayah yang merupakan hasil pengamatan lapangan secara visual.
- c. Wawancara, dilakukan kepada seluruh responden yang terjaring dalam survey.
- d. Survei tertutup

3.5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber secara langsung. Dalam hal ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat yang pernah memanfaatkan pelayanan publik pada pelayanan Perizinan di Kabupaten Lahat berdasarkan



kuesioner yang telah disiapkan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung. Dalam penelitian ini data sekunder meliputi data demografi kependudukan dari BPS dan referensi lain yang relevan.

3.6. Pengolahan Data dan Analisis Survey

Tahapan selanjutnya dari pekerjaan ini adalah pengolahan data dan analisis survey. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut:



1. Proses Pemeriksaan Data (*Cleansing*) Pada tahapan ini dilakukan proses pemeriksaan data hasil survey. Pemeriksaan data dilakukan dengan beberapa langkah , antara lain :
 - a) Memeriksa kuesioner yang masuk apakah layak untuk diproses atau didrop, bilamana jawaban tidak lengkap;
 - b) Memberi nomor pada kuesioner sebagai kendali;
 - c) Memeriksa kelengkapan kejelasan jawaban;
 - d) Memeriksa konsistensi antar jawaban dan relevansinya.
2. Proses Pengkodean Data Tahapan selanjutnya adalah memberi kode data. Sebagai bagian dari penelitian kuantitatif, data yang terkumpul dalam penelitian survey biasanya berupa angka-angka yang merupakan nilai dari variabel-variabel tertentu. Untuk kuesioner dengan sistem tertutup maka kode-kode jawaban harus dibuatkan. Pemberian kode ini dengan mengacu prinsip-prinsip pengukuran atau skala pengukuran,
3. Proses Tabulasi Data Proses tabulasi data adalah proses data entry atau memasukkan seluruh data kuesioner yang terdiri Bagian A (Data Responden), bagian B (Closed Question) dan bagian C (Open Question)



ke dalam soft copy sesuai aplikasi yang digunakan. Dalam pengolahan data, menggunakan aplikasi sederhana yakni Program Microsoft Excell dari Microsoft Office. Setelah data dimasukkan, selanjutnya adalah membersihkan data dari salah ketik atau salah mengkode data. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memastikan kebenaran data yang kita entry, antara lain :

- a) Memproses data untuk diperiksa ulang, misalnya dengan pilihan statistik deskriptif seperti frekuensi, mean, modus dan median;
 - b) Memeriksa secara teliti apakah ada penyimpangan-penyimpangan;
 - c. Mencocokkan kembali data yang telah di entry dengan data yang ada pada kuesioner.
4. Proses Analisis Data Analisa Data dilakukan dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 Tahun 2014. Selain itu juga ditambahkan dengan melakukan GAP analisis secara statistik terhadap tingkat mutu pelayanan dibandingkan dengan harapan masyarakat dengan cara memetakan unsur-unsur yang diukur dalam kuadran mutu pelayanan dengan teori *service quality*. Data-data yang didapatkan dari hasil survey tersebut kemudian di-entry pada kertas kerja untuk kemudian dilakukan rekapitulasi/ klasifikasi, analisa serta evaluasi sehingga didapatkan :
- a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Yaitu nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang telah diberikan.
 - b) Deskripsi Kepuasan maupun Ketidakpuasan
 - c) Diagram Importance dan Performance Analysis (IPA Diagram)

Merupakan metode untuk mengetahui dimana tingkat harapan terhadap pelayanan yang diterima. Dari berbagai persepsi tingkat kepentingan, kita dapat merumuskan tingkat kepentingan yang paling dominan. Diharapkan kita juga dapat menangkap persepsi yang lebih jelas mengenai pentingnya unsur tertentu.



BAB VI GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Lahat menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

4.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Pada aspek geografi Kabupaten Lahat diperoleh gambaran karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan pada aspek demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Lahat.

4.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

4.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Lahat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821). Kabupaten Lahat yang dikenal dengan sebutan Bumi Seganti Setungguan terdiri dari 24 kecamatan, 17 kelurahan, dan 360 desa, yang memiliki wilayah seluas 4.361,83 km². dengan batas-batas wilayah administrasinya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Rawas
- Sebelah Selatan : Kota Pagar Alam dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
- Sebelah Barat : Kabupaten Empat Lawang
- Sebelah Timur : Kabupaten Muara Enim

Secara rinci luas wilayah dan jumlah desa menurut kecamatan di Kabupaten Lahat dapat dilihat pada tabel 4.1.



Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Lahat

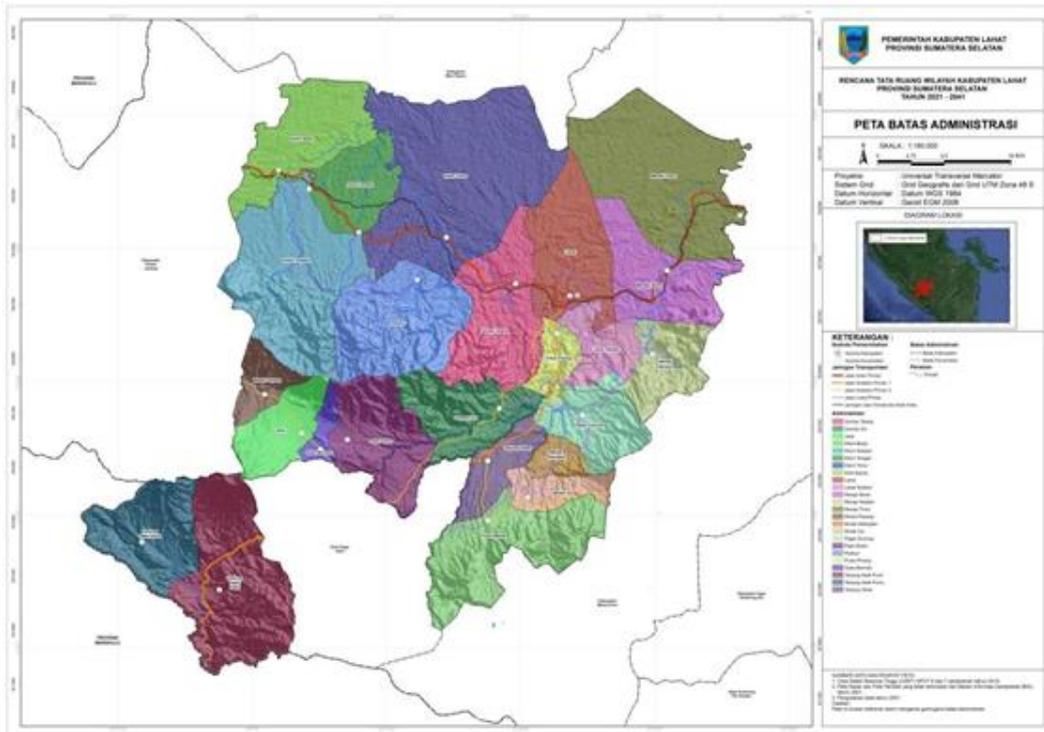
No	Kecamatan	Luas (Ha)	%	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Jarak dari Ibukota Kabupaten
1	Tanjung Sakti PUMI	31.708,6	7,30	Pajar Bulan	18	66,35
2	Tanjung Sakti PUMU	17.815,4	4,10	Simpang III PUMU	14	66,97
3	Kota Agung	24.347,5	5,60	Kota Agung	22	32,59
4	Mulak Ulu	6.375,95	1,47	Muara Tiga	16	27,87
5	Tanjung Tebat	8.476,96	1,95	Tanjung Tebat	14	22,55
6	Mulak Sebingkai	3.885,44	0,89	Keban Agung	10	18,53
7	Pulau Pinang	5.299,55	1,22	Jati	10	3,
8	Pagar Gunung	13.485,5	3,10	Karang Agung	20	15,86
9	Gumay Ulu	16.067,6	3,70	Tinggi Hari	10	17,13
10	Jarai	11.301,8	2,60	Pasar Jarai	21	41,53
11	Pajar Bulan	19.258,3	4,43	Sumur	20	36,60
12	Muara Payang	6.283,68	1,45	Lawang Agung	7	44,87
13	Suka Merindu	3.069,53	0,71	Suka Merindu	10	40,84
14	Kikim Barat	20.275,8	4,67	Saung Naga	19	46,14
15	Kikim Timur	52.507,2	12,0	Bungamas	32	20,57
16	Kikim Selatan	35.774,3	8,23	Pagar Jati	18	31,61
17	Kikim Tengah	12.635,5	2,91	Tanjung Aur	9	32,7
18	Lahat	20.737,5	4,77	Lahat	29	0
19	Gumay Talang	22.970,4	5,29	Sukarame	15	7,67
20	Lahat Selatan	8.672,12	2,00	Tanjung Payang	10	2,11
21	PSEKSU	25.391,4	5,84	Lubuk Mabar	11	21,69
22	Merapi Barat	18.754,2	4,32	Merapi	19	16,01
23	Merapi Timur	37.988,9	8,74	Lebuay	14	28,02
24	Merapi Selatan	11.404,2	2,62	Sukamerindu	9	14,50
Kabupaten		434.487,	100	Lahat	377	-

Sumber: - BPS, Kabupaten Lahat Dalam Angka Tahun 2021

Letak dan Kondisi Geografis

Letak geografis berdasarkan Peta Rupabumi skala 1 : 50.000 pada garis terluar Kabupaten Lahat terletak antara 3°29'42,000"- 4°16'1,200" Lintang Selatan dan 102°54'54,000"-103°46'22,800" Bujur Timur. Dengan letak yang sangat strategis tersebut menjadikan Kabupaten Lahat sebagai kawasan yang cepat tumbuh dan merupakan jalur transportasi nasional Lintas Tengah Sumatera (Trans Jakarta – Lampung – Baturaja – Muara Enim – Lahat – Tebing Tinggi – Lubuk Linggau – Bengkulu atau Padang). Secara

rinci batas administrasi Kabupaten Lahat dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Lahat

4.1.1.2 Topografi

Topografi Kabupaten Lahat bervariasi mulai dari dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Ketinggian wilayah Kabupaten Lahat dari atas permukaan laut bervariasi mulai dari 25 meter hingga 1.000 meter. Kecamatan yang paling rendah dari permukaan laut adalah Kecamatan Lahat, Merapi Barat, dan Merapi Timur dengan ketinggian 25 meter sampai 100 meter. Sedangkan kecamatan dengan dataran tinggi dari permukaan laut meliputi Kecamatan Kota Agung, Tanjung Sakti Pumi, Tanjung Sakti Pumu, Jarai, Pajar Bulan, dan Muara Payang. Secara rinci ketinggian wilayah Kabupaten Lahat dari atas permukaan laut menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.2.



Tabel 4.2, Tinggi Wilayah dari Permukaan Laut, dan Jarak ke Ibu Kota Menurut Kecamatan

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Tinggi Wilayah (mdpl) <i>Altitude (m a.s.l)</i>	Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota <i>Distance to the Capital of Regency/ Municipality</i>
(1)	(2)	(3)
Tanjung Sakti Pumi	500-1000	66,35
Tanjung Sakti Pumu	500-1000	66,97
Kota Agung	500-1000	32,59
Mulak Ulu	100-1000	27,87
Tanjung Tebat	100-1000	22,55
Mulak Sebingkai	-	18,53
Pulau Pinang	100-500	3,37
Pagar Gunung	100-500	15,86
Gumay Ulu	100-500	17,13
Jarai	500-1000	41,53
Pajar Bulan	500-1000	36,60
Muara Payang	500-1000	44,87
Sukamerindu	500-1000	40,84
Kikim Barat	100-500	46,14
Kikim Timur	100-500	20,57
Kikim Selatan	100-500	31,61
Kikim Tengah	100-500	32,74
Lahat	25-100	-
Gumay Talang	100-500	7,67
Lahat Selatan	-	2,11
Pseksu	100-500	21,69
Merapi Barat	25-100	16,01
Merapi Timur	25-100	28,02
Merapi Selatan	25-100	14,50
Kabupaten Lahat <i>Lahat Regency</i>	-	-

Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2022

4.1.1.3 Geologi

Kabupaten Lahat termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berdasarkan tatanan tektoniknya menempati cekungan belakang busur Paleogen yang dikenal sebagai Cekungan Sumatera Selatan di bagian timur, dan mendala busur vulkanik yang membentang secara regional di sepanjang



Bukit Barisan bagian barat. Jenis struktur yang umum dijumpai di cekungan Sumatera Selatan terdiri dari lipatan, sesar dan kekar. Pembentukan struktur lipatan, sesar dan kekar di cekungan Sumatera Selatan memberikan implikasi yang signifikan terhadap akumulasi sumber daya minyak bumi, gas alam, batubara dan panas bumi. Kumpulan struktur lipatan yang membentuk *antiklinorium* telah banyak dijumpai berperan sebagai perangkap hidrokarbon.

Selain struktur geologi, jenis litologi penyusun stratigrafi cekungan Sumatera Selatan telah pula mengontrol penyebaran sumberdaya energi fosil non fosil di wilayah ini. Batuan yang mendasari Cekungan Sumatera Selatan merupakan kompleks batuan berumur pra-tercier, yang terdiri dari batu gamping, andesit, granodiorit, pilit, kuarsit dan granit. Secara geologi daerah Kabupaten Lahat tersusun atas formasi Lahat terdiri dari endapan tufa, aglomerat, breksi tufan, andesit, serpih, batu lanau, batu pasir dan batubara.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Lahat meliputi jenis tanah aluvial, regosol, andosol, latosol, asosiasi litosol dan latosol serta kompleks tanah podsolik dan litosol yang tersebar di setiap kecamatan. Jenis tanah aluvial sangat cocok untuk tanaman sawah, kebun campuran, tegalan, alang-alang/semak belukar. Sedangkan jenis tanah andosol dan latosol cocok digunakan untuk tanaman padi, jagung, kopi, karet, coklat, tanaman buah-buahan dan umbi-umbian.

4.1.1.4 Hidrologi

Secara umum Kabupaten Lahat memiliki sumber daya air berupa sumber daya air permukaan dan sumber daya air tanah. Sumber daya air permukaan adalah sumber air yang berada di atas permukaan tanah yang memenuhi persyaratan layak untuk dikonsumsi seperti sungai, danau dan tadah hujan. Beberapa sungai besar yang ada di wilayah Kabupaten Lahat meliputi Sungai Lematang, Sungai Air Mulak, Sungai Endikat, Sungai Kikim, Sungai Lingsing, Sungai Pangi, Sungai Serelo, Sungai Air Keruh, Sungai Selangis dan Sungai Manna. Masyarakat yang tinggal sepanjang pinggiran



sungai memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap keberadaan sungai tersebut dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari seperti untuk mandi, mencuci dan keperluan rumah tangga lainnya. Sebagian masyarakat menggunakan air sungai sebagai sumber air bersih untuk dijadikan air minum. Pada saat musim kemarau, jumlah masyarakat yang memanfaatkan air sungai menjadi meningkat.

Sumber daya air tanah adalah sumber daya air yang terdapat di dalam tanah. Air tanah adalah sumber air yang berada di bawah permukaan tanah yang dapat dipergunakan baik untuk keperluan sehari-hari, irigasi ataupun industri tentu saja jika memenuhi persyaratan kualitas dan debitnya memenuhi kebutuhan.

4.1.1.5 Klimatologi

Kabupaten Lahat memiliki iklim tropis atau 2 (dua) musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2017, rata-rata jumlah curah hujan dan hari hujan setiap bulan di Kabupaten Lahat yaitu 93.36 per hari dan 266.29 mm. Jumlah curah hujan rata-rata paling sedikit terjadi di Kecamatan Merapi Timur sebanyak 183 per hari dan 69 mm, sedangkan rata-rata jumlah curah hujan yang paling banyak terjadi di Kecamatan Pulau Pinang sebanyak 396 per hari dan 82 mm.

Tabel 4.3 Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan Kabupaten Lahat

No	Kecamatan	Total		Rata-Rata	
		HH	CH	HH	CH
1	Tanjung Sakti Pumi	237	3.290	119	274
2	Tanjung Sakti Pumu	250	4.583	125	382
3	Kota Agung	188	3.331	94	278
4	Mulak Ulu	191	3.153	96	263



No	Kecamatan	Total		Rata-Rata	
		HH	CH	HH	CH
5	Tanjung Tebat	155	2.958	78	247
6	Pulau Pinang	164	4.747	82	396
7	Pagar Gunung	218	3.875	109	323
8	Gumay Ulu	103	2.782	52	232
9	Jarai	207	3.340	104	278
10	Pajar Bulan	274	3.341	137	278
11	Muara Payang	205	3.127	103	261
12	Sukamerindu	-	-	-	-
13	Kikim Barat	178	2.999	89	250
14	Kikim Timur	188	3.718	94	310
15	Kikim Selatan	242	2.904	121	242
16	Kikim Tengah	172	3.226	86	269
17	Lahat	205	3.770	103	314
18	Gumay Talang	206	4.200	103	350
19	Pseksu	236	3.508	118	292
20	Merapi Barat	164	2.581	82	215
21	Merapi Timur	138	2.193	69	183
22	Merapi Selatan	187	2.674	94	223
23	Lahat Selatan	-	-	-	-
24	Mulak Sebingkai	-	-	-	-
	Jumlah	70300	4.108	5.858	2.054



No	Kecamatan	Total		Rata-Rata	
		HH	CH	HH	CH
	Rata-Rata	3.195,45	186,73	266,29	93,36

Keterangan:

- Data masih tergabung dengan kecamatan induk, CH = Curah Hujan, HH = Hari Hujan

4.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Lahat berdasarkan fungsinya dibagi menjadi lahan pertanian dan bukan lahan pertanian. Penggunaan lahan di Kabupaten Lahat secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Penggunaan Lahan di Kabupaten Lahat

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas	
		(Km ²)	%
1	Lahan Pertanian		
	a. Irigasi	159,42	3,65
	b. Tadah Hujan	15,70	0,36
	c. Rawa Pasang Surut	-	-
	d. Rawa Lebak	-	-
2	Bukan Lahan Pertanian		
	a. Bangunan Permukiman	464,56	10,65
	b. Tegall	202,03	4,63
	c. Ladang	36,68	0,84
	d. Perkebunan	1.567,69	35,94



No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas	
		(Km ²)	%
	e. Hutan Rakyat	544,10	12,47
	f. Hutan Negara	288,06	6,60
	g. Padang Rumput	224,12	5,14
	h. Tidak ditanami apapun	431,22	9,89
	i. Lainnya	148,71	3,41
	j. Pertambangan	279,54	6,41
	Jumlah	4.361,83	100,00

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Lahat

Dari table di atas luas wilayah terbagi menjadi beberapa kecamatan, seperti tergambar pada table berikut:



Tabel 4.5
Luas Area Kecamatan di Kabupaten Lahat

Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Luas¹ Total Area¹ (km²/sq.km)
(1)	(2)	(3)
Tanjung Sakti Pumi	Pajar Bulan	271,00
Tanjung Sakti Pumu	Simpang III PUMU	229,59
Kota Agung	Kota Agung	165,59
Mulak Ulu	Muara Tiga	108,43
Tanjung Tebat	Tanjung Tebat	82,72
Mulak Sebingkai	Keban Agung	63,41
Pulau Pinang	Jati	111,67
Pagar Gunung	Karang Agung	105,51
Gumay Ulu	Tinggi Hari	87,01
Jarai	Jarai	167,52
Pajar Bulan	Sumur	146,11
Muara Payang	Lawang Agung Lama	37,50
Sukamerindu	Sukamerindu	55,23
Kikim Barat	Saung Naga	272,00
Kikim Timur	Bungamas	564,45
Kikim Selatan	Pagar Jati	124,80
Kikim Tengah	Tanjung Aur	265,60
Lahat	Lahat	107,60
Gumay Talang	Sukarame	249,61
Lahat Selatan	Tanjung Payang	183,87
Pseksu	Lubuk Mabar	269,29
Merapi Barat	Merapi	232,64
Merapi Timur	Lebuay Bandung	260,55
Merapi Selatan	Sukamerindu	200,14
Kabupaten Lahat		4 361,84

Sumber : Kabupaten Lahat dalam Angka 2021

4.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik Kabupaten Lahat maka dapat diidentifikasi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 dan rencana



perubahannya dalam Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032, bahwa kawasan lindung meliputi Hutan Lindung Bukit Dingin, Bukit Jambul Gunung Patah dan Hutan Lindung Gumai Tebing Tinggi dengan luas kurang lebih 44.528 (empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar yang terletak di Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Jarai, Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Kecamatan Tanjung Sakti PUMU, Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Mulak Ulu. Kawasan lindung terdiri dari:

- a) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi :
 - Kawasan Hutan Lindung, meliputi Hutan Lindung Bukit Dingin, Bukit Jambul Gunung Patah dan Hutan Lindung Gumai Tebing Tinggi yang terletak di Kecamatan Kikim Selatan, Kikim Barat, Jarai, Tanjung Sakti Pumi, Tanjung Sakti Pumu, Kota Agung dan Mulak Ulu.
 - Kawasan Resapan Air, meliputi: kawasan resapan air yang terdapat hutan lindung Bukit Dingin, Bukit Jambul Gunung Patah, Gumai Tebing Tinggi, Bukit Serelo dan Hutan Lindung Bukit Napal.
- b) Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
 - Kawasan Sempadan Sungai, meliputi Sungai Lematang, Sungai Kikim, Sungai Endikat, dan Sungai Manna dengan luas kurang lebih 7.142 hektar dan ketentuan jarak kawasan sempadan sungai selebar 100 meter kiri kanan untuk sungai besar dan 50 meter di kiri kanan untuk sungai kecil, serta 10-15 meter di kiri kanan sungai di kawasan permukiman.
 - Ruang Terbuka Hijau Kota dengan luas minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik seluas minimum 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan dan ruang terbuka hijau privat seluas minimum 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan



perkotaan.

- c) Kawasan konservasi, meliputi:
- Taman Wisata Alam Bukit Serelo dengan luas kurang lebih 210 hektar.
 - Suaka Margasatwa Gumai Pasemah dengan luas kurang lebih 46.123 hektar.
 - Suaka Margasatwa Isau Pasemah dengan luas kurang lebih 16.998 hektar.
- d) Kawasan rawan bencana alam, meliputi:
- Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Merapi Barat, Lahat, Tanjung Sakti Pumu, Tanjung Sakti Pumi, Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Jarai, Kecamatan Muara Payung, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Pseksu, Kecamatan Gumay Talang, dan Kecamatan Merapi Selatan.
 - Kawasan rawan bencana gerakan tanah berlokasi di Kecamatan PSEKSU, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Kecamatan Tanjung Sakti PUMU, Kecamatan Gumay Talang, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Kikim Tengah, dan Kecamatan Merapi Selatan.
 - Kawasan rawan bencana letusan gunung api berlokasi di Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Jarai dan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI.
 - Kawasan yang terletak di zona patahan aktif berlokasi di



Kecamatan Tanjung Sakti PUMI dan Kecamatan Tanjung Sakti PUMU.

- Kawasan rawan gempa bumi berlokasi di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI dan Kecamatan Tanjung Sakti PUMU.
- e) Kawasan lindung geologi yaitu berada pada Kawasan Bukit Besak di Kecamatan Merapi Selatan.

Selanjutnya untuk kawasan budidaya Kabupaten Lahat meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

a) Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi :

- Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 51.093 hektar terdiri atas Kecamatan Kikim Timur dengan luas kurang lebih 23.144 hektar, Kecamatan Lahat dengan luas kurang lebih 2.064 hektar, dan Kecamatan Merapi Barat dengan luas kurang lebih 25.885 hektar.
- Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 5.458 hektar, terdiri atas Kecamatan Tanjung Sakti PUMU dengan luas kurang lebih 888 hektar, Kecamatan Pulau Pinang dengan luas kurang lebih 4.564 hektar, dan Kecamatan Lahat dengan luas kurang lebih 6 hektar.

b) Kawasan peruntukan pertanian, meliputi :

- Kawasan peruntukan tanaman pangan yang dikembangkan di semua kecamatan dengan luas kurang lebih 17.512 hektar. Kawasan peruntukan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas lebih kurang 15.942 hektar.
- Kawasan peruntukan hortikultura dengan komoditas unggulan berupa durian, duku, manggis, alpukat, kubis,



sawi, cabe dan wortel yang dikembangkan di Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Gumay Talang, Kecamatan Kecamatan Kikim Selatan dan Kecamatan PSEKSU dengan luas kurang lebih 2.968 hektar.

- Kawasan peruntukan perkebunan dengan komoditas utama perkebunan karet, kelapa sawit dan kopi yang dikembangkan hampir di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 145.004 hektar, terdiri atas: 1) perkebunan karet meliputi perkebunan besar dengan luas kurang lebih 4.335 hektar dan perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih 37.907 hektar; 2) kelapa sawit meliputi perkebunan besar dengan luas kurang lebih 32.589 hektar dan perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih 5.157 hektar; 3) perkebunan lada dengan luas kurang lebih 738 hektar; 4) perkebunan kopi dengan luas kurang lebih 61.997 hektar; 5) perkebunan kakau dengan luas kurang lebih 1.100 hektar; 6) perkebunan kelapa dengan luas kurang lebih 810 hektar; 7) kemiri dengan luas kurang lebih 89 hektar; 8) kayu manis dengan luas kurang lebih 161 hektar; 9) cengkeh dengan luas kurang lebih 60 hektar; dan 10) pinang dengan luas kurang lebih 61 hektar.
 - Kawasan peruntukan peternakan meliputi peternakan sapi, kambing dan unggas dengan skala rumah tangga yang diarahkan pada seluruh kecamatan.
- c) Kawasan peruntukan perikanan, meliputi:
 - Kawasan perikanan tangkap meliputi pengembangan kegiatan perikanan tangkap di perairan sungai dan pengembangan kegiatan perikanan tangkap di danau, tebat, cekdam, embung, dan/atau waduk.



- Kawasan peruntukan perikanan budidaya, terdiri dari budidaya perikanan kolam air tenang meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Suka Merindu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Gumay Talang, Kecamatan Lahat, Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Timur, dan Kecamatan Merapi Selatan.
 - Budidaya perikanan kolam air deras meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Suka Merindu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Lahat, dan Kecamatan Merapi Selatan.
 - Budidaya perikanan sawah meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Suka Merindu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Lahat, dan Kecamatan Merapi Selatan.
- d) Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi, kawasan peruntukan pertambangan mineral, kawasan peruntukan perambangan batubara, dan kawasan peruntukan pertambangan



panas bumi.

- Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Kikim Tengah, Kecamatan Gumay Talang dan Kecamatan Pulau Pinang.
 - Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi kawasan pertambangan bukan logam dan batuan yang terdapat di Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Merapi, Kecamatan Pagun, Kecamatan Merapi Barat, dan Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Kota Agung.
 - Kawasan peruntukan pertambangan batubara terdapat di Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Selatan dan Kecamatan Lahat.
 - Rencana kawasan peruntukan pertambangan panas bumi berlokasi di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.
- e) Kawasan peruntukan industri terdiri dari kawasan peruntukan industri sedang dan kawasan peruntukan industri kecil.
- Kawasan peruntukan industri sedang meliputi industri pengolahan batu kali dan krikil yang terletak di Kecamatan Lahat, Kecamatan Merapi Barat dan Kecamatan Pulau Pinang.
 - Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga meliputi industri pengolahan anyaman bambu, tahu, tempe, kerupuk, rotan dan ukiran kayu terletak di Kecamatan Kikim Barat dan Kecamatan Lahat.
- f) Kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan wisata budaya dan wisata alam.
- Kawasan peruntukan pariwisata budaya berlokasi :1)



Kecamatan Lahat yang memiliki objek wisata budaya batu kepala putri, batunaga, batu orang roboh, batu kodok, batu gajah tidur, batu tapak orang belobang, batu lesung, meja batu dan rumah batu; 2) Kecamatan Merapi Barat, Merapi Timur dan Merapi Selatan yang memiliki objek wisata budaya putri menjemur padi, makam serunting sakti, perahu kuno, batu kursi, makam dayang rindu, batu kambing, makam jaga lawang, makam hulu baling dan makam intan permata; 3) Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Tanjung Tebat yang memiliki objek wisata budaya batu ngeri celeng, lobang tiga orang, puri menangis, batu behambing dan batu kerbau; 4) Kecamatan Tanjung Sakti PUMI dan Kecamatan Tanjung Sakti PUMU yang memiliki objek wisata budaya batu tiang enam, ngarai, suaka alam, Makam Puyang Batu, dan perkebunan kopi bukit timur; 5) Kecamatan Jarai dan Kecamatan Pajar Bulan yang memiliki objek wisata budaya batu lumping gajah, pemandian putri, rumah batu hanebat dan batu langgar; 6) Kecamatan Kikim Timur yang memiliki objek wisata budaya makam puyang raden gede dan makam Syekh Salman; 7) Kecamatan Gumay Ulu yang memiliki objek wisata budaya Megalith Kuhut Majapahit, Megalith Parajutri, Megalith Tinjak Banyak; dan 8) Kecamatan Pagar Gunung yang memiliki objek wisata budaya Rumah Bahi dan Candi Dayang Rindu.

- Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas 1) Kecamatan Lahat yang memiliki objek wisata alam taman rekreasi ribang kemambang, gua sarang walet dan air terjun; 2) Kecamatan Merapi Barat dan Kecamatan Merapi Selatan yang memiliki objek wisata alam bukit serelo, pusat pelatihan gajah, Bukit Besar, Air Terjun Hujan Panas, Air Terjun Berdarah, Air Terjun Uhang, Air Terjun Mata Putri, Air



Sumur; 3) Kecamatan Kota Agung yang memiliki objek wisata alam bukit rancing, Curup Nelindang, Curup Air Kerinjing, Tebat Bukit, Curup Air Tupai, danau batu dan tebat besar; 4) Kecamatan Tanjung Sakti PUMI dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu yang memiliki objek wisata alam air panas, tebat besar, Curup Kabuhan, Curup Merundingan, Curup Perampangan, Curup Air Anak, dan Air Terjun Singgah Kudai; 5) Kecamatan Jarai dan Kecamatan Muara Payang yang memiliki objek wisata alam Air Terjun Cambai, ngarai, suaka alam, Batu Megalit dan perkebunan kopi bukit timur; 6) Kecamatan Kikim Selatan yang memiliki objek wisata alam bukit seping tiang; 7) Kecamatan Gumay Ulu yang memiliki objek wisata alam Taman Tinggi Hari I, II, dan III, Taman Nik Kambing, Curup Lintang, Curup Maung, Curup Buluh, dan Curup Pasemah; 8) Kecamatan Pseksu yang memiliki objek wisata alam Curup 9 Panggung, Goa Suruman, Curup Tinggi Suban, dan Goa Bukit Semping Tiang; 9) Kecamatan Muara Payang yang memiliki objek wisata alam Curup Lawang Agung dan Lubuk Buntak; 10) Kecamatan Mulak Ulu yang memiliki objek wisata alam Air Terjun Penengan, Air Terjun Dayang Rindu, Air Terjun Air Bais, Air Terjun Napalan, Megalith Batu Kerbau, Goa Suhuman, Tebat Besar, dan Tebat Bengkuang;

- Kecamatan Pulau Pinang yang memiliki objek wisata alam Air Terjun Air Salak, Curup Pemandian 7 Bidadari, Curup Gunung Nyawe, Curup Kunduran, Megalitik, dan Air Panas.

- Kecamatan Pagar Gunung yang memiliki objek wisata alam Marung Batu, Curup Bemban, Air Pans, Curup Laye dan Gua Laye, Curup Air Ugul Besak, Curup Air Ugul Kecil, Batu macan, Ribang Gayau, Gua Masanap Masaris, Tunggul Bute, dan Air Panas Kembuhak; 13) Kecamatan Tanjung Tebat yang memiliki



objek wisata alam Curup Cadas Pelangi, Air Terjun Tiga Tingkat, Danau Batu, Wahana Wisata Water Park.

- g) Kawasan peruntukan permukiman seluas 18.549 hektar meliputi kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan berada di setiap pusat ibukota kecamatan dan kawasan permukiman perdesaan menyebar di setiap kecamatan.
- h) Kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan latihan militer terletak di Kecamatan Lahat dan kawasan peruntukan untuk Polres dan Polsek yang berada di jalan lintas Sumatera Desa Manggul Kecamatan Lahat serta Kawasan Pemerintahan di Kecamatan Lahat dan Merapi Barat.

4.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Bencana alam yang terjadi tidak hanya disebabkan karena faktor alam melainkan juga disebabkan karena faktor ulah tangan manusia tanpa memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan, karena dampak dari bencana itu sendiri akan kembali ke manusia dan merugikan dari berbagai aspek baik ekonomi, sosial maupun budaya.

Kabupaten Lahat merupakan daerah yang memiliki ketinggian yang relatif bervariasi yaitu berkisar antara 0->300 meter di atas permukaan laut dan juga memiliki gunung berapi aktif dan juga berapa sehingga menjadikan Kabupaten Lahat berpotensi rawan bencana alam banjir, karhutla, letusan gunung berapi, longsor dan



gempa bumi. Sementara itu wilayah yang berpotensi rawan bencana banjir seluas 175.929,12 hektar, rawan bencana karhutla seluas 128.150,19 hektar, rawan bencana letusan gunung berapi seluas 1.044,11 hektar, rawan bencana longsor seluas 123.278,30 hektar dan rawan bencana gempa bumi seluas 4.248,26 hektar.

Tabel 4.6. Luas Kawasan Bahaya Bencana di Kabupaten Lahat

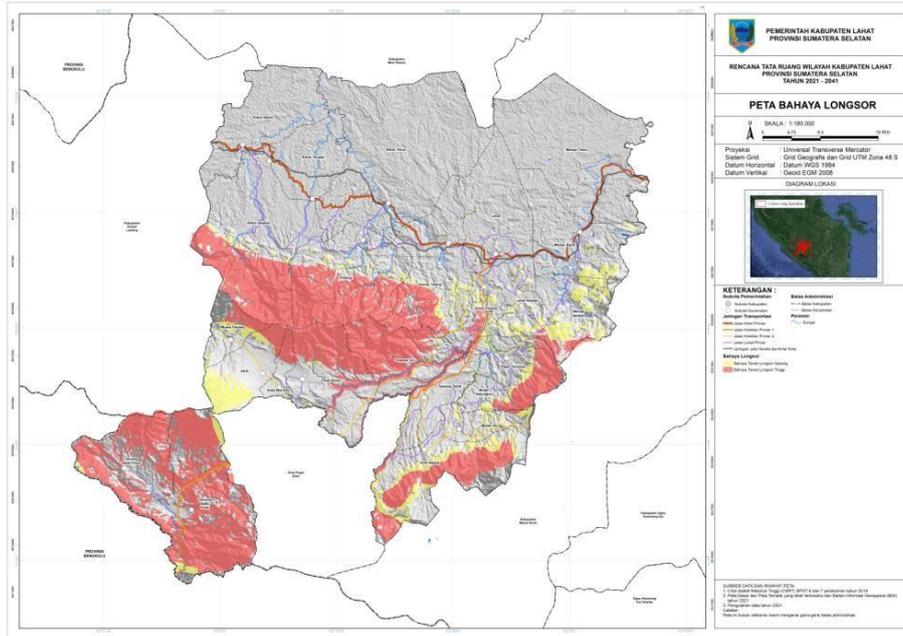
No	Bahaya Bencana	Luas Ha
1	Banjir	175.929,1
2	Longsor	123.278,3
3	Karhutla	128.150,1
4	Letusan Gunung Berapi	1.044,1
5	Gempa Bumi	4.248,2

Sumber: Inasrisk, Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam KLHS Lahat 2019-2023

4.1.1.9 Kejadian Bencana Kabupaten Lahat dan Sekitarnya

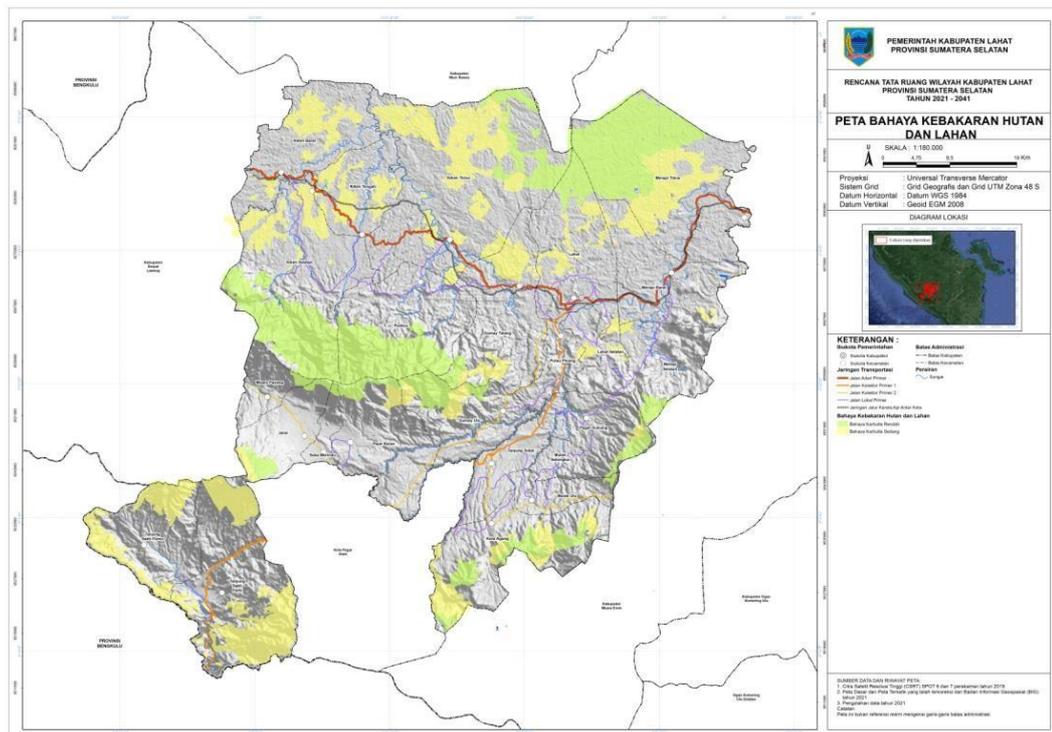
Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami mengalami bencana banjir pada tahun 2020 dan 2021. Sedangkan wilayah sekitar Kabupaten Lahat salah satunya Propinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan dimana bencana alam yang sering terjadi adalah bencana alam Gempa Bumi yang terjadi pada tahun 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2020 yang berdampak terjadinya kerusakan bangunan rumah warga.

Berdasarkan data BNPB sepanjang tahun 2019-2020 wilayah Kabupaten Lahat mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Salah satunya yaitu bencana banjir bandang yang terjadi pada pukul 05.00 WIB, tanggal 30 Desember 2019 yang melanda 3 (tiga) desa diantaranya Desa Keban Agung, Desa Lesung Batu dan Desa Pengentaan. Kemudian bencana banjir bandang yang terjadi pada pukul 04.00 WIB, Tanggal 09 Januari 2020 yang melanda 4 (empat) kecamatan diantaranya Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan PSEKSU, Kecamatan Gumay Talang dan Kecamatan Kikim Timur. Selanjutnya terjadi banjir bandang dan tanah longsor pada pukul 10.00 WIB, Tanggal 7 Februari 2020 yang melanda



Gambar 4.3. Peta Bahaya Longsor

Sumber : KLHS Kab. Lahat 2019-2023



Gambar 4.4. Peta Rawan Karhutla

Sumber : KLHS Kab. Lahat 2019-2023



4.2 Demografi

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Secara umum jumlah penduduk Kabupaten Lahat pada kurun waktu Tahun 2014-2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Lahat mencapai 439.567 jiwa yang terdiri atas 224.884 jiwa penduduk laki-laki dan 214.683 jiwa penduduk perempuan.



Gambar 4.7 Persentase Penduduk di Kabupaten Lahat

Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2022

Untuk mengetahui jumlah penduduk serta laju pertumbuhan, digambarkan dalam grafis berikut:



Tabel 4.6
Laju Populasi Penduduk per Tahun

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanjung Sakti Pumi	16,82	16,94	1,09	0,96
Tanjung Sakti Pumu	14,52	14,60	0,89	0,69
Kota Agung	13,62	13,74	1,23	1,15
Mulak Ulu	12,57	12,66	1,05	0,90
Tanjung Tebat	8,82	8,90	1,28	1,21
Mulak Sebingkai	5,71	5,73	0,81	0,58
Pulau Pinang	9,87	10,04	2,17	2,40
Pagar Gunung	12,95	13,04	1,10	0,97
Gumay Ulu	5,58	5,62	1,09	0,96
Jarai	20,51	20,56	0,63	0,34
Pajar Bulan	12,85	12,94	1,03	0,88
Muara Payang	8,90	8,93	0,64	0,36
Sukamerindu	8,05	8,08	0,84	0,63
Kikim Barat	17,90	18,18	1,92	2,07
Kikim Timur	31,99	32,52	2,02	2,20
Kikim Selatan	17,34	17,54	1,54	1,56
Kikim Tengah	10,05	10,21	1,99	2,16
Lahat	107,51	108,13	0,95	0,78
Gumay Talang	12,94	13,24	2,72	3,13
Pseksu	9,04	9,12	5,00	1,18
Lahat Selatan	13,21	13,82	1,25	6,19
Merapi Barat	25,70	26,27	2,57	2,93
Merapi Timur	25,23	25,66	2,07	2,27
Merapi Selatan	8,39	8,47	1,32	1,26
Kabupaten Lahat/ Lahat Regency	430,07	434,94	1,47	1,51

Sumber: Lahat Dalam Angka, 2022

Bertambahnya jumlah penduduk per tahun di Kabupaten Lahat menyebabkan bertambahnya masalah kependudukan terutama dalam penyediaan pelayanan dasar, perumahan dan



permukiman, penyediaan prasarana dan penyediaan lapangan pekerjaan.

4.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat dapat dilihat dari capaian kinerja indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lahat.

4.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

4.3.1.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

4.3.1.2 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah kumulatif nilai tambah bruto dari seluruh lapangan usaha. Namun dari hitungan – hitungan tersebut PDRB dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada, karenanya PDRB merupakan cerminan perekonomian suatu wilayah. Dimana PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi.

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Lahat akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada kurun waktu 2014 s.d 2021, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan



perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Berdasarkan data BPS, PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas Kabupaten Lahat tahun 2021 terhitung sebesar 118.613,33 trilyun rupiah atau tumbuh sebesar 7.4 persen dari tahun sebelumnya (2020). Angka tersebut menggambarkan besarnya nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga di tahun 2021. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan sebesar 13.002,37 trilyun rupiah dengan pertumbuhan 3.6 persen.

Persentase distribusi PDRB atas harga berlaku yang paling terbesar adalah di lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan nilai 35,74 persen. Sedangkan, sektor yang paling sedikit adalah disektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 0.03 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lahat tahun 2021 mencapai 4,63 persen.\

Grafik 4.1

Perkembangan PDRB Kabupaten Lahat Tahun 2016-2021



Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2022

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Lahat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB Kab Lahat atas harga berlaku tercatat sebesar 15,035 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 18,613 juta rupiah

4.3.1.3 Laju Inflasi

Laju inflasi atau naik turunnya tingkat harga barang dan jasa digunakan untuk melihat stabilitas perekonomian yang terjadi di daerah. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Secara



teori pada dasarnya berkaitan dengan fenomena interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya, seperti tata niaga dan kelancaran dalam arus lalu lintas barang serta peranan kebijaksanaan pemerintah antara lain tidak stabilnya harga BBM dan gas, tarif dasar listrik dan adanya krisis ekonomi global yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempercepat laju inflasi semua sektor di Kabupaten Lahat.

Secara umum tingkat inflasi dihitung untuk melihat perubahan harga-harga konsumen pada berbagai komoditas. Komoditas tersebut dikelompokkan menjadi 7 kelompok yaitu: kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, dan kelompok transportasi.

Untuk mengukur lajur inflasi diperlukan survey biaya hidup dan juga survey kebutuhan pasar untuk mengetahui harga konsumen. Di Kabupaten Lahat tidak melaksanakan survey tersebut, sehingga untuk mengetahui laju inflasi di Kabupaten Lahat, digunakanlah data dari Kota Lubuk Linggau sebagai kota terdekat dari Lahat sebagaimana berikut :



Tabel 4.7
Laju Inflasi Bulanan Kabupaten Lahat

Bulan Month	Makanan, Minuman dan Tembakau Food, Beverages and Tobacco	Pakaian dan Alas Kaki Clothing and Footwear	dan Bahan Bakar Rumah Tangga Housing, Water, Electricity, and Household Fuels
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari/January	1,00	-0,04	-0,24
Februari/February	-0,49	0,05	-0,12
Maret/March	-0,03	0,00	0,08
April/April	0,56	0,39	0,29
Mei/May	0,05	1,00	0,21
Juni/June	-0,41	0,01	-0,01
Juli/July	-0,49	0,00	0,10
Agustus/August	-0,87	0,12	0,26
September/September	0,19	0,01	0,53
Oktober/October	0,28	0,02	0,95
November/November	0,86	0,08	-0,12
Desember/December	1,03	0,00	0,00
2021	0,54	0,10	0,36

Sumber: Kabupaten Lahat Dalam Angka 2022

4.3.1.4 PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB dan PDRB perkapita Kabupaten Lahat tahun 2017-2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.8.



Tabel 4.8

PDRB Kabupaten Lahat menurut lapangan usaha

Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020 *	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	2 677,44	2 740,91	2 784,01	2 813,21	2 921,36
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	4 049,51	4 247,58	4 629,03	4 702,86	5 068,88
C Industri Pengolahan/Manufacturing	482,26	508,57	532,18	540,53	549,90
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	43,31	51,35	59,49	68,96	74,08
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	3,04	3,26	3,54	3,74	3,78
F Konstruksi/Construction	908,82	929,18	953,53	970,15	976,93
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1 177,45	1 251,24	1 362,14	1 263,97	1 310,02
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	117,39	119,40	122,43	114,57	116,32
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	112,69	122,49	134,83	125,35	131,37
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	112,62	114,93	120,40	130,32	135,28

Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020 *	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	185,33	187,75	189,96	191,38	193,28
L Real Estat/Real Estate Activities	289,49	299,20	308,60	306,35	313,91
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	4,69	4,95	5,23	5,08	5,21
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	616,42	639,11	650,55	662,69	665,01
P Jasa Pendidikan/Education	335,89	348,23	362,89	355,99	360,96
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	93,40	95,87	99,95	105,98	109,06
R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities	55,55	59,68	63,60	66,31	67,04
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	11 265,29	11 723,72	12 382,33	12 427,42	13 002,37

Sumber: Kabupaten Lahat Dalam Angka 2022



4.3.1.5 Indeks Gini

Koefisien gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Dimana, ketimpangan pembangunan atau disparitas dapat menggambarkan perbedaan pembangunan antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan pembangunan.

Kabupaten Lahat tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga berupaya menekan kesenjangan dan meningkatkan pemerataan ekonomi. Gini rasio menggambarkan kesenjangan ekonomi di suatu wilayah. Semakin kecil angka gini rasio berarti pemerataan ekonomi semakin baik. Perkembangan gini rasio Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2019-2021 mendorong Pemerintah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktivitas pembangunan ekonomi daerah termasuk daerah terbelakang atau terisolir akan dapat lebih digerakkan karena adanya wewenang yang ada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pada tahun 2019 – 2020 Gini rasio Kabupaten Lahat stagnan di angka 0,33 dan mulai membaik pada tahun 2021 dengan Gini rasio sebesar 0,30. Gini Rasio Kabupaten Lahat pada tiga tahun terakhir lebih baik dari Provinsi Sumsel dan Nasional.

**Tabel 4.9 Indeks Gini Kabupaten Lahat
Tahun 2019-2021**

Indeks Gini	2019	2020	2021
Kabupaten Lahat	0,33	0,33	0,30
Provinsi Sumsel	0,33	0,34	0,34
Nasional	0,38	0,38	0,38

Sumber : Badan Pusat Statistik 2022



4.3.1.5 Kemiskinan

Penduduk miskin Kabupaten Lahat pada kurun waktu 2014-2021 mengalami penurunan dari 18,02% di tahun 2014 menurun menjadi 16,46% pada tahun 2021. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan presentasi penduduk miskin mencapai 15,92 dan angka tersebut naik sampai mencapai angka 16,46% pada tahun 2021. Kenaikan tersebut salah satunya diakibatkan oleh pandemi covid-19 yang membuat perekonomian dunia anjlok termasuk naiknya angka kemiskinan daerah dan juga nasional. Belum signifikannya penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Lahat antara lain disebabkan karena program-program penanggulangan kemiskinan belum berorientasi pada pembangunan kapasitas masyarakat dan pengembangan modal sosial pada masyarakat miskin serta bantuan sosial yang belum tepat sasaran.

4.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial dapat dievaluasi dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4.3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang umum digunakan untuk menilai kualitas hidup manusia. ada 3 aspek yang menjadi dimensi pengukuran IPM yaitu : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Secara umum IPM di Kabupaten Lahat masih kalah dibandingkan dengan IPM Provinsi Sumsel dan IPM Nasional.





Begitu juga dengan IPM Kab. Lahat tahun 2019-2021 yang mengalami penurunan dari 67,62 pada tahun 2019, menurun 67,44 tahun 2020, dan meningkat sedikit pada tahun 2021 sebesar 67,58.

**Tabel 4.10 Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Lahat Tahun 2019-2021**

IPM	2019	2020	2021
Kabupaten Lahat	67,62	67,44	67,58
Provinsi Sumsel	70,02	70,01	70,24
Nasional	71,92	71,94	72,29

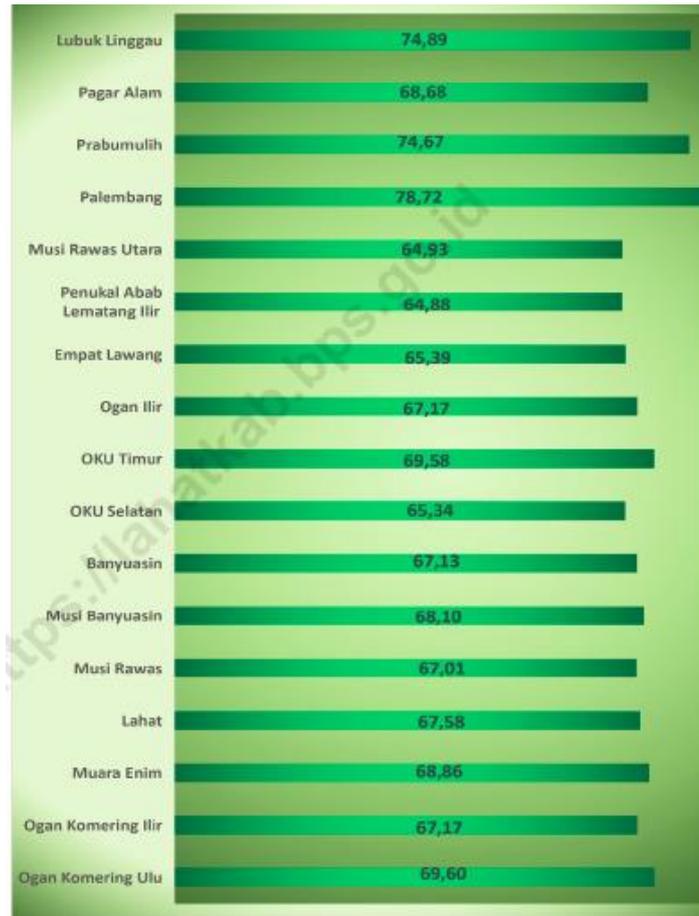
Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

Berikut adalah perbandingan IPM kabupaten /kota di Provinsi Sumatera Selatan.





Grafik 4.3 IPM Kabupaten Lahat 2022



Sumber : BPS 2022

Untuk memperbaiki IPM suatu daerah, diperlukan penanganan serius khususnya pada 3 dimensi pengukuran IPM. IPM sendiri terdiri dari tiga unsur yaitu pendidikan yang diukur dengan tingkat partisipasi pendidikan, kesehatan yang diukur dengan tingkat kematian ibu dan juga daya beli. Pemerintah daerah harus terus meningkatkan pelayanan dasar baik bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan. Selain itu, dukungan infrastruktur juga sangat berpengaruh untuk mendukung pembangunan daerah. Perlu adanya pemetaan secara serius untuk melihat dimensi mana yang masih kurang dan strategi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas baik dibidang pendidikan, kesehatan maupun daya beli masyarakat.





4.3.2.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu fokus kesejahteraan sosial. Pendidikan merupakan kunci utama dalam perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas merupakan hak setiap warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Selain itu, pendidikan juga merupakan kebutuhan mendasar untuk berkembangnya suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, peningkatan serta penyempurnaan pendidikan perlu dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, beriman, bertaqwa, dan bertanggungjawab.

Dukungan pemerintah daerah juga sangat besar dalam rangka memajukan pendidikan, yaitu melalui program pendidikan gratis mulai dari tingkat SD sampai SLTA dengan harapan tingkat pendidikan penduduk akan semakin baik. Kesemuanya itu berangkat dari kesadaran akan pentingnya pendidikan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah keuntungan yang akan diperoleh dari investasi di bidang pendidikan antara lain bahwa pendidikan merupakan salah satu cara dalam rangka memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan bagi masyarakat, pendidikan yang semakin baik merupakan modal dalam memperebutkan kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan mereka.

4.3.2.2.1 Fasilitas Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah penduduk, harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Selain fasilitas berupa gedung sekolah, ketersediaan tenaga pengajar/guru, merupakan faktor penting dalam kegiatan belajar mengajar.





Jumlah sekolah dikatakan memadai apabila dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah yang akan melanjutkan pendidikan, demikian juga dengan jumlah guru dianggap memadai apabila mencapai tingkat perbandingan tertentu terhadap murid sedemikian sehingga proses belajar mengajar berjalan efektif. Untuk itu indikator yang sering digunakan untuk melihat tingkat kecukupan sekolah adalah rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah. Daya tampung sekolah SD, SLTP, dan SMA Sederajat dikatakan sudah semakin baik, jika ditandai dengan rasio murid-sekolah yang semakin kecil. Hal ini dikarenakan jumlah murid yang sekolah bertambah lebih sedikit atau sejalan dengan peningkatan jumlah gedung sekolah yang ada. Begitu juga dengan Rasio murid-guru menggambarkan rata-rata jumlah murid yang diajar oleh seorang guru. Semakin besar rasio, berarti secara rata-rata semakin banyak murid yang diajar oleh seorang guru. Angka rasio semakin kecil maka akan semakin baik pula.

Pada tahun 2018, angka rasio murid-sekolah Kabupaten Lahat untuk SD sederajat sebesar 148,128; SMP sederajat sebesar 249,772 dan SMA sederajat 353,339 siswa persekolah. Sedangkan rasio murid-guru untuk SD sederajat sebesar 1:09; SMP sederajat sebesar 1:12 dan SMA sederajat 1:12 siswa per guru. Jika dibandingkan dengan angka rasio murid-sekolah Kabupaten Lahat tahun 2014, maka capaian rasio murid-sekolah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2014, rasio murid-sekolah untuk SD sederajat sebesar 158,06 yang artinya ketersediaan sekolah menampung murid sekolah SD pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu pula halnya dengan ketersediaan gedung SMP sederajat dan SMA sederajat. Dimana perkembangan rasio murid-sekolah SMP sederajat dan SMA sederajat pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan





dari tahun 2014. Sedangkan untuk perkembangan rasio murid-guru kurun waktu 2014-2018 pada SD sederajat, SMP sederajat dan SMA sederajat mengalami penurunan dan masih perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Rasio murid-guru pada tahun 2018 lebih besar daripada rasio murid-guru pada tahun-tahun sebelumnya. Artinya jumlah murid yang sekolah lebih banyak dari pada ketersediaan guru yang ada saat ini. Dengan demikian, seiring bertambahnya masyarakat yang bersekolah saat ini harus diiringi dengan ketersediaan gedung sekolah dan ketersediaan tenaga pengajar/guru karena merupakan faktor sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Secara rinci jumlah sekolah, guru, dan murid yang sekolah pada SD, SMP dan SMA sederajat.

4.3.2.2 Angka Partisipasi Sekolah

Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan angka partisipasi sekolah. Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

a) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan mengukur banyaknya penduduk yang bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia sekolah. APK untuk Sekolah Dasar tahun 2021 mencapai lebih dari 100 persen yaitu 109,75 persen. Hal ini dikarenakan adanya anak usia kurang dari 7 tahun telah duduk di bangku SD sederajat atau penduduk usia





lebih dari 12 tahun yang masih bersekolah di SD sederajat, sehingga jumlah murid SD sederajat lebih banyak dibanding jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Sedangkan untuk tingkat SMP sederajat pada tahun 2021 APK sebesar 94,48 persen dan APK SMA sederajat sebesar 82,34 persen.

b) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan merupakan perbandingan antara banyaknya murid pada masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok umur untuk jenjang pendidikan yang bersangkutan (7-12 untuk SD, 13-15 untuk SMP dan 16-18 untuk SLTA). Karena itu, APM untuk tiap jenjang pendidikan pada umumnya lebih rendah bila dibandingkan dengan angka partisipasi kasar (APK). Angka Partisipasi Murni (APM) bermanfaat untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Pada tahun 2021 APM Sekolah Dasar sebesar 98,83 persen. Hal ini menunjukkan banyaknya anak usia 12 tahun yang telah duduk di bangku SD. Sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA angkanya masing-masing sebesar 86,98 persen dan 67,85 persen. Rendahnya APM juga menunjukkan banyaknya murid yang duduk di jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan kelompok usianya.

4.3.2.2.3 Angka Melek Huruf

Berdasarkan data BPS Kab. Lahat, angka melek huruf mencapai 98,85%. Dari segi kelompok umur, pada usia 15-24 tahun angka melek huruf mencapai 100%. Pada usia 45 ke atas angka melek huruf mencapai 97,23%.

4.3.2.3 Kesehatan

4.3.2.3.1 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Standar





UNDP besarnya adalah $25 < x > 85$ (minimal 25 tahun dan maksimal 85 tahun). Angka harapan hidup menunjukkan peluang lamanya hidup seseorang dari lahir sampai mati, dinyatakan dalam satuan tahun hidup. merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk itu diperlukan akselerasi peningkatan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan lain sebagainya.

Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Lahat kurun waktu 2018-2021 menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Tahun 2019, Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Lahat sebesar 65,76 tahun meningkat menjadi sebesar 66,04 tahun di tahun 2020, dan pada tahun 2021 sebesar 66,16.

4.3.2.3.2 Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun). Hal ini umumnya terjadi pada anak-anak, gizi buruk pada anak seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi seimbang, di samping itu bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan ataupun terganggunya penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh. Persentase balita gizi buruk Kabupaten Lahat pada tahun 2018 sebesar 0,13 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 0,001 persen (target ≤ 1).

Kondisi gizi sangat menentukan status kesehatannya, karena status gizi merupakan keadaan dari struktur tubuh dan metabolisme yang dipengaruhi oleh zat gizi dalam makanan yang dikonsumsi. Status gizi buruk diharapkan akan terus mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pemerintah Kabupaten Lahat akan terus berupaya menurunkan status gizi buruk melalui program perilaku sehat dan pemberdayaan penduduk, program upaya kesehatan dan perbaikan gizi penduduk. Salah satu penyebab anak kurang gizi



adalah penyakit infeksi, meskipun besaran dan pola penyakit untuk setiap daerah bervariasi, tergantung dari lingkungan dan perilaku kebiasaan masyarakat dalam hidup sehat. Sedangkan penyebab tidak langsung adalah rendahnya daya beli dan keterbatasan pengetahuan tentang pangan yang bergizi. Karena itu, diharapkan juga dengan adanya program pemerintah tentang pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau diharapkan dapat mengatasi jumlah balita gizi buruk.

4.3.2.4 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan perekonomian daerah. Data dan indikator ketenagakerjaan menggambarkan bagaimana kemampuan perekonomian suatu daerah dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduknya yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan. Selain itu, dari data ketenagakerjaan juga dapat menunjukkan struktur perekonomian daerah, dimana hal tersebut merupakan salah satu indikator kemajuan perekonomian daerah tersebut.

Beberapa indikator ketenagakerjaan untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Lahat seperti Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), angka pengangguran dan distribusi sektoral tenaga kerja. Dalam analisis ini digunakan batasan umur penduduk usia kerja adalah penduduk 15 tahun ke atas, sesuai dengan Konvensi ILO No. 138 yang membatasi usia minimum yang diperbolehkan untuk bekerja adalah 15 tahun ke atas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan menganggur. Ukuran ini secara kasar dapat menerangkan kecenderungan tenaga kerja untuk aktif bekerja atau mencari kerja yang sifatnya mendatangkan





kesempatan berpenghasilan baik berupa uang atau barang. Makin besar angka TPAK mengindikasikan peningkatan kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk memasuki angkatan kerja atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis merupakan faktor utama yang mempengaruhi angka TPAK.

Jika dilihat dari jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lahat pada kurun waktu tahun 2014-2017 berdasarkan penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan utama menunjukkan peningkatan yaitu dari tahun 2014 berjumlah 184.770 orang meningkat menjadi 201.240 orang pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan penduduk usia ekonomi aktif yang mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi jauh lebih banyak.

Perkembangan TPAK Kabupaten Lahat kurun waktu 2014-2017 yaitu pada tahun 2014 mencapai 70,66% meningkat menjadi 72,74% di tahun 2017. Peningkatan TPAK dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peningkatan partisipasi sekolah penduduk. Di daerah-daerah dengan struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian, angka TPAK juga erat hubungannya dengan fluktuatifnya kegiatan di bidang pertanian. Bila referensi waktu survei bertepatan dengan pekerjaan yang membutuhkan keterlibatan banyak tenaga kerja seperti pada saat tanam atau panen, maka kecenderungan TPAK menjadi tinggi. Sebaliknya bila referensi waktu survei bertepatan dengan saat menunggu panen misalnya, maka TPAK akan cenderung rendah.

Menelaah masalah TPAK, yang menarik adalah melihat TPAK penduduk perempuan, sedangkan TPAK laki-laki bersifat universal karena setiap laki-laki dewasa dituntut untuk mencari nafkah baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Sedangkan TPAK perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya pendidikan perempuan, terbukanya kesempatan





kerja bagi perempuan, meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat, seperti pandangan terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah dan sebagainya. TPAK penduduk perempuan di Kabupaten Lahat pada tahun 2017 sebesar 59,47 persen. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang angkanya sebesar 60,26 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah angkatan kerja wanita yang sedang mencari pekerjaan.

Salah satu isu dalam ketenagakerjaan, disamping keadaan angkatan kerja dan struktur ketenagakerjaan adalah pengangguran. Pengangguran dari sisi ekonomi merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relative terbatas tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Angka pengangguran yang tinggi tidak hanya menimbulkan berbagai masalah di bidang ekonomi saja melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lahat berfluktuasi, pada tahun 2017 sebesar 4,33 persen, angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang angkanya sebesar 5,62 persen. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun keatas) yang sedang mencari pekerjaan (belum bekerja), penduduk sedang mempersiapkan usaha (tidak bekerja), penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, serta penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).

Penurunan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lahat tersebut terutama disebabkan oleh angka pengangguran penduduk laki-laki, yaitu dari 5,98 persen tahun 2014 menjadi 4,43 persen tahun 2017. Demikian juga dengan angka pengangguran pada





penduduk perempuan turun dari 5,07 persen tahun 2014 menjadi 4,16 persen tahun 2017. Penurunan ini terjadi disinyalir karena banyaknya perusahaan pertambangan dan angkutan batu bara yang baru berdiri di Kabupaten Lahat sehingga menyerap cukup banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

Selain pengangguran terbuka, juga dikenal istilah setengah pengangguran (*under unemployment*), yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal, atau mereka yang sudah bekerja tetapi jam kerjanya kurang dari 35 jam selama seminggu. Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan tenaga kerja yang rendah sekaligus juga menggambarkan rendahnya produktifitas pekerja. Karena meskipun mereka bekerja tetapi belum menggunakan seluruh kapasitas sumber daya yang ada seperti tingkat pendidikan, skill dan keterampilan yang dimiliki atau tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang diharapkan sehingga mereka masih berusaha mendapatkan pekerjaan lain.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat dapat menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja secara berkesinambungan yang meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro serta disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lapangan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja serta jaminan sosial tenaga kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik didalam maupun di luar hubungan kerja yang diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar





kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.

Selain itu, penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja ini diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan sesuai dengan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum yang dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan cara bersama-sama dengan masyarakat mengupayakan perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna yang dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan lain-lain. Pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi dalam menetapkan upah minimum masyarakat di Kabupaten Lahat.

4.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Lahat ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Namun, disisi lain upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Lahat seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan kemandirian





dirasakan makin memudar. Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga.

Kabupaten Lahat mempunyai kekayaan seni budaya yang beragam, hal tersebut menjadi modal dasar untuk pengembangan pariwisata. Kabupaten Lahat dikenal dengan "Bumi Seribu Megalit" karena pada tahun 2012 dikukuhkan oleh MURI (Museum Rekor Indonesia), yaitu Kabupaten Lahat sebagai pemilik situs megalit terbanyak se-Indonesia. Sebaran situs megalit berada di beberapa kecamatan seperti: Merapi Barat, Kota Lahat, Pulau Pinang, Gumay Ulu, Pagar Gunung, Tanjung Tebat, Kota Agung, Mulak Ulu, Jarai, Pajar Bulan, Muara Payang, Suka Merindu dan Tanjung Sakti. Peninggalan megalit di Kabupaten Lahat berupa: arca, arca menhir, lesung batu, lumpang batu, batu tegak, batu datar, dolmen, batu gelang, batu bergores, tetralith, bilik batu, lukisan bilik batu dan tempayan kubur. Jenis temuan megalit sebanyak 13 jenis hanya di temukan di Kabupaten Lahat.

Selain itu, letak geografis Kabupaten Lahat yang berbukit sehingga terdapat banyak air terjun, sungai, danau dan sumber air panas. Saat ini telah terdata di Kabupaten Lahat terdapat lebih kurang 126 air terjun dengan ketinggian dan keindahan yang berbeda. Pesona air terjun Kabupaten Lahat tersebar di beberapa kecamatan seperti: air terjun Milang di Kecamatan Merapi Barat. Air terjun Deras, air terjun Renalap di Kecamatan Merapi Selatan. Air terjun Ganya dan Serame di Kecamatan Kota Lahat. Air terjun Ketapang, Salak, Sumbing, Bidadari, Pandak, Pegadungan, Terlantang, Ujan Panas, Panjang, Kunduran, Gunung Nyawe, Gegas di Kecamatan Pulau Pinang. Air terjun Lintang Kecil, Lintang Besar, Buluh 7 Tingkat, Maung di Kecamatan Gumay Ulu. Air terjun Kesik, Jambat Akar, Kijeng di Kecamatan Tanjung Tebat. Air terjun Bale, Kerinjing, Nelindang, Semindang Rindu di Kecamatan Kota Agung. Air terjun Jernih, Suruman, Dayang Rindu, Penenangan,





Tinggi, Napalan di Kecamatan Mulak Ulu, air terjun Ughul Kecil, Ughul Besar, Bemban, Laye di Kecamatan Pagar Gunung, air terjun Lawang Agung di Kecamatan Muara Payang, air terjun 9 Panggung di Kecamatan Pseksu, air terjun Bukit Timur, Pama Salak, Gimo, Embun di Jarai, air terjun Pemandian Ratu di Kecamatan Tanjung Sakti. Sedangkan sumber air panas di Kabupaten Lahat terdapat di Kecamatan Pagar Gunung dan Kecamatan Tanjung Sakti. Sumber air panas yang berada di Kecamatan Pagar Gunung terletak di Desa Padang dan Danau di hutan lindung Bukit Barisan pada ketinggian 850 mdpl. Sumber air panas di Kecamatan Tanjung Sakti berada di tengah Desa Pajar Bulan, sehingga mudah di jangkau. Sumber air panas ini terletak tepat di bawah jembatan desa Pajar Bulan. Berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang terintegrasi dengan wisata arung jeram di sungai Manna. Kabupaten Lahat memiliki arena arung jeram di 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Lematang, Sungai Selangis dan Sungai Manna. Ketika berarung jeram selain menyusuri sungai juga akan melihat dan singgah di air terjun. Untuk arung jeram di sungai Lematang akan singgah di air terjun Salak dan arung jeram di Sungai Selangis Kecamatan Gumay Ulu akan melihat 6 air terjun dan singgah di air terjun Buluh (7 tingkat). Sedang arung jeram di Sungai Manna Kecamatan Tanjung Sakti akan dibawa menikmati jernihnya air sungai dan indahnya pemandangan sepanjang sungai Manna.

Selain sebagai sarana olahraga arung jeram, saat ini juga merupakan salah satu potensi pariwisata unggulan yang sedang dikembangkan di Kabupaten Lahat. Masyarakat dan wisatawan yang datang ke Kabupaten Lahat selain berolahraga juga dapat menikmati suasana keindahan alam yang dimiliki Kabupaten Lahat. Kabupaten Lahat memiliki Bukit Serelo atau Gunung Jempol merupakan sebuah bukit yang sangat unik dan tiada duanya di dunia. Letak bukit ini di desa Padang Kecamatan Merapi Selatan atau berjarak 27 km dari pusat Kota Lahat. Bukit dengan ketinggian





900 mdpl menjadi simbol Kabupaten Lahat. Di sini juga terdapat pelatihan gajah Sumatera dan dapat dijadikan sarana untuk rock climbing. Keberhasilan berbagai seni dan budaya serta olah raga mendorong berkembangnya kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

4.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum ditandai di antaranya dengan meningkatnya taraf pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, perumahan, lingkungan hidup yang dilaksanakan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

4.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Fokus layanan urusan pemerintah wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan Sosial. Sedangkan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari Bidang Urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.



4.4.2 Urusan Pendidikan

4.4.2.1 Angka Partisipasi Sekolah

Upaya Pemerintah Kabupaten Lahat di bidang pendidikan antara lain menerapkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah melalui kerjasama dengan berbagai pihak yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi berbagai program yang tujuan utamanya untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi penduduk usia tertentu yang masih sekolah terhadap total jumlah penduduk pada usia tersebut. Semakin tinggi angka partisipasi penduduk menunjukkan tingkat kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan semakin baik. Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Lahat pada tahun 2018 dilihat dari golongan usia 7-12 tahun sebesar 104,15 persen yang artinya terdapat 104 penduduk yang bersekolah pada usia 7-12 tahun. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada golongan usia 13-15 tahun sebesar 84,9 persen yang artinya penduduk usia 13-15 tahun ditemui 84 orang yang bersekolah. Selanjutnya, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk golongan usia 16-18 tahun sebesar 82,46 persen yang artinya pada tahun 2018, terdapat 82 penduduk yang bersekolah pada usia 16-18 tahun.

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi angka partisipasi sekolah adalah faktor biaya pendidikan yang cenderung semakin mahal pada jenjang pendidikan lebih tinggi mengakibatkan sebagian siswa yang telah menamatkan suatu jenjang pendidikan terpaksa tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi ini akhirnya mempengaruhi pola angka partisipasi sekolah secara umum yang cenderung semakin menurun pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Angka Partisipasi Sekolah dalam kurun waktu 2014-2018 memperlihatkan angka yang fluktuatif





untuk setiap kategori kelompok umur. Angka Partisipasi Sekolah tertinggi tahun 2018 pada kelompok umur 7-12 tahun dan yang terendah pada kelompok umur 16-18 tahun.

4.4.2.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan fasilitas pendidikan seperti sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga pengajar sangat mempengaruhi kondisi pendidikan di setiap daerah. Keberhasilan di bidang pendidikan ditandai dengan adanya peningkatan angka partisipasi sekolah, perluasan daya tampung ruang kelas dan penyediaan fasilitas belajar siswa. Perluasan daya tampung dilakukan dengan pembangunan gedung kelas baru, rehabilitasi gedung SD, SLTP dan SLTA yang rusak berat dan penempatan guru di sekolah yang kekurangan guru.

4.4.2.3 Rasio Murid - Sekolah dan Rasio Murid - Guru

Rasio murid terhadap sekolah adalah angka rata-rata kemampuan sekolah dalam menampung muridnya. Semakin kecil rasio antara murid dan sekolah maka semakin baik indikator pendidikan mengenai daya tampung sekolah. Daya tampung sekolah yang semakin kecil tentunya menunjukkan bahwa sekolah lebih intensif dalam memberikan pelayanan pendidikan sehingga diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang cerdas. Semakin rendah nilai rasio menunjukkan kemampuan sekolah dalam menampung murid semakin membaik. Rasio murid terhadap sekolah lebih disebabkan oleh jumlah murid yang menurun tidak diimbangi dengan jumlah sekolah yang semakin bertambah.

Rasio murid terhadap sekolah pada tahun 2018 pada setiap tingkat pendidikan memiliki nilai yang relative lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat per tingkat pendidikan, tingkat SD memiliki nilai rasio yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya yaitu sebesar





148,128. Selanjutnya adalah tingkat SLTP sebesar 249, 772 dan SLTA sebesar 353,339. Nilai rasio murid terhadap sekolah yang menunjukkan nilai yang lebih rendah menunjukkan kemampuan sekolah dalam menampung murid semakin baik. Namun perlu diketahui bahwa penyebab nilai rasio yang menurun ini terjadi karena peningkatan fasilitas jumlah sekolah di Kabupaten Lahat.

Jumlah sekolah pada tahun 2018 bahkan meningkat pada berbagai tingkat pendidikan. Rasio murid terhadap sekolah ini lebih disebabkan oleh jumlah murid yang bertambah diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Hal ini tentunya menjadi tugas bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan yang kemudian diikuti dengan upaya peningkatan jumlah fasilitas pendidikan berupa sekolah.

Selanjutnya, angka rasio murid terhadap guru adalah rata-rata jumlah murid yang diajar oleh seorang guru dalam suatu tahun tertentu. Semakin kecil rasio murid terhadap guru tentunya menunjukkan semakin baiknya pendidikan yang bisa diberikan guru terhadap muridnya. Rasio murid terhadap guru pada tahun 2014-2018 yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan nilai fluktuatif. Rasio murid terhadap guru pada tahun 2018 yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan nilai yang semakin besar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas pengajaran guru mengalami penurunan karena beban murid yang harus diajar lebih banyak pada tahun 2018 sedangkan jumlah guru berkurang sehingga menyebabkan guru menjadi kurang intens memperhatikan muridnya.

Pada jenjang SD, 1 orang guru mengawasi secara rata-rata 9 orang murid, sedangkan pada jenjang SLTP rata-rata seorang guru mengawasi 12 orang murid dan pada jenjang SLTA seorang guru mengawasi rata-rata 12 orang murid. Fenomena tingkat pendidikan di Kabupaten Lahat menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Daerah setempat, khususnya dalam rangka





peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah dimana indikator kesejahteraan taraf pendidikan yang baik diterima pada setiap masyarakat akan menghasilkan SDM yang berkualitas pula.

4.4.3 Urusan Kesehatan

Gambaran umum kesehatan di Kabupaten Lahat menunjukkan derajat atau status kesehatan yang meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, morbiditas, imunisasi, dan angka harapan hidup. Pembangunan bidang kesehatan juga merupakan aspek penting dalam rangka mewujudkan masyarakat Lahat yang berkualitas. Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama.

4.4.3.1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan harus didukung ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan penduduk dapat diselenggarakan baik oleh institusi pemerintah maupun swasta seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah bersalin dan lain-lain. Selain itu juga mencakup sarana pendukung kesehatan seperti tempat praktek dokter, bidan, poliklinik dan posyandu. Perkembangan fasilitas kesehatan di Kabupaten Lahat kurun waktu tahun 2014-2018 cenderung menunjukkan peningkatan, begitu pula halnya dengan jumlah tenaga kesehatan.

Pada tahun 2018 di Kabupaten Lahat terdapat 2 unit rumah sakit, 33 unit puskesmas, 56 unit puskesmas pembantu, 1 unit rumah bersalin. Sementara itu jumlah apotik 19 buah, klinik/balai pengobatan sebanyak 13 buah dan optikal sebanyak 4 buah yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Lahat. Sedangkan untuk tenaga kesehatan yang berada di Kabupaten Lahat pada tahun 2018 terdiri dari dokter sebanyak 28 orang, perawat sebanyak





167 orang, bidan sebanyak 297 orang, dan tenaga farmasi sebanyak 11 orang. Hal tersebut dapat menunjukkan pembangunan di bidang kesehatan, khususnya kesadaran pentingnya pelayanan kesehatan oleh tenaga medis serta partisipasi aktif masyarakat untuk melahirkan dengan tenaga medis yang semakin tinggi. Akses masyarakat terhadap bidan desa yang semakin mudah akan mengurangi angka kematian bayi sekaligus juga meningkatkan angka harapan hidup.

4.4.3.2 Morbiditas

Morbiditas atau angka kesakitan dapat dijadikan alat ukur tingkat kesehatan masyarakat. Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal, atau hal lain. Angka kesakitan dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

4.4.4 TATA RUANG

4.4.4.1 Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Sebagai salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi



pertanian, maka jaringan irigasi tersebut haruslah dalam kondisi baik sehingga kebutuhan air irigasi bagi pertanian dapat terpenuhi.

Kondisi baik untuk jaringan irigasi dikategorikan memiliki kerusakan saluran irigasi < 10% dari total panjang saluran irigasi, demikian sebaliknya kondisi rusak untuk jaringan irigasi dikategorikan memiliki kerusakan saluran irigasi > 10% dari total panjang saluran irigasi. Saluran irigasi di Kabupaten Lahat seluas 13.348 ha, yang terdiri dari saluran primer, sekunder, tersier dan saluran pembuang. Pada awal tahun 2017 memiliki kondisi jaringan irigasi dengan tingkat kerusakan 9,10% yang merupakan angka kritis menuju ke kondisi tidak baik.

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Lahat kurun waktu 2014-2017 terlihat meningkat dan menunjukkan perkembangan yang baik. Pada tahun 2014 rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 61,84 meningkat menjadi 72,88 atau seluas 9.729 hektar. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Lahat kedepan yaitu perlu menjaga dan mempertahankan luasan daerah irigasi agar tidak terjadi penyusutan dan alih fungsi lahan yang dapat mengancam ketahanan pangan yang berdampak pada perekonomian masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasarkan kewenangannya, jumlah Daerah Irigasi di Kabupaten Lahat sebanyak 214 Daerah Irigasi dengan Luas 13.348 hektar, sedangkan untuk kewenangan Provinsi Sumsel sebanyak 8 Daerah Irigasi dengan luas 10.443 hektar.

4.4.4.2 Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Lahat masih mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 dan saat ini sedang dilakukan peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26





Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peninjauan kembali Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 dilaksanakan melalui tahapan pengkajian, evaluasi dan penilaian oleh Tim PK RTRW Kabupaten Lahat yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Lahat.

Hasil dari Peninjauan Kembali tersebut berdasarkan hasil penilaian per aspek yang meliputi aspek kualitas RTRW, aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan masing-masing aspek maka RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 perlu direvisi. Selain itu, penilaian terhadap perubahan RTRW berdasarkan beberapa kajian didapat hasil total perubahan sebesar 18%, yang artinya tidak perlu dilakukan pencabutan peraturan Daerah tetapi hanya perlu perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032.

Beberapa rekomendasi dalam revisi RTRW berdasarkan hasil pengkajian, evaluasi dan penilaian terhadap RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 sebagai berikut:

a. Revisi Peraturan Daerah

Perubahan peraturan daerah disebabkan antara lain adanya perubahan wilayah akibat pemekaran wilayah kecamatan. Selain itu perubahan peraturan daerah dilakukan untuk mengakomodir beberapa kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang belum dimasukkan dalam RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032.

b. Revisi terhadap Materi Teknis

Revisi terhadap materi teknis akan disesuaikan dengan perubahan pada Peraturan Daerah serta mengakomodir beberapa kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang belum dimasukkan dalam RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032.





c. Revisi terhadap peta

Revisi terhadap peta-peta juga diperlukan untuk memberikan gambaran data spasial terhadap RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 yang mengalami revisi. Revisi peta meliputi perubahan batas administrasi, perubahan data-data spasial yang dipersyaratkan dalam dokumen RTRW, perubahan peta-peta rencana yang meliputi peta struktur ruang, peta pola ruang dan peta kawasan strategis.

4.5 FOKUS URUSAN DASAR

4.5.1 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah digunakan sebagai tempat berlindung dari gangguan luar dan sebagai tempat tinggal untuk tumbuh, hidup, berinteraksi dan fungsi lainnya. Untuk itu, rumah diharapkan bisa memberikan rasa nyaman dan memenuhi syarat-syarat kesehatan. Saat ini rumah merupakan kebutuhan yang sangat pokok. Dengan adanya data perumahan dapat menggambarkan sampai sejauh mana kesejahteraan rumah tangga. Beberapa aspek yang dapat digambarkan dari data fasilitas perumahan antara lain akses rumah tangga dengan akses air minum, akses sanitasi yang layak, akses terhadap sumber listrik dan beberapa indikator lainnya. Permasalahan air minum, sanitasi dan sumber listrik perlu menjadi perhatian, karena merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Selain itu akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang nantinya akan berpengaruh pada indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lahat.

4.5.2 Rumah Tangga dengan Akses Air Minum

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus





diupayakan oleh pemerintah. Besar kecilnya persentase penduduk yang menggunakan air bersih dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kesadaran penduduk tentang kesehatan dan sanitasi lingkungan serta tersedianya fasilitas air bersih bagi penduduk. Dalam rangka mencapai akses universal yang telah dicanangkan secara nasional yaitu 100% akses air minum, 0 % Kawasan Kumuh dan 100% akses sanitasi (100-0-100) diperlukan dorongan dan strategi percepatan dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencapai hal dimaksud. Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Lahat, dimana permasalahan akses air minum, kawasan kumuh dan sanitasi yang layak sudah menjadi prioritas nasional merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan.

Capaian rata-rata Kabupaten Lahat untuk akses air bersih tahun 2018 sebesar 43,70% masih dibawah rata-rata capaian nasional yaitu 72,99% dan capaian Provinsi Sumatera Selatan sebesar 62,84%. Angka capaian akses air minum layak Kabupaten Lahat pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2017 sebesar 45,83%. Hal ini menggambarkan kinerja pengelolaan akses air minum layak di Kabupaten Lahat semakin rendah. Komitmen Pemerintah Kabupaten Lahat sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan capaian akses universal dengan memanfaatkan sumber-sumber pendanaan baik melalui hibah, CSR, APBN, APBD dan lain-lain.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lahat dalam upaya mendorong capaian akses universal yang telah dicanangkan secara nasional (100-0-100) pada tahun kedepan untuk akses air minum antara lain: memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana air minum yang berkelanjutan melalui pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN, merencanakan proyeksi kebutuhan penyediaan sarana air minum agar dapat berkelanjutan, membangun partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam





pembangunan sarana dan prasarana air minum yang berkelanjutan, meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum yang berkelanjutan.

Dalam rangka pemenuhan pelayanan air bersih, Pemerintah Kabupaten Lahat melalui PDAM terus berusaha untuk meningkatkan penyediaan air minum. Penyediaan air minum disalurkan ke seluruh konsumen, diantaranya sosial (umum; khusus), non niaga (rumah tangga; instansi pemerintah), niaga (kecil; besar) dan khusus (pelabuhan; lainnya). Pada tahun 2017, banyaknya pelanggan PDAM menurut jenis konsumen di Kabupaten Lahat mencapai 6.644 pelanggan yang terdiri dari jenis konsumen sosial, konsumen niaga, non niaga, industri dan khusus. Secara rinci perkembangan banyaknya pelanggan PDAM menurut jenis konsumen di Kabupaten Lahat.

4.5.3 . Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Kabupaten Lahat, pada tahun 2018 telah melaksanakan peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) seperti halnya juga yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya pengaruh budaya luar yang langsung ditiru oleh masyarakat tanpa dilakukan upaya penyaringan. Munculnya sikap seperti ini lebih banyak menimpa masyarakat yang menganggap bahwa semua pengaruh dari luar berarti mengarah pada kemajuan dan modernisasi. Akibatnya, upaya penyaringan tidak secara tepat dilakukan bahkan bisa terjadi perilaku yang selama ini telah mengakar dalam masyarakat akan mudah digantikan dengan perilaku yang baru. Kondisi ini akan semakin mudah terjadi manakala pengaruh teknologi informasi sudah merambah ke pelosok daerah.

Masyarakat sebagai salah satu mitra aparat keamanan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang aman dan tertib serta bebas





dari penyakit masyarakat diharapkan mampu mengungkapkan berbagai pesan moral dalam perwujudannya. Pelanggaran Peraturan Daerah yang dapat diselesaikan sesuai yang ditargetkan sebanyak 10 pelanggaran. Selain itu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pelaksana Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat bekerjasama dengan aparat hukum lainnya dalam penegakkan Peraturan Daerah yaitu kegiatan penertiban tempat hiburan, penertiban penjualan minuman beralkohol, penertiban penginapan, hotel, losmen dan penertiban KTP. Disisi lain dilakukan juga kerjasama dengan aparat hukum lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas aparat.

4.5.4 Urusan Sosial

Tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lahat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat selaras dengan tujuan pembangunan di Indonesia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil merata sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial terus dilaksanakan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi anak balita terlantar, anak terlantar (Usia 6-18 tahun), anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas (ADK) kelainan fisik/mental belum berusia 18 tahun, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif



lainnya).

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, sosial) secara memadai/wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keturunan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendidik) yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana. Sedangkan yang dimaksud Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Beberapa hambatan di bidang sosial antara lain masih rendahnya penyerapan informasi kesejahteraan sosial oleh masyarakat, peningkatan PMKS yang masih tinggi setiap tahunnya. Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sosial meliputi berbagai jangkauan pelayanan pemberdayaan sosial bagi anak terlantar, anak jalanan dan santunan bagi lansia terlantar, selain itu juga telah dilakukan peningkatan pemberdayaan peran keluarga miskin dan bantuan bagi keluarga fakir miskin dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial termasuk Penyempurnaan Sarana Prasarana Pusat Rehabilitas dan Panti Asuhan, Bantuan Tanggap Darurat kepada para korban bencana.

Hal penting lainnya yang telah dilaksanakan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mencakup upaya-upaya integrasi sosial, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan lingkungan, pemberdayaan KAT bukan hanya dilihat sebatas upaya untuk





memathkan isolasi/keterasingan secara fisik dari kelompok-kelompok masyarakat lain di Lingkungannya tetapi lebih penting lagi adalah isu sosial, sehingga mereka dapat hidup sejajar dengan masyarakat sekitarnya.

Saat ini, permasalahan Urusan Sosial Kabupaten Lahat adalah masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga persentase angka kemiskinan di Kabupaten Lahat masih relatif tinggi oleh karena itu penanganan PMKS harus lebih di Optimalkan dan Pembinaan terhadap Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan PMKS perlu ditingkatkan. Dalam rangka mengentaskan permasalahan tersebut diatas maka Dinas Sosial Kabupaten Lahat memerlukan target kinerja dan tambahan sumber dana untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial pada masyarakat Kabupaten Lahat khususnya melalui program yang telah direncanakan untuk menunjang keberhasilan pembangunan lima tahun mendatang yaitu melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan Indikator Kinerja Persentase Jumlah Keluarga sangat Miskin (KSM) yang Memperoleh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial dengan Indikator Kinerja Persentase KMS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Program Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan Indikator Kinerja Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) dengan Indikator Kinerja Persentase eks Penyandang Penyakit Sosial yang Tertangani, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Pelayanan



Kesejahteraan Sosial, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana dengan Indikator Kinerja Jumlah Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat, Program Pembinaan Anak Terlantar dengan Indikator Kinerja Persentase Anak Terlantar yang dilatih Keterampilannya.

4.5.5 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian persentase penurunan kasus perempuan dan anak dari tindakan kekerasan pada tahun 2018 lebih baik jika dibandingkan capaian pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk meminta bantuan penyelesaian kasus kekerasan kepada Pemerintah. Pada tahun 2014, persentase penurunan kasus perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar 10% menurun menjadi 7,2% di tahun 2018. Pencapaian keberhasilan tersebut didukung oleh Program Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Perkembangan angka partisipasi perempuan di lembaga legislatif dan lembaga pemerintah pada kurun waktu 2014-2018 mengalami peningkatan dari semula pada tahun 2014 untuk persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif sebesar 7,5% meningkat menjadi 10% di tahun 2018. Sedangkan untuk persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2014 sebesar 3,1%, meningkat menjadi 4,98% di tahun 2018. Beberapa program yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan partisipasi perempuan di Kabupaten Lahat antara lain melalui Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

4.5.6 Urusan Pangan



Kebutuhan pangan di Kabupaten Lahat saat ini jauh lebih kecil dari pada produksi dan ketersediaan pangan di kabupaten Lahat. Selisih antara kebutuhan dan ketersediaan pangan mencapai 152.914.570.500 ton/tahun. Ketersediaan pangan terdiri dari indikator kebutuhan konsumsi normatif terhadap ketersediaan sereal.

Analisis daya dukung lingkungan untuk bahan pangan dapat diperoleh dari perhitungan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan yang menunjukkan bahwa Kecamatan Lahat dan Kecamatan Gumay Talang memiliki nilai selisih negatif (minus) yang berarti memiliki defisit bahan pangan. Namun dengan masuknya produk tanaman pangan dari kecamatan lain di dalam Kabupaten Lahat serta dari luar Kabupaten Lahat sehingga defisit bahan pangan di dua Kecamatan tersebut dapat di abaikan. Kekurangan bahan pangan di dua Kecamatan tersebut di sebabkan oleh luas lahan sawah yang dimiliki oleh kecamatan tersebut semakin sedikit.

4.5.7 Urusan Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup merupakan input penting dalam proses kegiatan pembangunan. Dukungan sumber daya alam berupa air, pangan dan lahan yang merupakan dasar penting dalam proses produksi untuk mencapai tujuan pembangunan. Ketersediaan dan pencadangan sumber daya alam pendukung kegiatan pembangunan harus dipastikan mampu mencukupi kegiatan pembangunan saat ini dan generasi yang akan datang.

4.5.7.1 Daya Dukung Air Permukaan

Kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung penyediaan air dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air layak bagi penduduk. Ketersediaan air merupakan jumlah air yang dapat digunakan,





yang berupa jumlah air larian dan air tanah yang berlebih (*overflow*). Kelebihan air tanah dimaksud adalah mata air atau sumber air lainnya. Jumlah air larian dihitung dengan mempertimbangkan curah hujan dan kemampuan tanah dalam meresapkan air. Koefisien air larian sesuai dengan kelas tutupan tanah berdasarkan standar Permen LH No.17 Tahun 2009. Jumlah air dari mata air dihitung dari rata-rata debit kemudian diperhitungkan dalam setahun. Sementara itu kebutuhan air dihitung dengan dua pendekatan yakni (1) kebutuhan layak yang mencakupi tidak hanya untuk kebutuhan dasar namun meliputi kebutuhan sosial, pertanian dan industri, dan (2) kebutuhan dasar untuk hidup (*basicneed*). Standar kebutuhan layak mengacu pada WHO adalah 1.000 m³/kapita/tahun sedangkan kebutuhan dasar mengacu pada Standard National Indonesia (SNI) sebesar 120 l/orang/hari atau 43,8m³/kapita/tahun. Dari perhitungan air permukaan yang tersedia di kabupaten Lahat sebesar 17.079.897.600 m³/tahun. Kebutuhan air yang diperhitungkan terdiri dari kebutuhan air domestik, kebutuhan air untuk pengairan pertanian, kebutuhan air untuk peternakan dan kebutuhan air untuk industri. Kebutuhan air domestik dihitung dari jumlah penduduk dikalikan dengan kebutuhan air untuk hidup layak per kapita.

Penggunaan air untuk kebutuhan irigasi lahan pertanian, kebutuhan domestik, kebutuhan peternakan dan kebutuhan industri relatif lebih aman karena dapat dipenuhi dari air permukaan. Kabupaten Lahat masih mengalami surplus air sebesar 16.876.210.052,59 m³/tahun. Kebutuhan air domestik lebih dititik beratkan ke konsumsi air bersih yang berasal dari air permukaan dan di tangani oleh PDAM.

Konsumsi air yang dapat dilayani oleh PDAM hanya sebesar 23,16 persen dari total kebutuhan. Layanan air bersih melalui PDAM untuk rumah tangga hanya sebesar 23,16 % dari





total kebutuhan air domestik. Menurut data PDAM kabupaten Lahat tahun 2017, kebutuhan air untuk rumah tangga terhadap konsumen dilayani PDAM sebesar 2.589.135,822 m³/tahun dari total kebutuhan domestik. Tabel diatas menunjukkan rekapitulasi kebutuhan air bersih domestik yang diperoleh dari hasil model dan kebutuhan air rumah tangga yang dilayani PDAM. Terdapat perbedaan signifikan, dikarenakan tidak semua sumber air rumah tangga di kabupaten Lahat menggunakan jasa layanan PDAM.

Dengan demikian daya dukung lingkungan hidup dalam menyediakan air bagi kebutuhan hidup layak penduduk kabupaten Lahat sebagai berikut:

- Jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak 1.000 m³/kapita/tahun menurut standar WHO maka kebutuhan air sebesar 11.096.656,90 m³ atau 5% dari kebutuhan. Sehingga daya dukungnya mencapai 0,95
- Jika dibandingkan dengan kebutuhan air dirinci menurut kebutuhan sosial, pertanian dan industri maka kebutuhan air sebesar 192.591.890 m³/tahun atau 94 % dari kebutuhan. Sehingga daya dukungnya hanya mencapai 0,06.

4.5.7.2 Kualitas Air Sungai

Lima (5) sungai yang ada di Kabupaten Lahat telah mengalami pencemaran dengan kandungan BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand) yang telah melampaui daya tampung sungai. Sumber BOD dan COD tersebut berasal dari beban pencemar dari limbah domestik (COD 500.000 kg/hari dan BOD 220.000 kg/hari), beban pencemar dari limbah pertanian dan penggunaan lahan (COD 7.685 kg/hari dan BOD 1.750 kg/hari), beban pencemar dari limbah peternakan (COD sebesar 9.000 Kg/hari dan BOD 1.790 kg/hari), beban pencemar dari limbah UMKM (COD 7.950 kg/hari dan BOD 1.755 kg/hari), dan beban pencemar dari limbah Industri. Sumber pencemar air sungai di





kabupaten Lahat meliputi limbah domestik, limbah pertanian, limbah peternakan, limbah UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), dan limbah industri.

- 1) Beban pencemar dari limbah domestik
Sungai Lematang dan sungai Selangis merupakan wilayah paling tinggi beban pencemar dari limbah domestik COD sebesar 500.000 kg/hari dan BOD 220.000 kg/hari.
- 2) Beban pencemar dari limbah pertanian dan penggunaan lahan (non-titik)
Sungai Lim merupakan wilayah paling tinggi beban pencemar dari limbah pertanian dan penggunaan COD sebesar 7.685 kg/hari dan BOD sebesar 1.750 kg/hari.
- 3) Beban pencemar dari limbah peternakan
Beban pencemar dari limbah peternakan terbesar berasal hewan sapi dan kerbau dengan kandungan COD sebesar 9.000 Kg/hari dan BOD 1.790 kg/hari
- 4) Beban pencemar dari limbah UMKM
Sungai Endikat paling tinggi beban pencemar dari limbah UMKM dengan jumlah COD sebesar 7.950 kg/hari dan BOD sebesar 1.755 kg/hari.
- 5) Beban pencemar dari limbah Industri
Sungai Lematang merupakan sungai dengan jumlah industri terbanyak yang membuang limbah sebanyak 18 industri.

Pada bidang persampahan, saat ini volume sampah di Kabupaten Lahat sebesar 120.922,53 ton/tahun dan penyumbang timbulan sampah terbesar berada di kecamatan Lahat. Pelayanan sampah di kabupaten Lahat masih terpusat di daerah perkotaan.. Berbagai alternatif pengelolaan sampah dapat diarahkan kepada program atau kegiatan daur ulang sampah serta pembangunan teknologi pengolahan limbah/sampah, sehingga volume sampah





dapat dikurangi.

Timbulan sampah di Kabupaten Lahat telah melampaui dari kapasitas yang ada. Dalam pengelolaan sampah dapat melalui kegiatan 3R (*reduce, reuse, recycle*) di berbagai sumber timbulan sampah seperti permukiman, industri, pasar, perkantoran, dan lain- lain. Sistem yang diterapkan dalam pengolahan sampah secara ramah lingkungan seperti sanitary landfill dan semi sanitary landfill sudah diterapkan oleh TPA yang berada di Kabupaten Lahat tetapi masih kekurangan Fasilitas dalam pengolahan dan penampungan sampah. Saat ini fasilitas pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Lahat.

4.5.8 Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

Penyelenggaraan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Lahat merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian persentase penduduk yang belum memiliki KK meningkat pada Tahun 2018 sebesar 25,5%. Dalam pemenuhan penduduk wajib KTP yang sudah memiliki KTP pada tahun 2018 telah mencapai 85%, sedangkan untuk penerbitan Akta Kelahiran sebesar 20% dan Akta Kematian sebesar 14%. Hal tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan yang baik dan sesuai prosedur.

4.5.9 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada tahun 2017, dalam rangka meningkatkan pasar desa yang modern, Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa bidang ekonomi sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat mengadakan pembinaan pengelolaan pasar desa yang





difokuskan pada 25 pasar desa di Kabupaten Lahat. Dengan harapan pasar desa tersebut akan menjadi pasar yang sehat, nyaman, aman, bersih dan memiliki manajemen pengelolaan yang profesional sehingga kesejahteraan pedagang meningkat. Selain itu Pemerintah Kabupaten Lahat juga melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada 58 desa di wilayah Kabupaten Lahat.

Sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menuju desa swasembada, masyarakat Desa Muara Tiga Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat berperan secara aktif dalam menyukseskan program Bulan Bakti Gotong-Royong Masyarakat (BBGRM). Kegiatan ini merupakan salah satu program unggulan Pemerintah dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong-Royong Masyarakat. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peran serta masyarakat dalam pembangunan terutama dalam bidang kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

4.5.10 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (target SPM 65%) kurun waktu 2014-2018 menunjukkan angka yang fluktuatif yaitu pada tahun 2014 adalah 73,04% meningkat menjadi 76,09% di tahun 2017, akan tetapi pada tahun 2018 menurun menjadi 73,28%. Realisasi cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif telah melebihi target SPM sebesar 65%. Tercapainya indikator ini didukung oleh Program Keluarga Berencana seperti penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pelayanan KIE, peningkatan perlindungan hak reproduksi individu, promosi pelayanan KHIBA, pembinaan keluarga berencana, dan Program Pelayanan Kontrasepsi melalui pelayanan konseling KB,



pelayanan pemasangan kontrasepsi dan pelayanan KB Medis Operasi. Beberapa kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah mencapai target yang telah ditetapkan seperti cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (target SPM 65%), cakupan PUS yg istrinya dibawah usia 20 tahun, cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB, Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang berKB dan Rasio PPKBD setiap desa/kelurahan. Sedangkan kinerja yang belum memenuhi target SPM antara lain cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi/ unmeet need dan Rasio PLKB/PKB (petugas/desa).

4.5.11 Urusan Perhubungan

Sejalan dengan peningkatan jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Lahat, Pemerintah Kabupaten Lahat telah melaksanakan beberapa program seperti Peningkatan Pelayanan Angkutan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Saat ini transportasi Darat yang ada di Kabupaten Lahat tahun 2017 berupa angkutan darat umum yang berjumlah 210 angkutan darat dengan jumlah penumpang 16.618 orang dengan menggunakan angkutan desa.

4.5.12 Urusan Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2018, capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lahat yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo antara lain: pengembangan komunikasi, informasi dan media massa melalui kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, Pembinaan dan pengembangan sumber daya



komunikasi dan informasi, Pengkajian dan pengembangan sistem informasi, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi, Pembuatan Website Humas Pemerintah Kabupaten. Selain itu, dilaksanakan juga Program kerja sama informasi dengan massa media, melalui kegiatan penyebaran informasi pembangunan daerah dan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lahat terlihat lebih baik. Hal tersebut, ditandai dengan semakin meningkatnya implementasi penggunaan jaringan komunikasi dan informasi di Kabupaten Lahat. Saat ini Dinas Komunikasi dan informasi menerapkan publikasi berbasis online pada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat melalui website www.lahatkab.go.id dengan harapan data dan informasi Kabupaten Lahat dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan lengkap.

4.5.13 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan jumlah koperasi menurut jenis koperasi di Kabupaten Lahat kurun waktu 2014-2018 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014 jumlah koperasi di Kabupaten Lahat sebanyak 358 koperasi menurun menjadi 168 koperasi di tahun 2018. Kurangnya kemampuan anggota koperasi dalam mengelola koperasi sangat berpengaruh pada jalannya usaha koperasi tersebut.

Persentase koperasi yang berprestasi pada tahun 2018 sebesar 22,14% sedangkan untuk Persentase pertumbuhan Usaha Mikro Kecil sebesar 61,20%. Strategi Pemerintah Kabupaten Lahat dalam mendukung upaya pencapaian target tersebut adalah melalui peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang ada di Kabupaten Lahat dan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM, dan Penciptaan Iklim





Usaha yang kondusif.

4.5.14 Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pemerintah Kabupaten Lahat dalam meningkatkan promosi dan kerjasama investasi melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah dan dunia usaha guna meningkatkan kerjasama di bidang penanaman modal antara instansi pemerintah baik tingkat propinsi maupun lembaga pusat. Selain itu juga dilaksanakan temu usaha antara pemerintah dengan dunia usaha yang ada di Kabupaten Lahat dengan pengusaha PMDN, dan Instransi terkait yang bertujuan untuk terwujudnya konsep kemitraan dan pengembangan di bidang investasi serta terjalin kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan dunia usaha.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat telah memberikan kemudahan pelayanan perizinan di Kabupaten Lahat. Bagi pemohon yang akan membayar pajak dan retribusi atas izin yang dimohonkan cukup di Kantor DPM dan PTSP Kabupaten Lahat, selain itu pula bagi perusahaan- perusahaan yang akan mendaftarkan tenaga kerjanya di BPJS Kesehatan juga telah tersedia di Kantor Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat.

4.5.15 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Lahat dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga. Pada kurun waktu 2014-2018, sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga adalah meningkatnya prestasi generasi muda dan meningkatnya prestasi olahraga. Pembangunan di bidang kepemudaan dilakukan melalui peningkatan kualitas dari kegiatan yang melibatkan pemuda dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Lahat.



Kegiatan difokuskan pada pembekalan bagi pemuda dengan pelatihan keterampilan dan wawasan tentang kewirausahaan dengan harapan mampu mencetak pemuda produktif yang memiliki kompetensi dan mampu berperan aktif ditengah-tengah masyarakat. Selain itu juga dilakukan pembibitan dan pembinaan atlet berprestasi di berbagai cabang olahraga agar mampu bersaing dan berprestasi pada pertandingan olahraga ditingkat regional maupun nasional.

4.5.16 Urusan Perpustakaan

Perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan kurun waktu 2014-2018 menunjukkan tren meningkat, seiring dengan meningkatnya persentase minat baca masyarakat Kabupaten Lahat. Capaian kinerja Jumlah pengunjung, peminjam dan koleksi buku pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Dalam menunjang kegiatan dan Pelayanan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan khususnya meubelair dan sarana penunjang lainnya, antara lain pengadaan buku-buku perpustakaan untuk menambah koleksi bahan-bahan pustaka. Untuk menjangkau masyarakat pengguna perpustakaan di wilayah-wilayah terpencil di seluruh Kabupaten Lahat, perlu adanya Perpustakaan Keliling. Selain itu, untuk menunjang minat baca pada anak-anak, perlu didirikan ruang baca khusus anak-anak. Ruangan ini rencananya akan dibuat menarik dengan dihiasi gambar-gambar warna-warni sesuai dunia anak-anak. Diharapkan dengan ruangan yang demikian, anak-anak lebih suka berkunjung dan memanfaatkan sarana perpustakaan yang ada. Bagi pengguna perpustakaan yang ingin mendapatkan informasi lewat internet disediakan sarana komputer untuk akses internet secara gratis. Begitu juga bagi mereka yang membawa





sendiri komputer laptop atau PDA, disediakan juga fasilitas jaringan internet wireless.

Dinas Perpustakaan telah menggunakan kartu keanggotaan perpustakaan elektronik untuk tertibnya administrasi. Dengan sarana ini pengunjung perpustakaan cukup menggunakan kartu elektronik ini untuk peminjaman dan pengembalian buku. Secara otomatis komputer akan meng-update ke data base komputer. Sedangkan untuk menunjang pelayanan perpustakaan yang prima, maka perpustakaan perlu menyediakan informasi-informasi bagi masyarakat luas mengenai koleksi buku-buku di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat. Beberapa program dan kegiatan yang akan dilakukan Dinas Perpustakaan kedepan untuk meningkatkan pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat kepada masyarakat antara lain peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, pemenuhan erpenuhinya sarana dan prasarana Dinas Perpustakaan yang lengkap dan modern, meningkatnya sumber daya manusia yang profesional dan mandiri, meningkatkan pengembangan budaya baca dengan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan/pemustaka, meningkatkan pembinaan Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat, meningkatkan jangkauan pelayanan perpustakaan ke desa-desa, membangun gedung perpustakaan yang refresentatif, mewujudkan perpustakaan desa yang mandiri, mewujudkan perpustakaan berbasis digital secara nasional dan adanya ruang baca anak.

4.6 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

4.6.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Lahan potensi untuk pengembangan perikanan budidaya dan tangkap di Kabupaten Lahat seluas 15.400 km² yang terdiri





dari perairan umum, kolam, tebat dan sawah. Lahan tersebut masih belum termanfaatkan secara optimal. Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap Kabupaten Lahat sebesar 10.974 ton dengan jenis ikan yaitu nila, gurame, lele, patin, mas dan ikan lokal perairan umum.

Pada umumnya pelaku usaha di bidang perikanan budidaya dan tangkap di Kabupaten Lahat masih bersifat tradisional, untuk dikonsumsi pribadi dan belum dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di Kabupaten Lahat. Ada beberapa jenis kelompok perikanan di Kabupaten Lahat yaitu Kelompok Budidaya Perikanan sebanyak 89 kelompok, Kelompok Usaha Bersama sebanyak 12 kelompok dan Kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan sebanyak 2 kelompok. Selanjutnya, untuk pengembangan pembangunan di sektor perikanan didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang ditempatkan di beberapa kawasan potensi untuk pengembangan usaha perikanan. Sarana dan prasarana pengembangan usaha budidaya perikanan di Kabupaten Lahat terdiri dari BBI Kota Agung seluas 6.202 m², BBI Tanjung Sakti seluas 6.000 m², KAD Tanjung Sirih sebanyak 1 unit, Pasar Benih Ikan sebanyak 1 unit, Pasar Ikan Jarai sebanyak 1 unit, Laboratorium Kesehatan Ikan sebanyak 1 unit, dan Kantor UPTD PBI Kecamatan Lahat.

Berdasarkan data potensi dan permasalahan yang ada, maka dibuat rencana pengembangan usaha perikanan di Kabupaten Lahat dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan di Kabupaten Lahat, pemenuhan tingkat konsumsi ikan, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan usaha perikanan. Beberapa rencana pembangunan di bidang perikanan yaitu meningkatkan luas area lokasi 2 (dua) unit Balai Benih Ikan yang terdapat di Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Tanjung Sakti.





4.6.2 Urusan Pariwisata

Sejalan dengan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2014-2018, Pemerintah Kabupaten Lahat terus menggali potensi wisata dan melakukan promosi kepada wisatawan dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Lahat melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja urusan pariwisata seperti meningkatkan promosi budaya dan pariwisata baik skala nasional maupun internasional, mengembangkan objek-objek wisata unggulan, pembangunan infrastruktur pada objek wisata dan sebagainya.

Dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan yang datang ke Kabupaten Lahat, diperlukan tersedianya sarana akomodasi yang memadai. Saat ini Kabupaten Lahat telah memiliki 5 (lima) hotel kelas bintang dan 7 (tujuh) hotel bukan kelas bintang. Sedangkan untuk rumah makan tercatat ada 151 rumah makan di Kabupaten Lahat. Pada tahun 2018 Kabupaten Lahat memiliki 86 tempat objek wisata alam, 4 objek wisata buatan dan 11 tempat objek wisata budaya yang tersebar di 16 kecamatan. Pada tahun 2018, jumlah kamar akomodasi yang tersedia di hotel dan losmen yang ada di Kabupaten Lahat ada sebanyak 520 kamar dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 273 orang. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan ketersediaan fasilitas akomodasi hotel dan tenaga kerja pada tahun 2017. Peningkatan ini menunjukkan tingginya penggunaan kamar sehingga hotel harus menambah tenaga kerja dan kamar huni setiap tahunnya.

4.6.3 Urusan Pertanian

Kabupaten Lahat merupakan salah satu daerah pertanian di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki lahan sawah seluas





17.158 hektar dan lahan bukan sawah sawah seluas 342.213 hektar. Salah satu sektor unggulan dalam pertanian adalah tanaman pangan yang mencakup padi, jagung, kedele, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Tahun 2018, produksi padi (padi sawah dan Padi ladang) sebanyak 229.776 ton, produktivitas 54,30 kuintal per hektar dengan luas panen 42.029 hektar padi sawah dan 1.384 hektar padi ladang.

Selanjutnya untuk jenis tanaman palawija mencakup jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Pada tahun 2018, produksi palawija yang paling banyak adalah produksi jagung yaitu sebesar 7.876 ton, disusul ubi kayu sebesar 2.125 ton, ubi Jalar sebesar 2.068 ton, Kedelai sebesar 422 ton, kacang tanah sebesar 198 ton, dan yang terkecil adalah produksi kacang hijau sebesar 160,5 ton. Selain tanaman palawija di Kabupaten Lahat juga terdapat tanaman buah-buahan.

Selanjutnya untuk jenis tanaman sayur-sayuran yang ada di Kabupaten Lahat meliputi bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang, kubis, kembang kol, petsai/sawi, wortel, lobak, kacang merah, kacang panjang, cabe, cabe rawit, paprika, jamur, tomat, terung, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, bayam dan sebagainya.

Selain tanaman pangan terdapat banyak jenis tanaman yang diusahakan oleh perkebunan rakyat, baik tanaman perkebunan berumur pendek seperti nilam maupun perkebunan berumur panjang seperti karet, kelapa, kopi, lada, kakao dan lainnya. Hanya saja yang cukup menonjol adalah kopi dan karet, sementara kelapa sawit diusahakan oleh perkebunan besar. Pada tahun 2018, luas tanaman perkebunan kopi paling luas sebesar 54.441 ha jika dibandingkan dengan luas tanaman perkebunan lainnya yaitu karet sebesar 43.232 hektar, kelapa sawit sebesar 13.636 hektar, dan kakao sebesar 4.366 hektar.

Selain Urusan Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten





Lahat juga melaksanakan Urusan Peternakan di Kabupaten Lahat. Adapun hasil peternakan terdiri dari daging, telur dan susu. Produksi daging Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2014-2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, produksi daging sebesar 2.353 ton meningkat menjadi 4.810 ton di tahun 2018. Demikian juga halnya dengan produksi telur, dimana pada tahun 2014 produksi telur mencapai 2.232 ton meningkat menjadi sebesar 2.443 ton di tahun 2018.

Hasil peternakan selain dari produksi daging dan telur, juga bisa dihitung dari populasi ternak. Perkembangan populasi ternak di Kabupaten Lahat terbagi menjadi populasi ternak besar dan populasi ternak kecil/unggas. Adapun yang termasuk populasi ternak besar adalah sapi (termasuk sapi perah), kerbau dan kuda, sedangkan yang termasuk populasi ternak kecil/unggas adalah kambing, domba, babi, ayam kampung, ayam petelur dan itik. Pada tahun 2018, populasi ternak besar yang paling banyak adalah populasi sapi sebanyak 11.382 ekor dibandingkan populasi ternak besar lainnya seperti kerbau sebanyak 1.668 ekor. Sedangkan untuk populasi ternak kecil dan unggas yang paling banyak adalah populasi ternak kambing sebanyak 13.920 ekor dan populasi ternak ayam pedaging sebanyak 2.282.566 ekor.

4.6.4 Urusan Perdagangan

Pada tahun 2018 , sarana perdagangan di Kabupaten Lahat dilihat dari jenisnya berjumlah 1.833 fasilitas. Jenis sarana kios dan rumah makan merupakan jenis sarana perdagangan dengan persentase tertinggi yaitu 35,46 persen atau masing-masing sebanyak 650 kios, sedangkan fasilitas pasar umum di Kabupaten Lahat berjumlah 9 pasar.

4.7 FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG





4.7.1 Urusan Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Lahat menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat tahun 2016 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Adapun muatan laporan tersebut menjelaskan tentang arah kebijakan umum pemerintahan, pengelolaan keuangan secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Elemen data yang dihimpun berasal dari seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Tim Penyusun, dan hasil penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah Kabupaten Lahat dilanjutkan dengan *self-assessment* oleh Tim Evaluasi Daerah dan Setelah dilakukan penyempurnaan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lahat untuk dilakukan pembahasan dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna tentang Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah Kabupaten Lahat.

4.7.2 Urusan Pengawasan

Capaian tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk Kabupaten Lahat pada tahun 2018 memperoleh nilai 64,1 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan





pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Lahat sudah menunjukkan hasil yang baik. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka capaian tahun 2018 adalah mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten Lahat berharap dapat mempertahankan nilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban dengan baik atau predikat B.

4.7.3 Urusan Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membantu pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pada periode 2014-2018, Bappeda Kabupaten Lahat telah menyusun dokumen-dokumen perencanaan daerah yang meliputi RPJMD dan RKPD dengan tepat waktu dan melibatkan partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan menampung aspirasi masyarakat mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Lahat akan menerapkan perencanaan berbasis *e_planning*.



4.7.4 Urusan Keuangan

Badan Keuangan Daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan keuangan. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.917.046.551.222,32 atau 105% dari target pendapatan tahun anggaran 2018. Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp112.549.070.975,37 atau 90,94% dari yang ditargetkan. Realisasi pendapatan transfer tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.377.663.737.906,00 atau 106,20% dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 426.833.742.340,95 atau 105,47%. Sedangkan realisasi belanja pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.834.893.019.295,00 atau 95,21% dari target belanja tahun anggaran 2018 yang terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.119.633.141.296,00 dan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 715.259.877.999,00.

Realisasi pembiayaan tahun anggaran 2018, yaitu penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan penerimaan piutang daerah dan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal (investasi). Penerimaan pembiayaan pada tahun 2018 berasal dari SILPA sebesar Rp 1.942.278.544,69. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah ditandai dengan penerimaan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) bagi Kabupaten Lahat.

4.7.5 Urusan Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat berdasarkan data tahun 2018 berjumlah 6.761 orang dengan komposisi Eselon II.B sebanyak 31 orang, Eselon III.A sebanyak 75 orang, Eselon III.B sebanyak 137 orang, Eselon





IV. A sebanyak 720 orang, Eselon IV.B sebanyak 233 orang, Eselon V.A sebanyak 17 orang, Jabatan Fungsional tertentu Ahli dan Terampil sebanyak 3.548 orang dan Jabatan Fungsional Umum sebanyak 2000 orang.

Persentase ASN dilingkungan Pemkab Lahat berdasarkan golongan pada tahun 2018 meliputi golongan IV.C sebanyak 32 orang, golongan IV.B sebanyak 318 orang, golongan IV.A sebanyak 1.093 orang, golongan III.D sebanyak 1.219 orang, golongan III.C sebanyak 826 orang, golongan III.B sebanyak 1114 orang, golongan III.A sebanyak 936 orang, golongan II.D sebanyak 187 orang, golongan II.C sebanyak 561 orang, golongan II.B sebanyak 286 orang, golongan II.A sebanyak 139 orang, golongan I.D sebanyak 19 orang, golongan I.C sebanyak 18 orang, golongan I.B sebanyak 9 orang dan golongan I.A sebanyak 4 orang.

4.7.6 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat melaksanakan Urusan Penelitian dan Pengembangan melalui pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lahat. Badan ini merupakan pelaksana kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian (kelitbangan) di bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan serta pembangunan. Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah memberikan rekomendasi dan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lahat karena minimnya publikasi hasil penelitian terkait bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, bidang





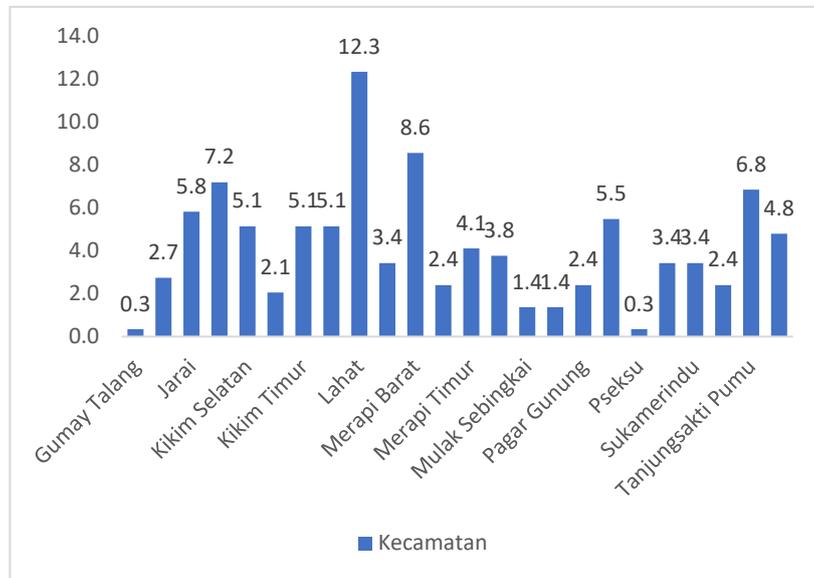
pembangunan serta kemasyarakatan dan masih rendahnya kehadiran inovasi (produk, proses, organisasi, pasar dan perilaku) untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Lahat.



BAB V HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Sebaran Responden

5.1.1 Sebaran Responden Menurut Kecamatan



Gambar 5. 1 Sebaran Responden Menurut Kecamatan

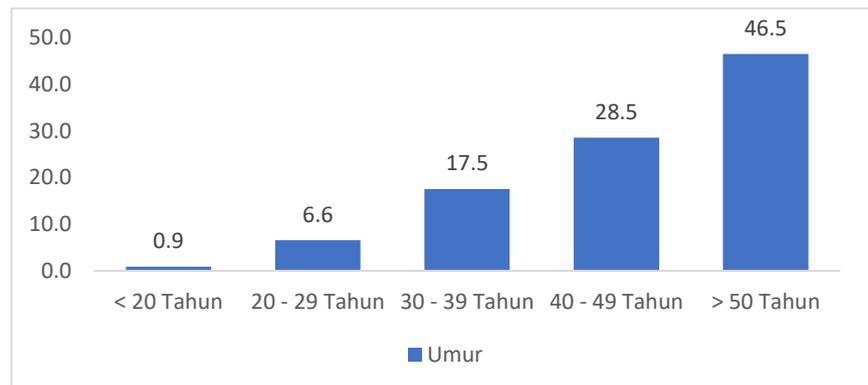
Sumber : Data Primer diolah 2023





Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut Kecamatan di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui 24 responden berasal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Lahat. Responden Kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini.

5.1.2 Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur



Gambar 5. 2 Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur

Sumber : Data Primer diolah 2023

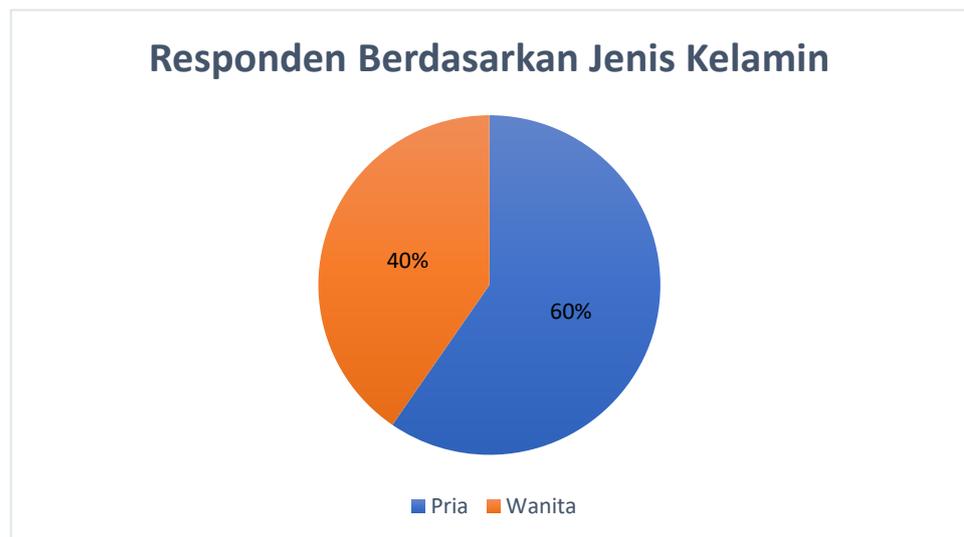
Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut kelompok usia di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar





tabel tersebut diketahui sebanyak 46,5% responden berusia >50 tahun, disusul 28,5% penduduk berusia 40-49 tahun, kemudian 17,5% penduduk berusia 30-39 tahun, lalu sebesar 6,6 % penduduk berusia 20-29 tahun, dan terakhir kelompok usia di bawah 20 tahun sebesar 0,9%. responden dalam kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini.

5.1.3 Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin



Gambar 5. 3 Sebaran responden berdasarkan jenis kelamin

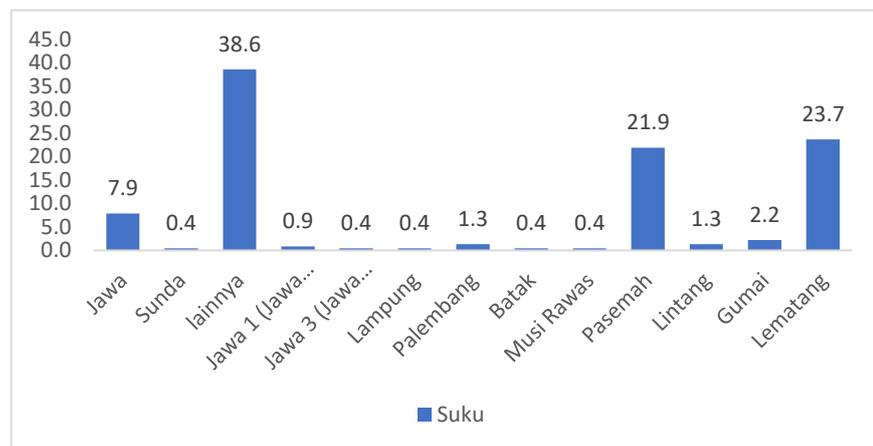
Sumber : Data Primer diolah 2023





Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut jenis kelamin di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 60% berjenis kelamin laki-laki sedangkan 40 % diantaranya responden berjenis kelamin perempuan, responden dalam kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini. Sejalan dengan rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan di Kabupaten Lahat menurut kecamatan sebagai berikut:

5.1.4 Sebaran Responden Menurut Suku



Gambar 5. 4 Sebaran Responden Menurut Suku

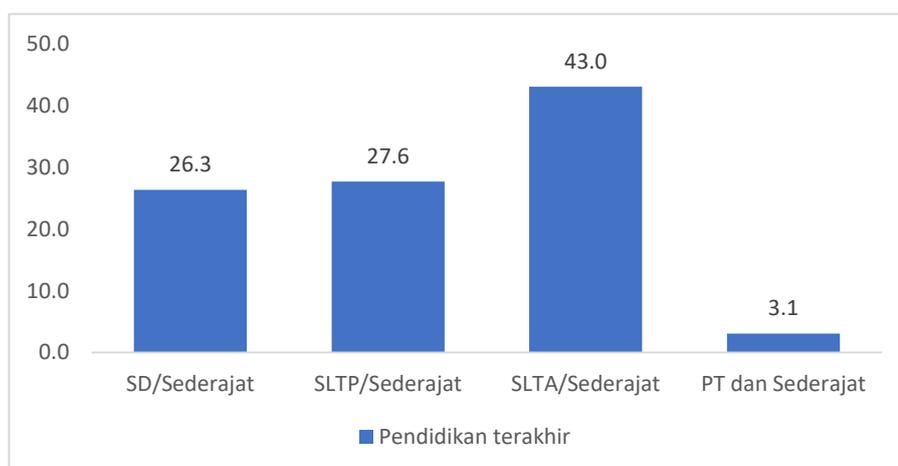
Sumber : Data Primer diolah 2023

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut sebaran suku di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil



simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 38,6% dari suku lainnya sekaligus yang paling banyak, sedangkan suku Batak, musi Rawaas, Lampung, Sunda dan Jawa 3 hanya 0,4% sekaligus menjadi yang berjumlah paling sedikit. responden dalam kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini. Lahat dikenal di Sumatera Selatan dengan 4 suku yang ada di sana sehingga disebut Lekipali.

5.1.5 Sebaran Responden Menurut Pendidikan Terakhir



Gambar 5. 5 Sebaran Responden Menurut Pendidikan Terakhir

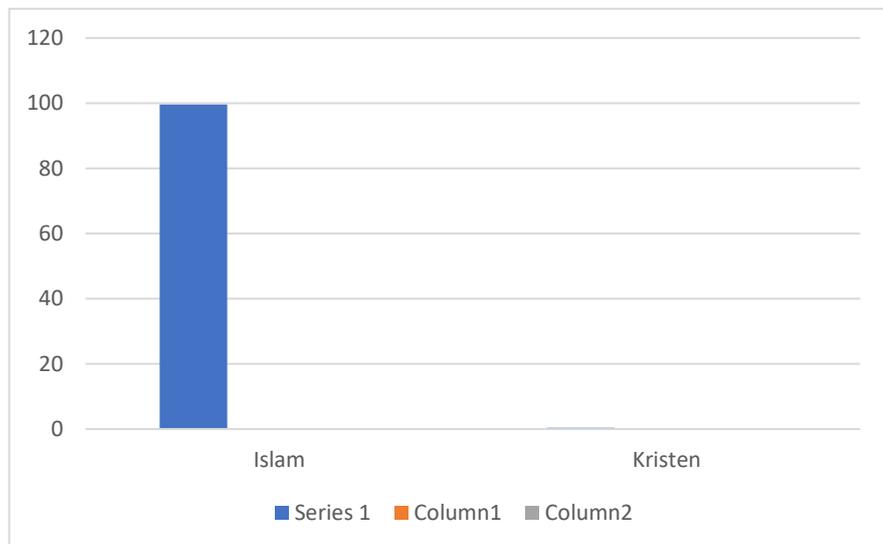
Sumber : Data Primer diolah 2023

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut sebaran tingkat Pendidikan responden di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara



representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 43% berpendidikan SMA sederajat, kemudian peringkat kedua sebesar 27,6% berpendidikan SLTP/Sederajat, lalu 26,3% berpendidikan SD/Sederajat, untuk pendidikan tinggi sebesar 3,1%, dan masyarakat yang tidak sekolah sebesar 0,8% sekaligus menjadi yang berjumlah paling sedikit. responden dalam kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini.

5.1.6 Sebaran Responden Menurut Agama



Gambar 5. 6 Sebaran Responden Menurut Agama

Sumber : Data Primer diolah 2023

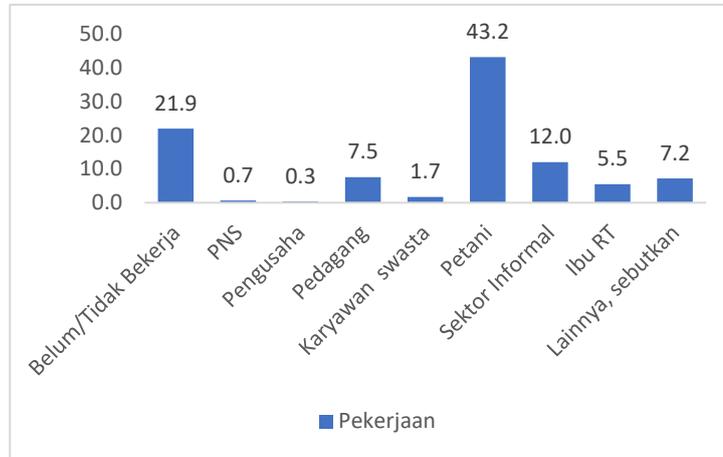
Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut agama responden di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 99,6% beragama Islam,





kemudian 0,4% beragama Kristen. responden dalam kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini.

5.1.7 Sebaran Responden Menurut Pekerjaan



Gambar 5. 7 Responden Berdasarkan Pekerjaan

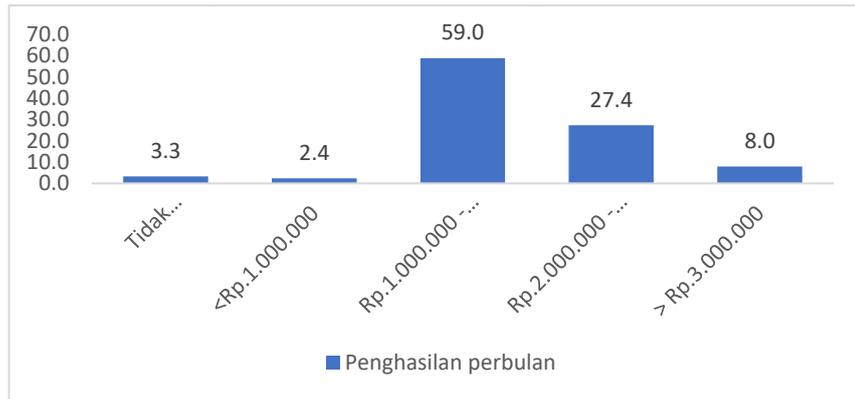
Sumber : Data Primer diolah 2023

Berdasar Gambar di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut pekerjaan responden di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 43,2% sebagai petani, kemudian peringkat terendah sebagai karyawan swasta. responden dalam kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini.





5.1.8 Sebaran Responden Menurut Penghasilan Perbulan



Gambar 5. 8 Sebaran Responden Menurut Penghasilan Perbulan

Sumber : Data Primer diolah 2023

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut pendapatan responden di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 59% berpenghasilan Rp. 1.000.000 – Rp 2.000.000. sedangkan 27,4% berpenghasilan Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000. sebanyak 8% berpenghasilan lebih dari Rp. 3.000.000. serta sebanyak 2,4% berpenghasilan kurang dari Rp. 1.000.000. dan sebanyak 3,3% masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap. Data responden di atas bisa diselaraskan dengan tabel pengeluaran masyarakat di bawah ini.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik (ed). (1982). Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi. Jakarta: LP3ES.
- (1996). Agama dan Perubahan Sosial.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. Kedua.
- Adler, Alfred. (2002). The Neuratic Character: Fudamentals of Individual Pshycology and Phycoteraphy. Alfred Adler Institute of Nortwestern Washington.
- Boeree, George (2006). Personality Theories, Jogjakarta: Priskasophie.
- Budiraharjo, Paulus (ed) (1997). Mengenal Teori Kepribadian Mutakhir. Yoyakarta: Kanisius.
- Dalu, Ki Buyut (2011). Cara Mudah Memahami Agama Hindu.
Kayumas Agung.
- Gerungan, (2004). Psikologi sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Helmiati, Kesalehan Individual dan Kesalehan Sosial, redaksi@ uin-suska.ac.id. Diunduh pada 16 Oktober 2019.
- Mahfudz, Sahal (1994). Nuansa Fiqh Sosial. Yogyakarta: LKiS.
- Oetomo, Hasan (2012) Pedoman Dasar Pendidikan Budi Pekerti.
Jakarta: PT. Presatasi Pustakaraya.
- Rahardjo, Dawam (ed), (1985). Insan Kamil Konsepsi Manusia Menurut Islam. Jakarta: Grafiti Press.
- Rahman, Fazlur, (1983). Tema-Tema Pokok Al-Quran. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Suyuti, Imam (1996), Fawaahidul Saniah, Darul Basyair: Libanon.
- Sobary, Mohammad (2007). Kesalehan Sosial. Yogyakarta: LkiS.
- Walgito, Bimo (1994). Psikologi Sosial (Suatu Pengantar).
Yogyakarta: Andi Offset.
- Wayment, Heidi. A., Bauer J. Jack., Sylaska, Kateryna, (2014). The Quiet Ego Scale: Measuring the Compassionate Self- Identity. Journal of Happiness Studies.
- Weber, Max (1958). The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism. New York: Charles Scribner's Son.





Mujani, Saiful., Liddle, William. R., Pepinsky, Thomas B. (2018). *Piety and Public Opinion: Understanding Indonesian Islam*. Oxford University Press.



LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan Survey Kajian Penguatan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Lahat









